



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024



Arah Pembangunan Wilayah

1. PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA

1.1. Target Pembangunan Wilayah Papua

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional sesuai tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Target Pembangunan Wilayah Papua 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Papua Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,24	2,00	5,70	6,50	7,10	7,60	8,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	23,01	22,17	20,03	19,01	17,00	16,05	14,67
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,30	6,24	6,00	5,80	5,60	5,20	4,90
Papua	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,33	2,10	4,70	5,80	6,80	7,50	7,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	27,74	27,53	24,59	23,55	21,88	19,95	19,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,20	3,65	2,90	2,90	2,90	2,50	2,30

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.

Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan Wilayah Papua, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Papua 2020-2024

Provinsi	Kebutuhan Investasi	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Papua Barat	Rp triliun	17,72	11,59	21,64	23,78	26,69	30,09	33,85
Papua	Rp triliun	78,80	47,72	76,54	92,69	104,03	117,47	132,84

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen

1.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Papua

Prioritas pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024 mengutamakan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, serta pendekatan berbasis ekologis dan tujuh wilayah adat: Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay sejalan dengan pelaksanaan UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang mengamanatkan penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; pengembangan wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; dan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang

mengamanatkan tentang: (1) Peningkatan kualitas dan akses pendidikan; (2) Peningkatan kualitas dan akses kesehatan; (3) Jaminan sosial dan kesejahteraan sosial; (4) Permukiman layak, air bersih dan sanitasi; (5) Pengembangan ekonomi lokal; (6) Konektivitas: Trans Papua, perhubungan laut, sungai dan udara, telekomunikasi dan internet; dan (7) Penguatan tata kelola dan kelembagaan.

Selain berbasiskan wilayah adat, pembangunan Wilayah Papua akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Papua 2020-2024

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Papua	1	Kabupaten Nabire	Papua Barat	1	Kota Sorong*
	2	Kabupaten Dogiyai		2	Kabupaten Sorong
	3	Kabupaten Mimika		3	Kabupaten Tambraw
	4	Kabupaten Paniai		4	Kabupaten Manokwari
	5	Kabupaten Deiyai		5	Kabupaten Manokwari Selatan
	6	Kabupaten Intan Jaya		6	Kabupaten Teluk Wondama
	7	Kabupaten Puncak			
	8	Kabupaten Puncak Jaya			
	9	Kabupaten Tolikara			
	10	Kabupaten Jayawijaya			
	11	Kabupaten Yalimo			
	12	Kabupaten Jayapura			
	13	Kota Jayapura*			
	14	Kabupaten Keerom			
	15	Kabupaten Pegunungan Bintang			
	16	Kabupaten Boven Digoel			
	17	Kabupaten Merauke			
Koridor Pemerataan					
Papua	1	Kabupaten Biak Numfor	Papua Barat	1	Kabupaten Sorong Selatan
	2	Kabupaten Supiori		2	Kabupaten Maybrat
	3	Kabupaten Mamberamo Raya		3	Kabupaten Pegunungan Arfak
	4	Kabupaten Mamberamo Tengah		4	Kabupaten Raja Ampat
	5	Kabupaten Nduga		5	Kabupaten Teluk Bintuni
	6	Kabupaten Lanny Jaya		6	Kabupaten Fakfak
	7	Kabupaten Yahukimo			
	8	Kabupaten Sarmi			
	9	Kabupaten Mappi			

Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW

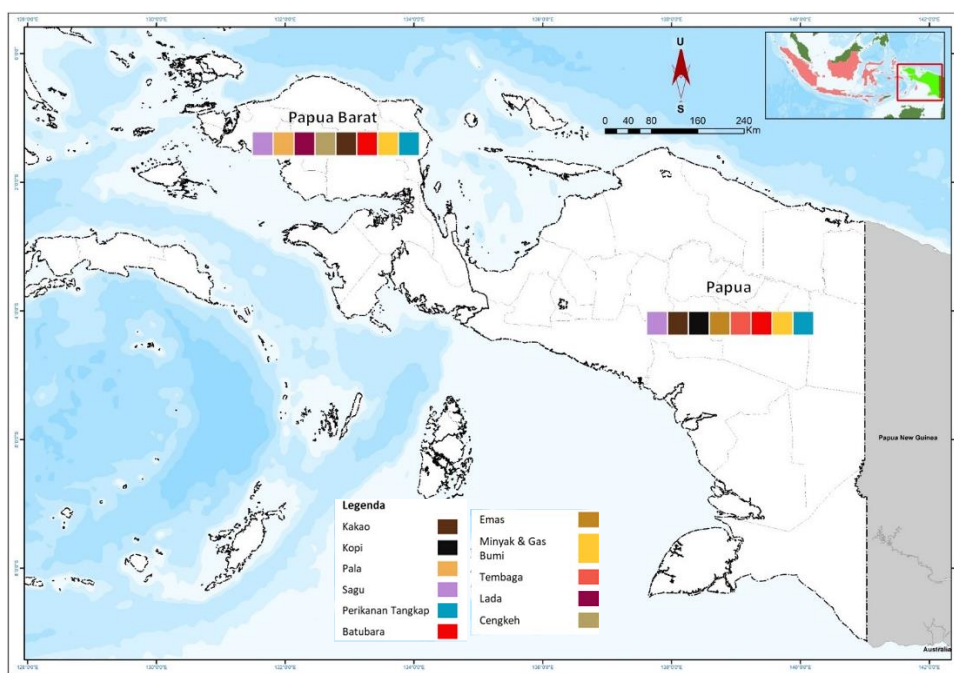
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Papua akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

1.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu: sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu:
 - a. Provinsi Papua: sagu, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap; dan
 - b. Provinsi Papua Barat: sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap.
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- 3) Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Biak, SKPT Timika, dan SKPT Merauke, WPP 717 (Perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik), dan WPP 718 (Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur).

Gambar 1.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Papua





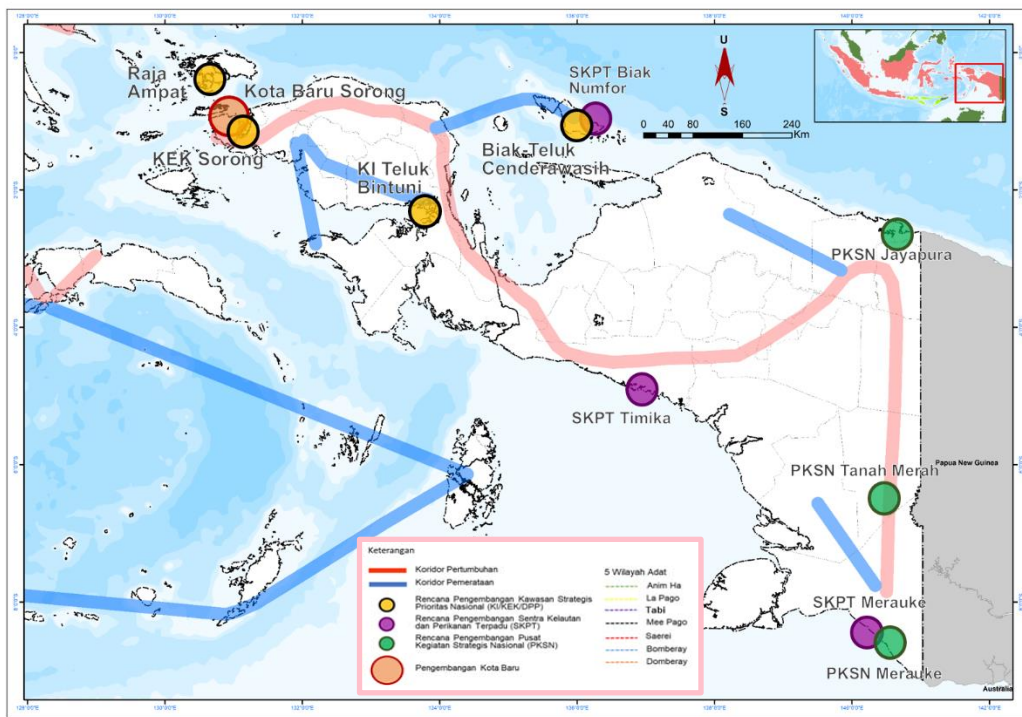
- 4 -

1.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

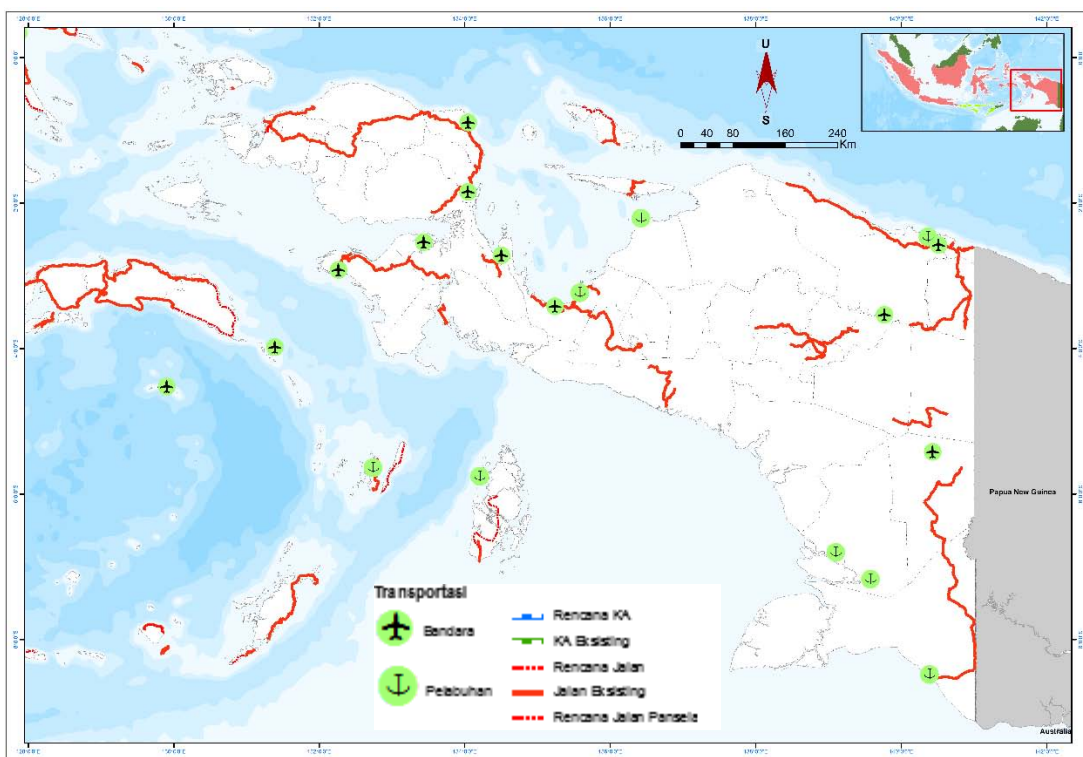
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri pengolahan yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni;
- 2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Raja Ampat dskt dan DPP Biak – Teluk Cenderawasih;
- 3) Pembangunan jalan Trans Papua, jalan akses KEK Sorong, jalan akses DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Moor (Mappi), Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani/Manokwari, Bandara Nabire Baru, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil;
- 4) Pengembangan *outlet* pelabuhan *hub* Pelabuhan Sorong serta Bandara Biak yang berpotensi sebagai *hub* penerbangan internasional;
- 5) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi terutama Pelabuhan Sorong sebagai hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan;
- 6) Percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan pesisir dan pegunungan;
- 7) Peningkatan kualitas SDM khususnya sekolah berpola asrama, pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, pemerataan layanan kesehatan, pelayanan kesehatan bergerak, Balai Latihan Kerja, asrama mahasiswa nusantara, dan afirmasi ASN; dan
- 8) Pengembangan 34 SMK di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

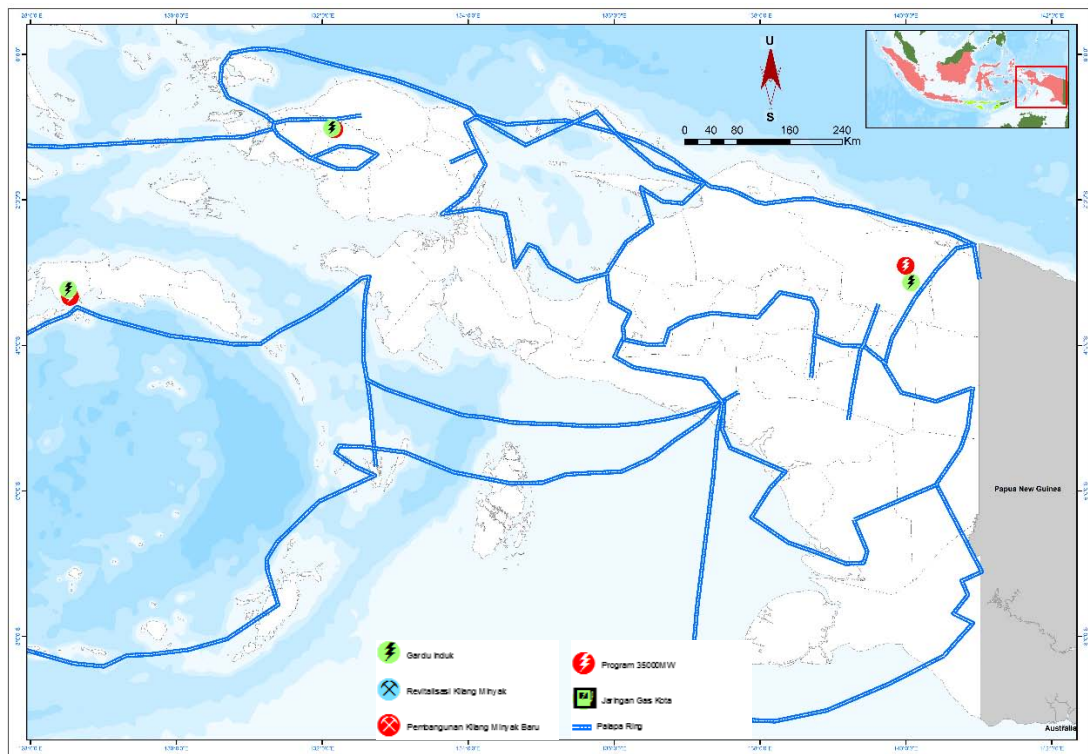
Gambar 1.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Papua



Gambar 1.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Papua 2024



Gambar 1.4.
Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Sumber Energi
Wilayah Papua 2024



1.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan pembangunan Kota Baru Sorong (Tabel 1.3); dan
- 2) Penguatan keterkaitan desa-kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis ekonomi digital.

1.2.4 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses internet di 22 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua dan 8 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat. Dari 22 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua, terdapat 20 kabupaten yang berada dalam koridor kewilayahan, antara lain: koridor pertumbuhan meliputi Keerom, Nabire, Boven Digoel, Deiyai, Jayawijaya, Paniai, Dogiyai,



- 7 -

Intan Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara; sementara itu koridor pemerataan meliputi Supiori, Mappi, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Nduga. Adapun delapan (8) kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat seluruhnya berada dalam koridor kewilayahan, yaitu koridor pertumbuhan: Teluk Wondama, Sorong, Tambrauw, Manokwari Selatan; dan koridor pemerataan: Teluk Bintuni, Maybrat, Sorong Selatan, dan Pegunungan Arfak;

- 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya juga dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022), yang mana untuk Pulau Papua berlokasi di 5 kabupaten berikut, antara lain: Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Sarmi di Provinsi Papua; serta Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 36 kecamatan lokpri di Provinsi Papua dan 3 kecamatan lokpri di Provinsi Papua Barat;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
- 5) Percepatan pembangunan desa/kampung secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kampung yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, dan pengembangan kampung wisata, kampung digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa/kampung dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset kampung; pemberdayaan masyarakat kampung adat dan penguatan pendamping kampung khususnya pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas kampung; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam);
- 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke;
- 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama, Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di Kabupaten Fak-Fak, Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom, Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke;
- 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- 9) Peningkatan alokasi untuk percepatan pemberantasan buta aksara bagi penduduk usia produktif (15-59 tahun) di Provinsi Papua sejumlah 178.500 orang;
- 10) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 19,98 persen di Provinsi Papua, dan 16,05 persen di Provinsi Papua Barat;



- 8 -

- 11) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah utara Pulau Papua;
 - b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan
 - c. Peningkatan konservasi hutan.

1.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat kampung;
- 2) Optimalisasi SDM Unggul Orang Asli Papua dalam Badan Usaha Milik Negara dan kementerian/lembaga;
- 3) Penguatan lembaga adat dan kampung adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat;
- 4) Pemberdayaan masyarakat adat termasuk lembaga perempuan dan anak, percepatan pembangunan kawasan kampung,
- 5) Pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (*Papua Youth Creative Hub*);
- 6) Pemberdayaan dan pengembangan pengusaha lokal;
- 7) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran distrik/kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten dengan fokus Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Kaimana dan kabupaten lain yang siap;
- 9) Pengembangan wilayah adat (7 wilayah adat);
- 10) Revisi UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat;
- 11) Penguatan kerjasama antarkabupaten di masing-masing wilayah adat (7 wilayah adat);
- 12) Pembangunan istana kepresidenan di Kota Jayapura;
- 13) Penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di Tanah Papua;
- 14) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Papua (Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai,



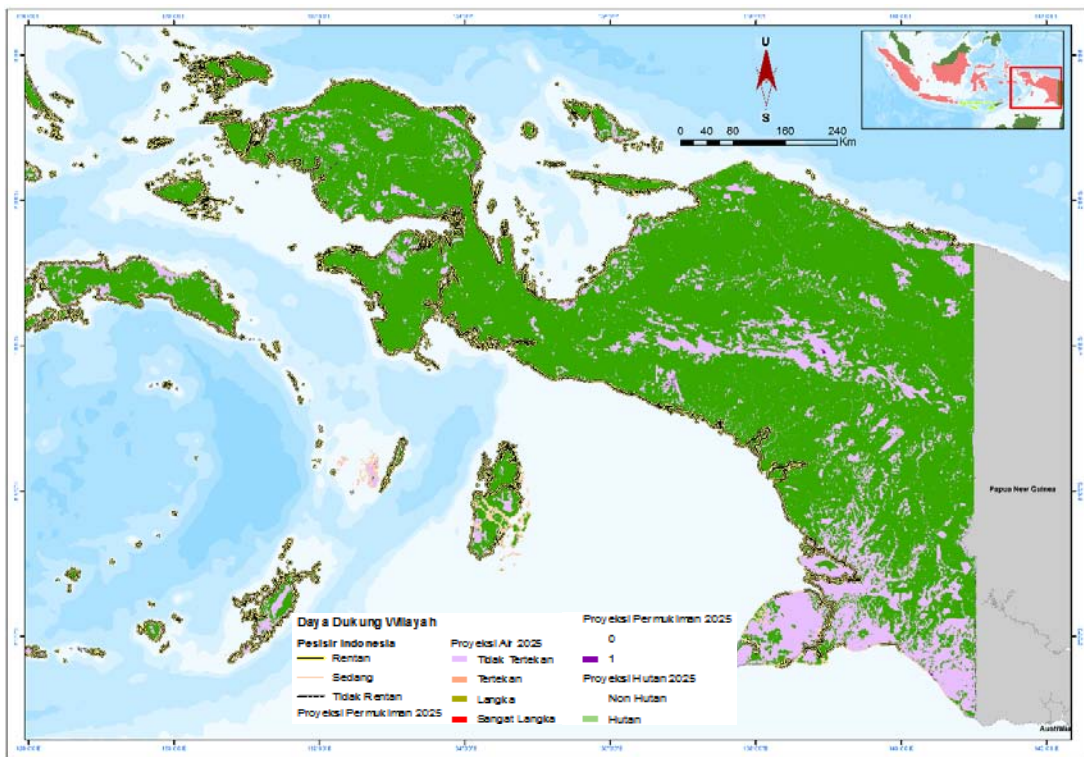
- 9 -

Kabupaten Paniai, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mappi, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke) dan Provinsi Papua Barat (Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni);

- 15) Penataan ruang dan lahan yang dilakukan melalui antara lain:
 - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
 - d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - i. Pembentukan bank tanah;
 - j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 16) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
- 17) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
 - a. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
 - b. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - c. Pengembangan energi baru terbarukan;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
 - e. Penegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan wisata;
 - g. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan

- h. Optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Gambar 1.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Papua Tahun 2025

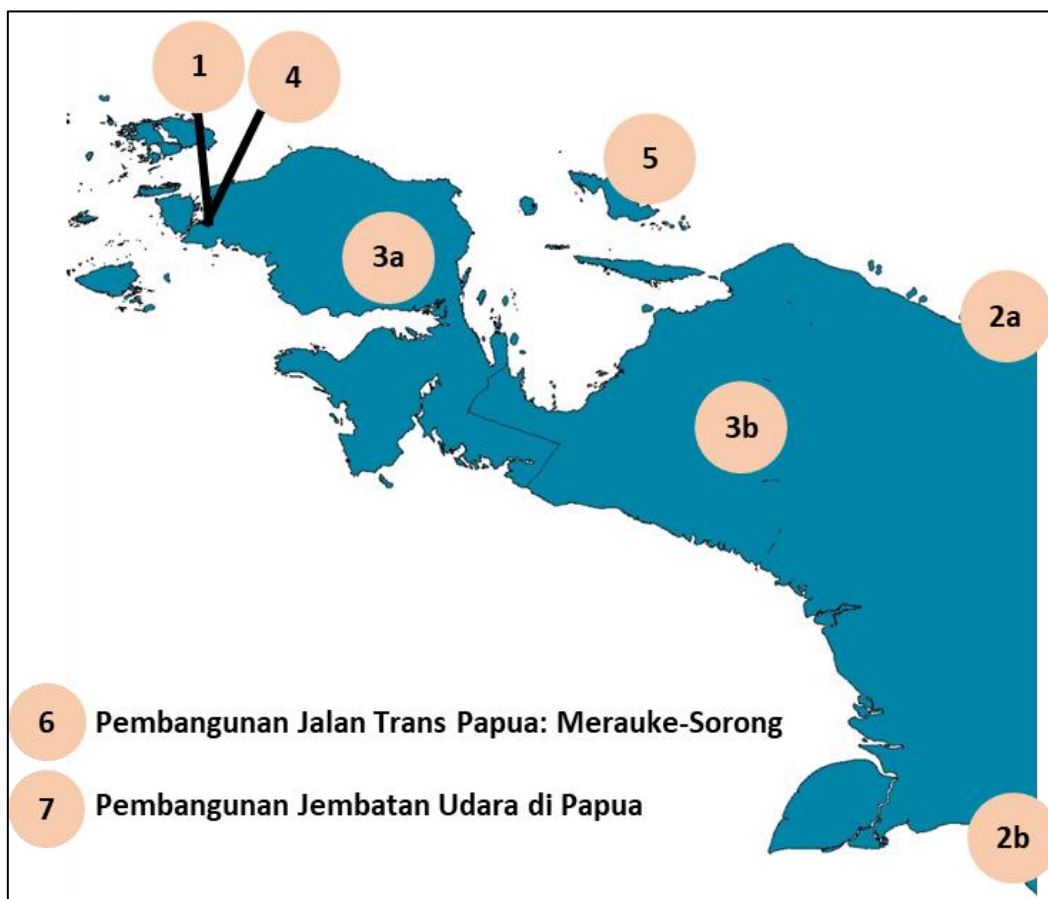


1.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Papua

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Kota Baru Sorong;
- 2) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Jayapura dan (b) PKSN Merauke;
- 3) Pengembangan Wilayah Adat Papua: (a) Domberay dan (b) Laa Pago;
- 4) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Sorong;
- 5) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: P. Biak;
- 6) Pembangunan Jalan Trans Papua: Merauke-Sorong; dan
- 7) Pembangunan Jembatan Udara di Papua.

Gambar 1.6.
**Peta Sebaran Rencana Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)
RPJMN 2020-2024 di Wilayah Papua**





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU PAPUA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PP 7: Pengembangan Wilayah Papua	Laju Pertumbuhan PDRB Papua	6,04	96.607,45			
	Share PDRB Wilayah Papua	1,96				
	IPM Wilayah Papua	63,94-67,24				
	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	19,02				
Provinsi Papua						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Pembangunan DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi	>1				
Jalan Trans Pulau Biak (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	16,61	1.054,36	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kab. Biak	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	210,46	16,48	Provinsi Papua, Kab. Kepulauan Yapen	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	514,35	32,36	Provinsi Papua, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Papua, a.l: Kab. Merauke, Kab. Biak Numfor	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kemen KP
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan Tembaga	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi Tembaga	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Papua		8.040,12			
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil				Kota Jayapura		
Pengembangan Bandara Sentani	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		400	Kota Jayapura (lingkup pelayanan), Provinsi Papua	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	423,50	748,75	Provinsi Papua	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		8,60	Kota Jayapura, Provinsi Papua	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		120,54	Kota Jayapura, Provinsi Papua	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	2449 desa berkembang; 30 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	19 (terentaskan 3 kabupaten)		Prov. Papua: Kab. Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Paniai, Puncak, Supiori, Yalimo, Nabire, Boven Digoel, Waropen, Mappi, Mamberamo Raya, Intan Jaya, Asmat, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Yahukimo, Nduga, Tolikara, Keerom		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,57				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	28,85				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	42,39	90,87	Kab. Keerom dan Kab. Merauke	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kemen Desa PDTT 2. Kemen ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Wilayah Adat Papua: Laa Pago	Peningkatan IPM di 10 Kabupaten: Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	51,40	17629,71	Wilayah adat La Pago (Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Jalan; 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 3. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; 4. Program Guru dan Tenaga Kependidikan; 5. Program Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 7. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan; 8. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 9. Program Penelitian dan Pengembangan; 10. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); 11. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; 12. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; 13. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 14. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; 15. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri; 16. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 17. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 18. Program Pengembangan Kepariwisata; 19. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 20. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda Provinsi Papua; 2. Kementerian PUPR; 3. Kementerian Perhubungan; 4. Kemenkominfo; 5. Kemendikbud; 6. Kemristek Dikti; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Kementerian Pertanian; 9. Kementerian KUKM; 10. Kementerian Perindustrian; 11. Kementerian Perdagangan; 12. Kementerian Desa PDTT; 13. Kementerian Pertanian; 14. Pemda Provinsi Papua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,64	Seluruh Kab./Kota di Papua	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42,07	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,72	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,65	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Guru SMK	Jumlah guru yang mendapatkan peningkatan Kompetensi (orang)	100		Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi satu atap berpola asrama	Jumlah unit sekolah baru SMP yang dibangun dan beroperasi (unit)	1	15,40	Kab. Nduga, Kab. Yalimo, Kab. Jayawijaya	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama SMA	Jumlah unit sekolah baru SMA yang dibangun dan beroperasi		16,50	Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Puncak	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang dibangun/direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung industri pertanian, pariwisata, dan kesehatan	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit)	1	40,90	Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Lanny Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yalimo, Kab. Nduga	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	35.700	149,80	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Siswa mendapatkan pendidikan layanan khusus (Beasiswa Adem) (siswa)	520	70	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua) (paket)	16	24	Tersebar	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	1.290	107,50	Tersebar	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan tanaman tanaman tahunan dan penyegar di Papua dan Papua Barat	Luas perkebunan kopi dan kakao yang difasilitasi (Ha)	133	2,15	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;	Kementerian Pertanian
Jumlah kawasan ubi jalar	Luas lahan ubi jalar yang difasilitasi (Ha*) *) target nasional	2.869	13,77	Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Tolikara	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (<i>start up capital</i>)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (<i>start up capital</i>) (orang)	24	1,84	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Pelatihan Vocational	Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang dilatih (orang)	100	1,75	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan <i>start up capital</i>	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	5	0,74	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran	Jumlah wirausahawan yang ditingkatkan dan mendapat bantuan pemasaran (PMKM)	195	10,04	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Lembah Baliem	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Jayawijaya		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	300.000	2.381,63	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	14	42,14	Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	47	209,93	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	10	10,60	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemendikominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang dibangun (unit)	50	92,30	Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM	Jumlah SPAM terbangun (unit)	14	392	Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani (KK)	9.600	736	Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Tolikara, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		282,36	Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Trans Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	39	3.155	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan di Jalan Trans Papua	Panjang jembatan jalan yang dibangun (m)	2.389	7.245,60	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Wamena	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	397,51	Kab. Jayawijaya	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Nop Goliath	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	525,84	Kab. Yahukimo	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Oksibil	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	290,25	Kab. Pegunungan Bintang,	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Elelim	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	397,51	Kab. Yalimo	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Ilaga	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	470,52	Kab. Puncak	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Tiom	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan	1 (selesai)	80	Kab. Lanny Jaya	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Mulia	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	120,54	Kab. Puncak Jaya	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		1	Kab. Tolikara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	3	26,40	Kab. Tolikara, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun / ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal	8	42,10	Kab. Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan pasarana air bersih dan sanitasi di daerah tertinggal	Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal (unit)	3	21,10	Kab. Puncak, Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	148	5,90	Kab. Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Jayawijaya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	60	15	Kab. Pegunungan Bintang,	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Wilayah Adat Papua : Mee Pago	Peningkatan IPM di 6 Kabupaten: Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya	60,90	4146,28	Wilayah Adat Mee Pago (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya)	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap2. Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika3. Program Pengembangan Daerah Tertinggal4. Program Penyelenggaraan Jalan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut6. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan7. Program Peningkatan produksi dan Nilai Tambah Hortikultura8. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan9. Program Pengembangan Kepariwisata10. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi11. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi13. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi14. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air16. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi17. Program Pengembangan Perumahan18. Program Guru dan Tenaga Kependidikan19. Program pendidikan dasar dan menengah20. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat21. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan22. Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian KP Kementerian Kominfo Kementerian Desa PDTT Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Kementerian Pertanian Kementerian KUKM Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata Kemen ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,30	Seluruh Kab./Kota di Papua	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,6	Seluruh Kab./Kota di Papua	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42,00	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16	Tersebar	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah satu atap terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMP yang dibangun dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Pengembangan sekolah menengah kejuruan mendukung sektor energi, transportasi, dan pariwisata	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit)	1	16,36	Tersebar		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	4.000	33,55	Tersebar	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa)	300	40,50	Tersebar	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	648	54,01	Tersebar	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kawasan kopi	Luas lahan kopi yang difasilitasi (Ha*) *) target nasional	11.750	32,36	Kab. Paniai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Pengeolahan Sagu Papua dan papua Barat	Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi (unit)	1	1,92	Kab. Mimika, Kab. Nabire	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten Mimika yang mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Mimika (tingkat kemandirian (skala 1-5))	5	29,57	Kab. Mimika	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital) (orang)	10	0,60	Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	9	1,32	Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Danau Paniai	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Paniai		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	100.000	952,65	Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	2	7,67	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Mimika	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	7	36,64	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Paniai	Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	6	8,80	Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Paniai	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah unit rumah khusus		10,26	Kab. Dogiyai	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat (unit)	2	56	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		106	Kab. Paniai, Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani (KK)	9.600	736	Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan Bandara Nabire Baru	Jumlah bandara baru yang dibangun		941,19	Kab. Nabire	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Mozes Kilangin	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	748,54	Kab. Mimika	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Nabire	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		39	Kab. Nabire	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Pomako	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	90	Kab. Mimika	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		1	Kab. Nabire	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	3	4,80	Kab. Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal (km)		10,15	Nabire, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	59	2,36	Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Nabire	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Wilayah Adat Papua : Saireri	Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori	69,70	2010,63	Wilayah Adat Saireri Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kepariwisata 2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal 3. Program Pengembangan Daerah Tertentu 4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 7. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 8. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 9. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 11. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 12. Program Pengembangan Perumahan 13. Program Guru dan Tenaga Kependidikan 14. Program pendidikan dasar dan menengah 15. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 18. Program Penelitian dan Pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Desa PDTT 3. Kementerian KP 4. Kementerian KUKM 5. Kementerian Perindustrian 6. Kementerian ESDM; 7. Kemenkominfo; 8. Kemen PUPR 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,30	Seluruh Kab./Kota di Papua	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,6	Seluruh Kab./Kota di Papua	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16	Tersebar	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama	Jumlah asrama SMA yang dibangun dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Pengembangan dan Pemanfaatan Rumah Belajar	Jumlah orang Yang Memanfaatkan Pengembangan dan Pemanfaatan Rumah Belajar			Tersebar	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan mendukung kemaritiman	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi		8,18	Kab. Biak Numfor	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	5.000	20,98	Tersebar	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa)	168	22,68	Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	648	54,01	Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Politeknik Perikanan	Jumlah Politeknik Yang Dibangun			Kab. Biak Numfor		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sentara Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak (tingkat kemandirian (skala 1-5))	5	25	Kab. Biak Numfor	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Bibit Rumput Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat	Bibit rumput laut yang didistribusikan			Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	6	0,88	Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori, Kab. Waropen	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori, Kab. Waropen		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	4.926	238,16	Kab. Supiori	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	1	6,08	Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah BTS terbangun (unit)	5	30,64	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah akses internet terpasang (unit)	4	6,46	Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah unit rumah khusus		10,26	Kab. Biak Numfor	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat (unit)	1	28	Kab. Kepulauan Yapen	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani		177,48	Kab. Biak Numfor	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		8,30	Kab. Supiori	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	15	0,59	Kab. Supiori	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Jumlah embung dan bangunan air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan (unit)	1	7,47	Kab. Supiori	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar		6,60	Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi)	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal (km)	2	12,00	Kab. Supiori	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan		3,33	Supiori	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi (KK)	23	5,67	Kab. Supiori	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Jalan Trans Yapen	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		75	Kab. Kepulauan Yapen	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Trans Pulau Biak	Panjang Jalan yang dibangun (km)	16,6	1.054,36	Kab. Biak Numfor	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Wilayah Adat Papua : Tabi	Peningkatan IPM di 5 Kabupaten/Kota: Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	69,6	1260,36	Wilayah Adat Tabi Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kota Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Daerah Tertinggal 2. Program Pengembangan Daerah Tertentu 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 4. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 5. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 6. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 7. Program Pengembangan Kepariwisata 8. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 9. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 10. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 12. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 13. Program Guru dan Tenaga Kependidikan 14. Program pendidikan dasar dan menengah 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 18. Program Penelitian dan Pengembangan 19. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 	Kementerian Desa PDPT Kemendagri Kementerian Pertanian Kementerian KUKM Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata Kementerian ESDM; Kemenkominfo; Kemen PUPR
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,32	Seluruh Kab./Kota di Papua	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,6	Seluruh Kab./Kota di Papua	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42,07	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,65	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32,00	Seluruh Kab./Kota di Papua	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Pembangunan Sekolah Satu Atap terintegrasi Berpolo Asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	Program pendidikan dasar dan menengah	Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung industri pertanian dan kemaritiman	Jumlah sekolah yang bekerjasama dengan industri dan pendidikan dual sistem (unit)	1	0,18	Tersebar	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung industri penerbangan	Jumlah paket bantuan peralatan pendidikan	DAK	DAK	Kab. Jayapura	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung industri penerbangan	Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi (unit)	50	0,10	Kab. Jayapura	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit)	1	40,90	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	5.000	20,98	Tersebar	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa)	132	17,82	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	300	24,8	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang)	50		Papua dan Papua Barat	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah program studi penyelenggara Recognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Cenderawasih (prodi)	5	1,00	Kota Jayapura	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	Luas lahan kakao dan kelapa yang difasilitasi (Ha)	200	8,88	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Area Tanaman Sagu	Luas area tanaman sagu (Ha*)) target nasional	404	5,43	Kab. Jayapura	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital) (orang)	15	0,90	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	8	1,20	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Danau Sentani	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Jayapura		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik		476,33	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	1	5,31	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	3	21,64	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 29

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	4	6,46	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Keerom	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat (unit)	3	84,00	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		7,06	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani (KK)	6.881	263,77	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Sarmi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Depapre	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	50,00	Kab. Jayapura	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh
Pengadaan moda transportasi darat	Jumlah moda darat (unit)	10		Kab. Keerom		Pemda Provinsi Papua
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)	5	2,00	Kab. Keerom	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	1	3,60	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan dan fungsional di daerah tertinggal		2,30	Kab. Mamberamo Raya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	30	1,18	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Jumlah embung dan bangunan air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal rawan pangan	1	4,80	Kab. Keerom	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		12,00	Kab. Keerom	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan		5,01	Kab. Keerom	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi (KK)	23	5,67	Kab. Keerom	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Wilayah Adat Papua : Anim Ha	Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	62,9	1887,20	Wilayah adat Anim Ha (Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 3. Program Pembangunan Daerah Tertentu; 4. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 5. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 6. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; 8. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; 10. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 11. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; 12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda Provinsi Papua; 2. Kementerian ESDM; 3. Kementerian Desa PDTT; 4. Kemenhub 5. Kementerian PUPR 6. Kementerian Pertanian 7. Kementerian KP 8. Kementerian KUKM 9. Kementerian Perindustrian 10. Kemenkominfo
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	96	14,30	Seluruh Kab./Kota di Papua	13. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	30	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	14. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,6	Seluruh Kab./Kota di Papua	15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua	16. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42	Seluruh Kab./Kota di Papua	17. Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua	18. Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,80	Seluruh Kab./Kota di Papua	19. Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32,00	Seluruh Kab./Kota di Papua	20. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	21. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	22. Program Penelitian dan Pengembangan 23. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua) (paket)	4	9,60	Tersebar	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16,00	Tersebar	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan beroperasi	DAK	DAK	Tersebar		Pemerintah Daerah
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit)	1	16,36	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan keaksaraan (orang)	9.400	39,43	Tersebar	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa)	208	28,00	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK			Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang)	50		Papua dan Papua Barat	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah program studi penyelenggara Recognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Musamus (prodi)	4	1,00	Kab. Merauke	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kawasan Padi	Luas kawasan padi (Ha*) *) target nasional	791.000	131,26	Kab. Merauke	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Alat dan Mesin Pertanian Prapanen	Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen (unit)	67	8,38	Kab. Merauke	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi (unit)	1	1,92	Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	6	0,88	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	69.242	238,16	Kab. Mappi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah BTS terbangun (unit)	10	47,64	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah akses internet terpasang (unit)	4	9,70	Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan sumur bor *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah titik sumur bor (unit)	1	6,08	Kab. Asmat, Kab. Merauke	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		82,99	Kab. Asmat*, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah sambungan rumah terlayani (KK)	9.600	736,00	Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penanganan jalan dan jembatan di Kab. Asmat	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (km)	12	164,50	Kab. Asmat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	85,00	Kab. Mappi	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Moor	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		22,50	Kab. Mappi	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)	500	2,00	Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		2,40	Kab. Boven Digoel, Mappi	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan di daerah tertinggal		5,59	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	30	1,18	Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 36

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan embung dan bangunan air lainnya di daerah tertinggal rawan pangan	Jumlah embung dan bangunan air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan		2,60	Kab. Boven Digoel	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal (km)	2	12,00	Kab. Boven Digoel	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan (KK)	50	3,35	Kab. Boven Digoel	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi (KK)	22	5,44	Kab. Boven Digoel	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Papua (kecamatan)	36	60,11	Kec. Merauke, Kec. Kimaam, Kec. Semangga, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 37

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 38

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 39

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	36		Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	18	2,592	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: PPKT Provinsi Papua (Kab. Supiori, Kab. Merauke)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		4,22	Kab. Supiori dan Kab. Merauke	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	5	0,5	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		52,8	Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec. Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarannya (pulau)	4	7,5	Pulau Bepondi	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura	0,45	831,00	Kota Jayapura		
Pengembangan terminal Skouw	Jumlah terminal barang yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		23,75	Papua	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Sentani	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		400	Papua	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan, BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 41

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Jalan Perbatasan Papua	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	200	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Anjungan Cerdas Perbatasan Skouw	Jumlah anjungan cerdas Skouw yang dibangun	1	135	Kota Jayapura	KPBU	KPBU
Sistem Pengelolaan Drainase	Luas (hektar) yang difasilitasi sistem pengelolaan drainase		5,8	Kota Jayapura	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kota Jayapura	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kota Jayapura	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kota Jayapura	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,1	Kota Jayapura	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang difasilitasi (unit)	10	1	Kota Jayapura	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Penataan Perkampungan tradisional sebagai pendukung "Wisata Perbatasan"	Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III		3	Kota Jayapura	Program Pengembangan Kepariwisata	Kementerian Pariwisata
Pembangunan Home Stay kampung Terapung Perbatasan	Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	1	4	Kota Jayapura	Program Pengembangan Kepariwisata	Kementerian Pariwisata
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kota Jayapura	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 42

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelatihan Vokasional	Jumlah peserta (orang) pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya		1	Kota Jayapura	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Sekolah SMP yang dibangun	1	7	Kota Jayapura	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke	0,59	637,44	Kab. Merauke		
Pembangunan Jembatan Kali Bian	Jembatan yang dibangun (lokasi)		180	Papua	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Merauke	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)		45	Papua	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Mopah	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)		48,1	Papua	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1		Kab. Merauke	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Kementerian Perindustrian
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	1	4,8	Kab. Merauke	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah User aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	500	0,16	Kab. Merauke	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	250	0,2	Kab. Merauke	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Merauke	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 43

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke	5	11,03	Kab. Merauke	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian KKP
Koperasi/UKM sektor perikanan dan peternakan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya		1,8	Kab. Merauke	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kab. Merauke	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Merauke	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kab. Merauke	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,1	Kab. Merauke	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	3,35	Kab. Merauke	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah	0,67	2964,03	Kab. Boven Digoel		
'Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Magellum	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	31,07	Papua	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
'Pembangunan Jembatan Udara di Bandara Tanah Merah	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	1179,60	Papua	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Penyusunan Materi Teknis RDTR PLBN Yeyetkeun Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Materi Teknis dan Raperpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara		2,10	Kab. Boven Digoel	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 44

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	1	0,1	Kab. Boven Digoel	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	1	0,34	Kab. Boven Digoel	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	39,30	1.160,03	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kemendesa PDTT 2. Kemendagri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		15,45	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 45

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,21	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,27	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 46

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		38,55	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	1.790	499,87	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4 k	0,62	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 47

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	0,66	Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	226	593,76	Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo, Sarmi, Kepulauan Yapen, Nabire, Jayapura, Keerom, Dogiyai	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	22	3,33	Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Dogiyai, Intan Jaya, Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Keerom, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Supriori, Yahukimo, Yalimo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 48

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kota Jayapura dan Merauke	55.00; 40.00	88,44	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan <i>Sustainable Tourism Practices</i> (destinasi)	1	3,00	Kota Jayapura	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,40	Kab. Merauke	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1,00	Kab. Merauke	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80,00	Kota Jayapura dan Kab. Merauke	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1.211.375	1.577,2	Papua	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sengi, Salor, dan Muting	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua	42,39	90,87	Kab. Keerom dan Kab. Merauke	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 49

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1 SP	53,40	Kab. Keerom dan Kab. Merauke	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	33,38	Kab. Keerom dan Kab. Merauke	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	2	3,97	Kab. Keerom dan Kab. Merauke	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,12	Kab. Merauke	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)		0,00	Kab. Merauke	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	2,66				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	44				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	44				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	1.370				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	2				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 50

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	44				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Papua	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	562				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar skala besar			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	30	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 51

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	30	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	1	9,47			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 52

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	7,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (100%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	30	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	30	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	30	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	30	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	30	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 53

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	30	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	2,27			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	30	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,60	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	30	0,75			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 54

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	29	0,46	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	30	1,75	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	30	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	30	0,34			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	30	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	30	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	30	0,34			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 55

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	30	0,45	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	13,32	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 56

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,167	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara (Perdasi)	2	1.300			
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus/Istimewa	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus/Istimewa	1	7,93	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa		2,10	Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Regulasi daerah otonom khusus/ istimewa	Jumlah regulasi pelaksanaan kekhususan/keistimewaan daerah					
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	1.211.375	1.577,24	Papua	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	1.369.100	115,64	Papua	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	32,10	Papua	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 57

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Papua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	14	Papua (Kab. Dogiyai, Intanjaya, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Mappi, Nduga, Asmat)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,93	Papua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	5	1,96	Papua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan		6,73	Yetetkun, Hamadi, Merauke (Papua)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,74	Papua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 58

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Provinsi Papua Barat						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Sorong	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi	>1				
Jalan Akses KEK Sorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	6,8	444,11	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Sorong	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)	1 (selesai)	30.000	Papua Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	5,95	Prov. Papua Barat	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Sorong	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kab. Sorong	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Bintuni	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi	>1				
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5,5	250	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Bintuni	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		45	Papua Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 59

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Bandara Babo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		38,12	Papua Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Teluk Bintuni	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Teluk Bintuni	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Perbaiki aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Raja Ampat dan Sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi	>1				
Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat	Jumlah bandara perairan yang dibangun (lokasi)		30	Papua Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Raja Ampat dan Sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Raja Ampat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	2.822,01	61,05	Provinsi Papua Barat, Kab. Fakfak, Kab. Kaimana	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 60

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	248,33	5,23	Provinsi Papua Barat, Kab. Manokwari Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,1		Provinsi Papua Barat, a.l: Kab. Sorong, Kab. Fakfak	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Papua		8.040,12			
ProP : Pembangunan Kota Baru Sorong				Kota Baru Sorong/Kota Sorong		
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Sorong	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)	1 (selesai)	30.000	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		180	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Jembatan Udara	Kementerian Perhubungan
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Provinsi Papua Barat	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 61

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	109	70,30	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		0,80	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		5,60	Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	2449 desa berkembang; 30 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	7 (terentaskan 1 kabupaten)		Prov. Papua Barat: Kab. Maybrat, Sorong, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	32,38				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	35,61	59,52	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 62

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Wilayah Adat Papua : Domberay	Peningkatan IPM di 11 Kabupaten/Kota: Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong	65,20	9.716,86	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Jalan; 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 3. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; 4. Program Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Program Guru dan Tenaga Kependidikan; 6. Program Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Program Pembelajaran Kemahasiswaan; 8. Program penelitian dan Pengembangan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); 9. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; 10. Program Pengembangan Kepariwisata; 11. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; 12. Program Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Hortikultura; 13. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 14. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 15. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; 16. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri; 17. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 18. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 19. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi; 20. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 21. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PUPR; 2. Kementerian Perhubungan; 3. Kemenkominfo; 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Perdagangan; 8. Kementerian Pariwisata; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian KUKM; 9. Kementerian Perindustrian; 10. Kementerian Perdagangan; 11. Kementerian Desa PDTT; 12. Kementerian ESDM; 12. Pemda Provinsi Papua Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 63

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	104	14,32	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	10	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,64	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,72	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,65	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 64

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785	0,0	11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 65

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama satu atap	Jumlah unit sekolah baru SMP yang dibangun dan beroperasi		3,70	Kab. Tambrauw	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama satu atap	Jumlah ruang kelas SMP dibangun	DAK	DAK	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi berpola asrama satu atap	Jumlah ruang kelas SMA dibangun	DAK	DAK	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Pemerintah Daerah
Penerapan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah asrama SMA yang dibangun	DAK	DAK	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Pemerintah Daerah
Penyediaan Guru Daerah Khusus	Jumlah guru dalam layanan khusus (orang)	64	16	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Mendukung industri kreatif, pariwisata, energi, dan pertanian (sagu, kakao)	Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (sekolah)	1	40,90	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ruang Praktik Siswa/Keterampilan yang dibangun	Jumlah ruang praktik siswa/keterampilan yang dibangun	DAK	DAK	Tersebar	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemerintah Daerah
Pembangunan unit Sekolah Baru SMK Pariwisata	Jumlah unit sekolah baru SMK dibangun		8,90	Kab. Teluk Wondama	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 66

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Siswa penerima program pendidikan layanan khusus (Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM))	Jumlah penerima beasiswa ADEM (orang)	504	68	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua) (paket)	16	24	Tersebar	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	300	24,82	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Jumlah program studi penyelenggara Recognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Papua (prodi)	4	1	Kab. Manokwari, Kota Sorong	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti Sertifikasi Dosen	Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang)	50		Papua dan Papua Barat	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (unit)	1	9,50	Kab. Manokwari, Kota Sorong, Kab. Sorong Selatan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kawasan Kakao	Luas lahan perkebunan kakao yang difasilitasi (Ha*) *) target nasional	11.750	19,54	Kab. Manokwari Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Fasilitas penerapan budidaya kacang tanah	Luas lahan kacang tanah yang difasilitasi (Ha)	300	4,02	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 67

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan sayuran lainnya	Luas lahan perkebunan sayur yang difasilitasi (Ha)	350	30,95	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Kawasan Tanaman Obat di Papua dan Papua Barat	Luas kawasan tanaman obat yang difasilitasi (Ha)	310	3	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Hijauan pakan ternak	Luas lahan hijauan pakan ternak yang difasilitasi (Ha)	100	8,72	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat	Jumlah unit pengolahan sagu (unit)	1	1,92	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital) (orang)	26	2,00	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Manokwari Selatan	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 68

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelatihan Vocational	Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang dilatih (orang)	100	1,75	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Manokwari Selatan	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	2	0,30	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Manokwari Selatan	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi DPP Baru Raja Ampat	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Raja Ampat		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata Danau Anggi	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Pegunungan Arfak		Pemerintah Daerah
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya Pasar Rakyat		50,40	Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran	Jumlah wirausahawan yang ditingkatkan dan mendapat bantuan pemasaran (PMKM)	214	13,80	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrau, Kab. Manokwari Selatan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 69

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	21.641	952,65	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	10	33,93	Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	20	112	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	20	20,76	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah rumah khusus yang dibangun		41,02	Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Raja Ampat, Kab. Pegunungan Arfak	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM	Jumlah SPAM terbangun (unit)	10	288,50	Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah terlayani		203,17	Kab. Tambrauw, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 70

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir terbangun (unit)	5	140,63	Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Sorong, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		53,93	Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandar Udara Rendani	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	250	Kab. Manokwari	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Babo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan		38,12	Kab. Teluk Bintuni	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan		180	Kab. Sorong	Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Jembatan Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Marinda (Waisai)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan		0,77	Kab. Raja Ampat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandar Udara Wasior Baru	Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	600	Kab. Teluk Wondama	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandar Udara Manokwari Selatan	Jumlah bandara baru yang dibangun		600	Kab. Manokwari Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Bandara Anggi	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	250	Kab. Pegunungan Arfak	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan jalan Trans Papua Barat	Panjang jalan yang dibangun (km)	50,54	2.768,61	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan di Jalan Trans Papua Barat	Panjang Jembatan yang dibangun (m)	887,40	2.206,50	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penanganan jalan lingkaran Danau Anggi Giji dan Anggi Gida	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		60	Kab. Pegunungan Arfak	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Bintuni - Susumuk	Panjang Jalan yang dibangun (km)	5,50	250	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 71

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Literasi digital pemasaran produk unggulan daerah tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)	5	7	Kab. Sorong, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Tambrauw	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan di daerah tertinggal (km)	1,73	5,76	Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Sorong	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	1	9,60	Kab. Sorong, Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Tambrauw	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di daerah tertinggal	Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang dibangun dan fungsional di daerah tertinggal (unit)	1	6,40	Kab. Teluk Wondama, Maybrat, Tambrauw, Pegunungan Arfak	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	118	4,72	Kab. Sorong, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Tambrauw	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan (unit)	4	48	Kab. Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Wondama, Maybrat, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood) (orang)	392	9,88	Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar (unit)	1	6,60	Kab. Teluk Wondama	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Jumlah Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik (orang)	78	2,08	Kab. Sorong	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 72

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Wilayah Adat Papua : Bomberay	Peningkatan IPM di 2 Kabupaten: Kab. Fakfak, Kab. Kaimana	68,90	3.195,48	Wilayah Adat Bomberay: Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 3. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Program Pengembangan Kepariwisata 7. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 8. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 9. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 10. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 11. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 12. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 13. Program Aksesibilitas 14. Telekomunikasi dan Informasi 15. Program Guru dan Tenaga Kependidikan 16. Program pendidikan dasar dan menengah 17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 18. Program Penelitian dan Pengembangan 	<p>Kementerian PUPR Kemenhub Kementerian Pertanian Kementerian KP Kementerian Pariwisata Kementerian KUKM Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM; Kemenkominfo;</p>
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim dan individu di Papua dan Papua Barat (orang)	104	14,30	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang di dayagunakan di wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	10	6,80	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 73

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat (%)	95	40,60	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi Malaria Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten)	17	62,90	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di Papua dan Papua Barat	Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan intervensi eliminasi filariasis (kabupaten)	14	42	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV di Papua dan Papua Barat (%)	95	22,70	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di Papua dan Papua Barat	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) di Papua dan Papua Barat (%)	90	11,80	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus kusta di Papua dan Papua Barat	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu di Papua dan Papua Barat (%)	72	32	Seluruh Kab./Kota di Papua Barat	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	10.000.000		514 Kab/Kota; 34 Provinsi	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 74

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	4.847.877		11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara, Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Program Sembako (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	5.513.785		11 Provinsi; 181 Kab/Kota	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 75

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (keluarga)	70		Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)	100		34 Provinsi	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama	Jumlah unit sekolah baru SMA yang dibangun dan beroperasi		6,30	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis pariwisata	Jumlah unit sekolah SMK yang direvitalisasi (sekolah)	1	8,18	Tersebar	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi Mahasiswa untuk menempuh pendidikan menengah (ADEM)	Jumlah penerima beasiswa ADEM (orang)	96	15	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Program pendidikan dasar dan menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang)	260	21,67	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Luas lahan lada, pala, dan cengkeh yang difasilitasi (Ha*) *) target nasional	32.030	61,05	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Bibit Rumput Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat	Jumlah bibit rumput laut yang didistribusikan (kg)	800	0,12	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Jumlah wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital) (orang)	10	0,60	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, bantuan start up capital	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)	3	0,44	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 76

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi	DAK	DAK	Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana		Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana pendukung dan promosi Teluk Triton	Prasarana dan sarana pendukung dan promosi pariwisata yang dibangun	DAK	DAK	Kab. Kaimana		Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik	Jumlah penduduk teraliri listrik (orang)	14.487	238,16	Kab. Kaimana	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor	Jumlah titik sumur bor (unit)	2	6,02	Kab. Kaimana	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE	Jumlah BTS terbangun (unit)	2	26,50	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Layanan Akses Internet	Jumlah akses internet terpasang (unit)	2	5,44	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat (unit)	1	28	Kab. Kaimana	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit SPAL Domestik (unit)	6.854	131	Kab. Fak-Fak	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Fakfak (SP. Moyana - Windesi)	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		120	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan SP.3 Moyana - Tiwara - Bofuer	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		135	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma	Panjang Jalan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya		120	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Inari	Panjang Jembatan yang dibangun		900	Papua Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Bandar Udara Siboru	Jumlah bandara baru yang dibangun		1.138,53	Kab. Fak-Fak	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Papua Barat (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 77

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	3		Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	0,29	Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		6,60	Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	1	0,10	Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	44,14	588,79	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, DPP Baru Raja Ampat	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kemendesa PDTT 2. Kemendagri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	9,80	DPP Baru Raja Ampat	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 78

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	0	9,99	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)	0	0,27	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	11	4,28	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,27	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 79

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	0	24,02	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	621	173,34	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	0,66	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	168	361,75	Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Fak Fak, Kaimana, Maybrat	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 80

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	5	0,76	Sorong Selatan, Tambrau, Kota Sorong, Manokwari, Pegunungan Arfak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Raja Ampat dan Manokwari	NA; 26.00	87,79	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan <i>Sustainable Tourism Practices</i> (destinasi)	1	3	Kab. Raja Ampat	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	4	1	Kab. Manokwari	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Manokwari	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)	0	0,36	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	92.685	1.099,15	Papua Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 81

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	35,6	59,52	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas		29,30	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	1.373	0,81	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	24,66	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,09	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,63	Kab. Fak-Fak	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	1.373	1,04	Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Fak-Fak	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	2,66				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	44				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	44				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 82

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	1.369,74				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	2				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	44				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Papua Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	808				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar skala besar			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 83

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	24	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	1	9,47			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 84

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	7,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	14	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 85

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 86

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	14	0,53			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	13	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	14	0,79	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	14	0,16			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 87

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	14	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	14	0,16			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	12,87	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 88

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	1,4	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara (Perdasi)	2	10.036			
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	1	7,93	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus		2,1	Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Revisi UU 21 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua	Terfasilitasi dan tersusunnya perubahan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.		1	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua - 89

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	92.685	1.099,15	Papua Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	77.198	8,43	Papua Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	32,10	Papua Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Papua Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR		6,00	Papua Barat (Kab. Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,93	Papua Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	5	1,96	Papua Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

2. PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU

2.1. Target Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Maluku diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sejalan dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Target Pembangunan Wilayah Maluku 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Maluku	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,95	5,70	6,00	7,00	7,20	7,90	8,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	18,12	17,69	17,02	16,24	15,85	14,95	12,90
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,27	7,08	6,90	6,70	6,50	6,10	5,80
Maluku Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,92	5,80	6,10	6,80	6,90	7,80	8,30
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,64	6,77	6,00	5,40	4,89	4,04	3,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,77	4,97	4,20	4,00	3,90	3,40	3,10

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.

Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Maluku, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Maluku 2020-2024

Provinsi	Kebutuhan Investasi	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Maluku	Rp triliun	12,44	13,14	14,37	16,32	17,80	19,54	22,20
Maluku Utara	Rp triliun	11,21	10,60	13,32	14,72	16,44	18,51	21,53

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

2.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku

Pembangunan wilayah Maluku akan dilakukan pada kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Maluku 2020-2024

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Maluku	1	Kota Ambon*	Maluku Utara	1	Kota Ternate*
				2	Kota Tidore Kepulauan
				3	Kabupaten Halmahera Tengah
				4	Kabupaten Halmahera Selatan
Koridor Pemerataan					
Maluku	1	Kabupaten Maluku Tengah	Maluku Utara	1	Kabupaten Pulau Morotai
	2	Kabupaten Buru		2	Kabupaten Halmahera Utara
	3	Kabupaten Buru Selatan		3	Kabupaten Halmahera Barat
	4	Kabupaten Maluku Tenggara		4	Kabupaten Kep. Sula
	5	Kota Tual*			
	6	Kabupaten Kep. Aru			
	7	Kabupaten Maluku Tenggara Barat			
	8	Kabupaten Maluku Barat Daya			

Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut.

2.2.1. Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

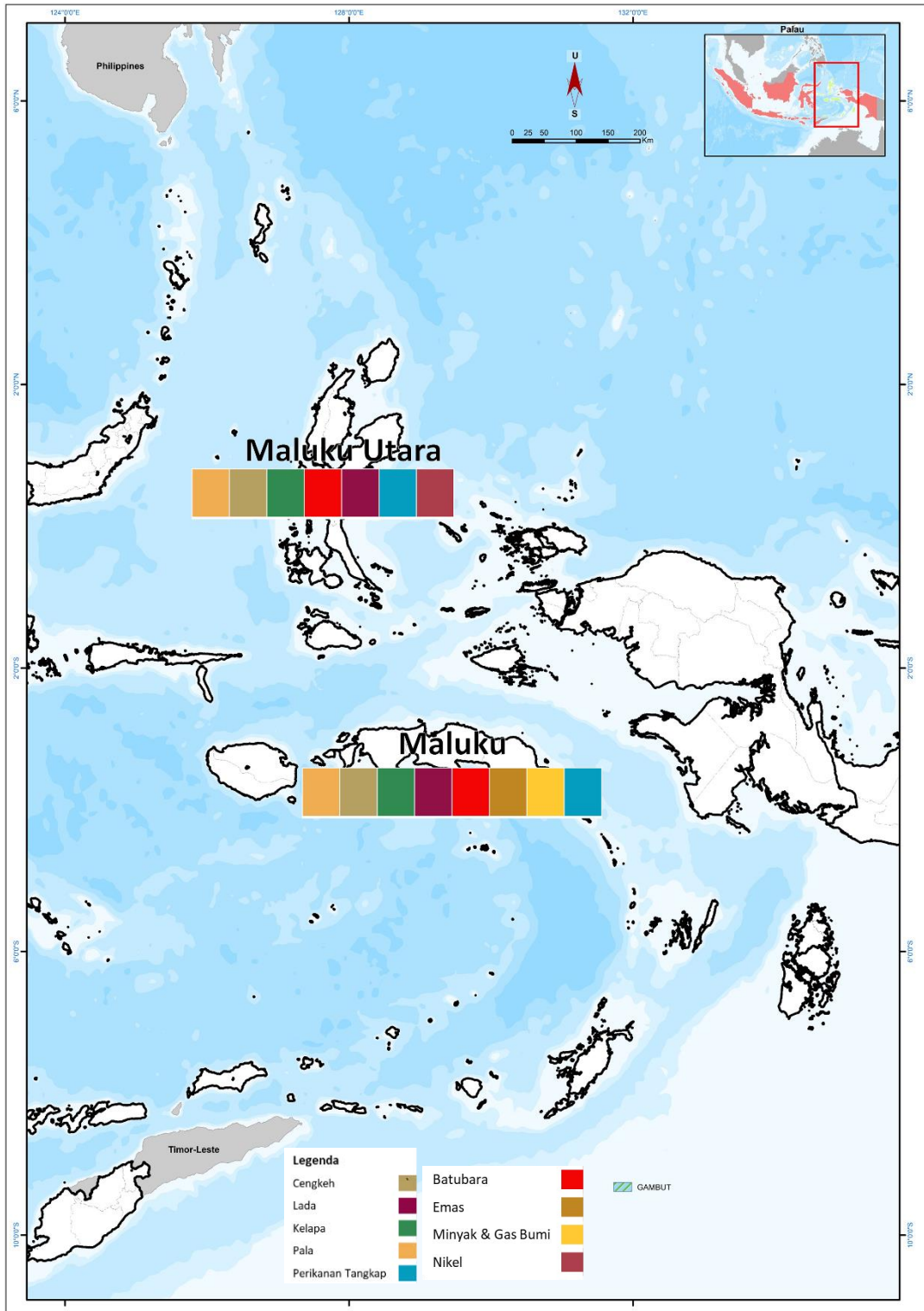
- 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, emas, batubara, minyak dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi, dengan fokus komoditas yaitu:
 - a. Provinsi Maluku: pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, emas, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya; dan
 - b. Provinsi Maluku Utara: pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan tangkap dan budidaya, dan nikel.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Gambar 2.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Maluku





- 4 -

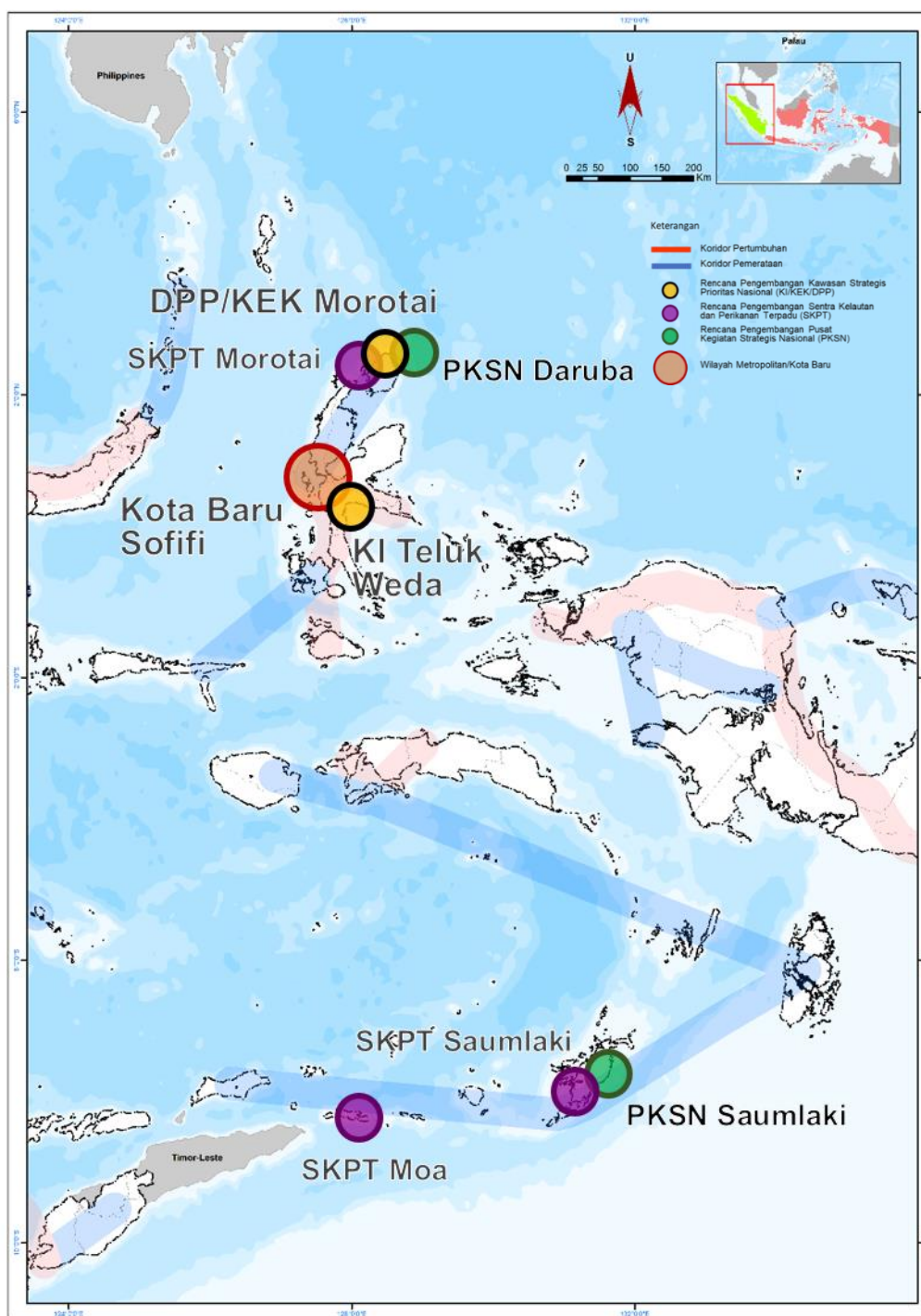
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- 3) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT Saumlaki; WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda); dan WPP 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).

2.2.2. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
- 2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai;
- 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau Morotai, Jalan Lingkar/Trans Seram, Jalan Lingkar/Trans Pulau Kei Besar, Jalan Lingkar/Trans Pulau Buru, Jalan Lingkar/Trans Moa, dan Jalan Lingkar/Trans Pulau Wetar, Pelabuhan Ambon, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda; dan
- 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.
 - a. Pengembangan 52 SMK di wilayah Maluku secara keseluruhan berjumlah 52 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, dan teknologi dan rekayasa.
 - b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 5 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (manufaktur listrik dan mesin di Maluku), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
 - c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 6 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani subsisten, buruh konstruksi gedung, serta manajer umum perdagangan.
 - d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Maluku.

Gambar 2.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Maluku

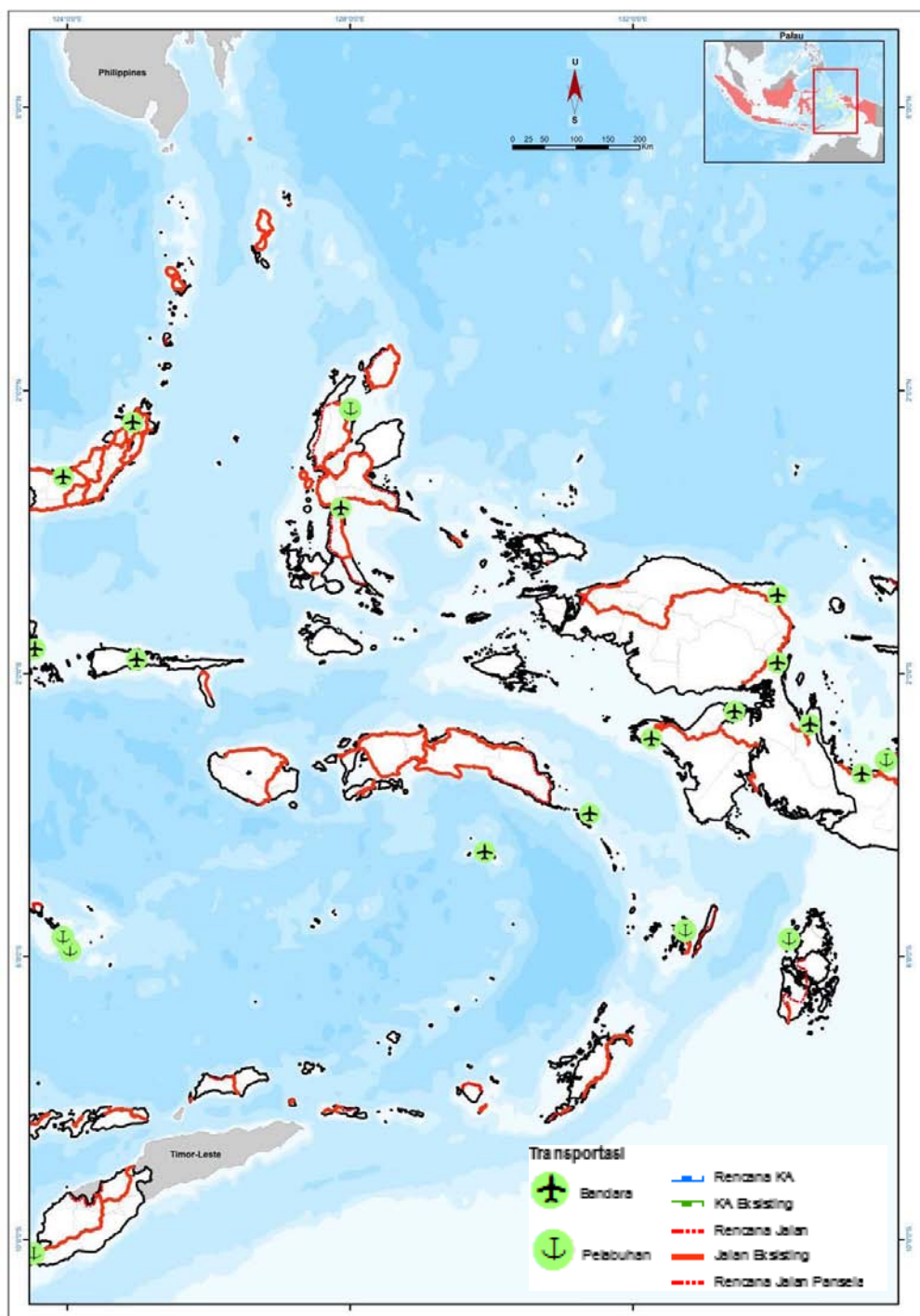




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Gambar 2.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Maluku 2024

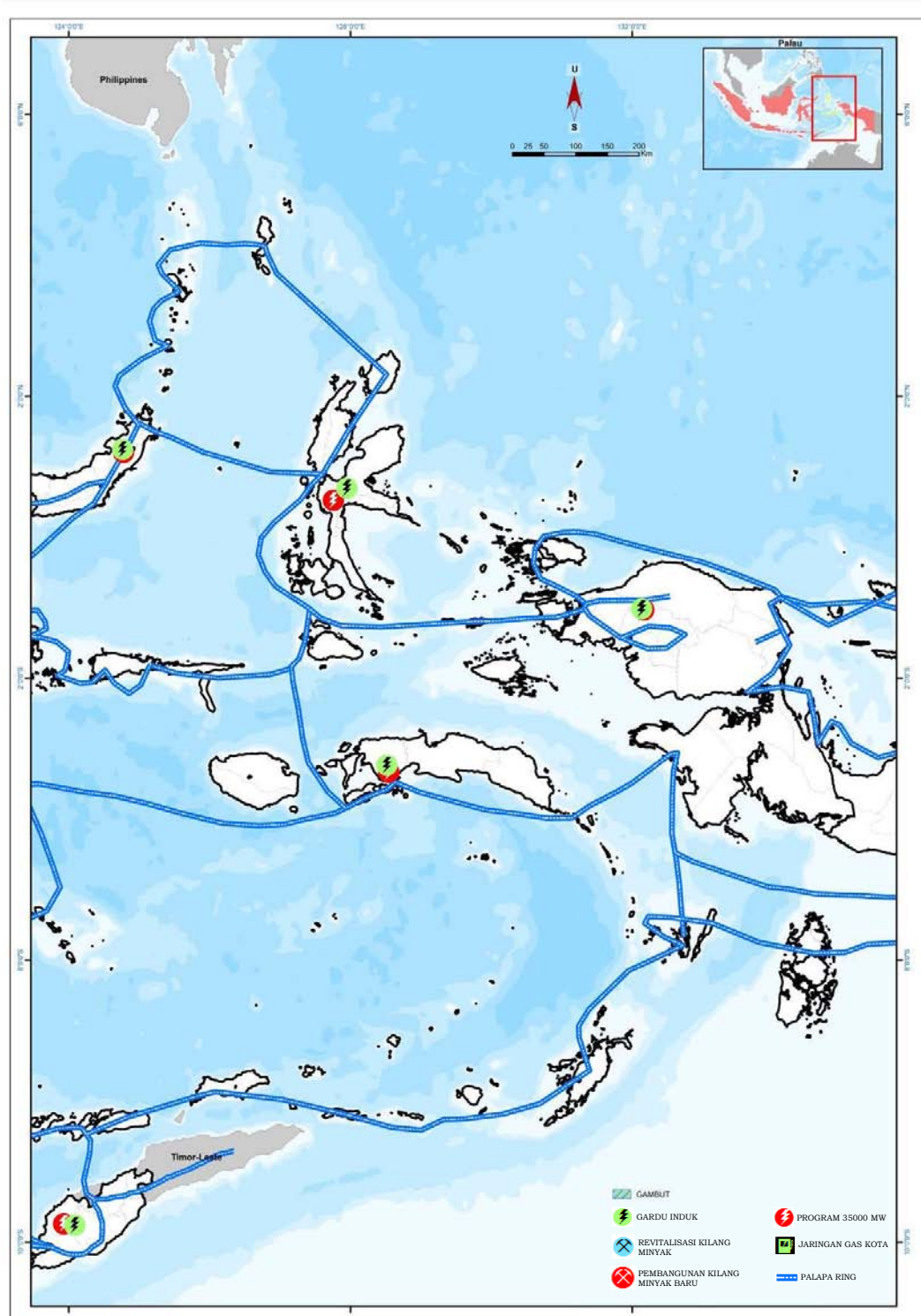




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Gambar 2.4.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi Wilayah Maluku 2024





- 8 -

2.2.3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate dan pembangunan Kota Baru Sofifi (Tabel 2.3); dan
- 2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

2.2.4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital di 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku dan 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara. Dari 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku, terdapat 4 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat. Sementara itu, untuk Provinsi Maluku Utara, kabupaten tertinggal yang termasuk dalam koridor kewilayahan adalah Kepulauan Sula yang berada pada koridor pemerataan;
- 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Maluku berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Buru dan Maluku Tengah di Provinsi Maluku; serta Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara;
- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 28 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku dan 6 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku Utara;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Saumlaki dan PKSN Daruba;
- 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi



- 9 -

dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Maluku Tengah dan KPPN Morotai;

- 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai;
- 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 6 kabupaten di Provinsi Maluku dan 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Maluku pada tahun 2023; dan
- 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024, yaitu 15,19 persen di Maluku dan 4,38 persen di Provinsi Maluku Utara; dan
- 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Maluku dan sekitarnya;
 - b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan
 - c. Peningkatan konservasi hutan.

2.2.5. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah;
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas meliputi Provinsi Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku

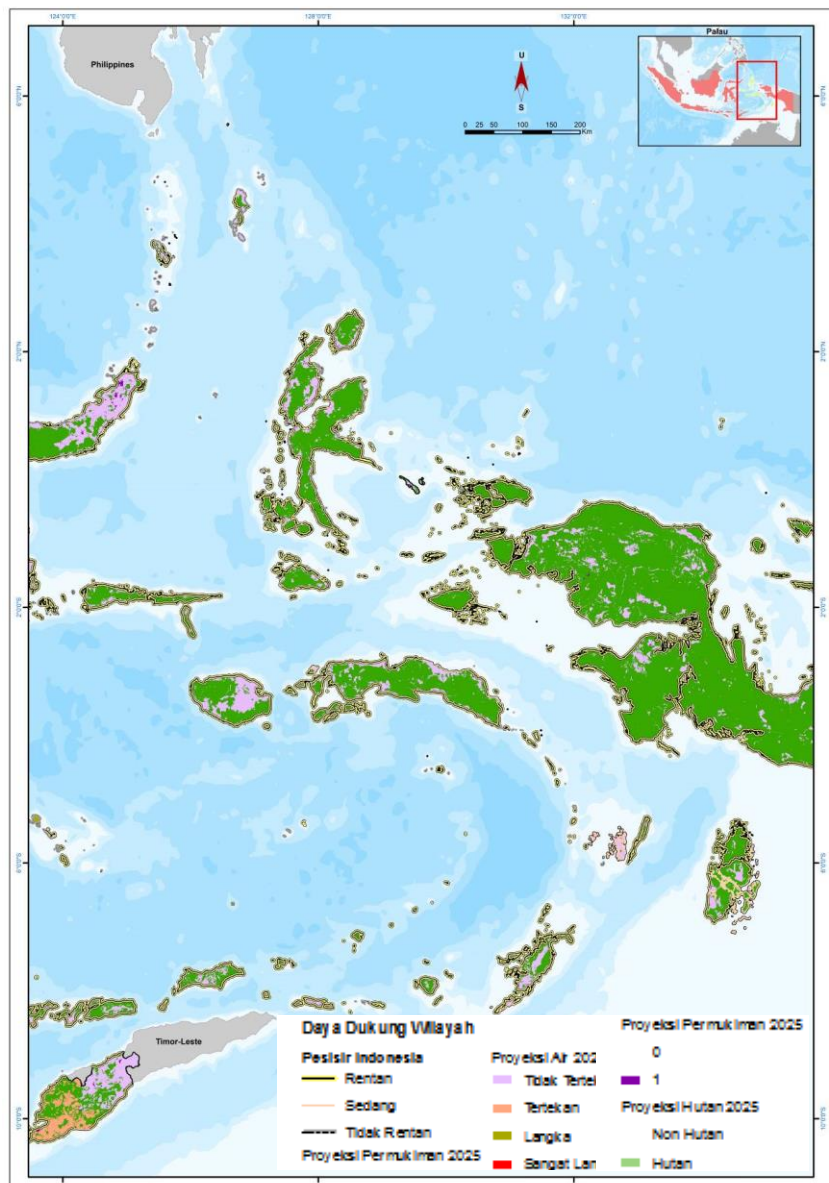


- 10 -

- Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Buru Selatan) dan Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Mortai, dan Kabupaten Pulau Taliabu);
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Provinsi Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual) dan Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu);
- 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
- a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - h. Pembentukan bank tanah;
 - i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
- 15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
- a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
 - b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
 - c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
 - d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;

- f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
- g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
- j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
- k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Gambar 2.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Maluku 2024

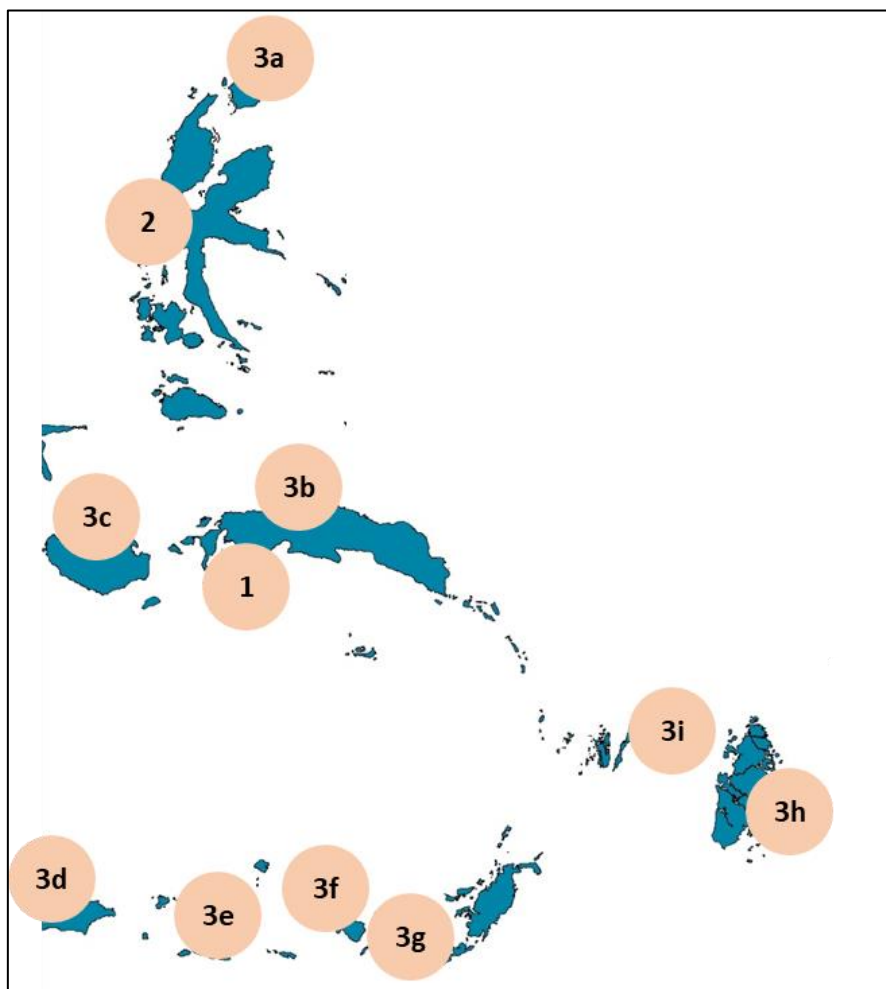


2.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Maluku

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Maluku tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* yang Terintegrasi Bertaraf Internasional;
- 2) Pembangunan Kota Baru Sofifi; dan
- 3) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) P. Morotai, (b) P. Seram, (c) P. Buru, (d) P. Wetar, (e) P. Moa, (f) P. Babar, (g) P. Selaru, (h) P. Aru, dan (i) P. Kei Besar.

Gambar 2.6.
Peta Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Maluku





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

KEPULAUAN MALUKU

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PP 6: Pembangunan Wilayah Maluku	Laju Pertumbuhan PDRB Maluku	6	14.053,00			
	Share PDRB Wilayah Maluku	0,55				
	IPM Wilayah Maluku	72,25-72,33				
	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	9,40				
Provinsi Maluku						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3297,59	71,55	Provinsi Maluku, Kab. Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru Selatan, Kota Ambon	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1240,03	28,21	Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kab. Maluku Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Makuku Barat Daya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Maluku, a.l: Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Maluku	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Maluku					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi Maluku)			737,76	Kota Ambon, Kota Tual		
Pengembangan Pelabuhan baru di Ambon (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	560	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh, Pemda, Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Tual	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	45	Kota Tual, Provinsi Maluku	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh
Pengembangan Bandara Patimura	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		200	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh, BUMN
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	186	327,96	Provinsi Maluku	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		38,70	Kota Ambon, Kota Tual (Provinsi Maluku)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		223,24	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		32,09	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		8,31	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		152,71	Kota Ambon, Kota Tual (Provinsi Maluku)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	675 desa berkembang; 39 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (kabupaten)	2 (terentaskan 4 kabupaten)		Prov. Maluku: Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,52				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	22,11				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	46,81	39,78	Kab. Maluku Tengah	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 21,4 - 21,9%; 2. 66,5 - 67	2.020,58	Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya	1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; 3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; 4. Program Penyelenggaraan Jalan; 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 6. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 7. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 9. Program Penanganan Fakir Miskin; 10. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaa Mikro; 11. Program Pengelolaan Ruang Laut.	1. Kementerian Perhubungan; 2. Kementerian PUPR; 3. Kementerian Desa PDTT; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian KUKM; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Pengembangan Bandara Moa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan	0	64,88	Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Moa	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		25	Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kisar-Leti-Moa	kapal penyeberangan yang dibangun		30	Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Jalan Trans Pulau Moa (DAK)	Panjang jalan yang dibangun	9	567,61	Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T		143,38	Kab. Maluku Tenggara Barat, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		3,50	Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)	5	7	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)	59	2,36	Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)		5,10	Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan		4,20	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood) (orang)	196	4,94	Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		18	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi (KK)	53	13,22	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan (KK)	96	11,63	Kab. Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar (unit)	2	17,60	Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar), Kepulauan Tanimbar	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	46.836	702,54	Kab. Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	56.742	459,61	Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana			2	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian KUKM
Puskesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun		APBD	Kab. Buru Selatan		Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana			2	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian KUKM
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku Barat Daya (Moa)	4	11,28	Kab. Maluku Barat Daya	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Puskesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun		APBD	Kab. Buru Selatan		Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Provinsi Maluku (kecamatan)	28	3375,46	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	28		Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	9	1,30	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Maluku (Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Aru)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		39,59	Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Aru	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		26,40	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec. Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor, Kec. Mdon Heira, Kec. Pulau Pulau Babar, Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti, Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur, Kec. Kisar Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Jalan Trans Pulau Kei Besar (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	20,07	1.274,19	Maluku	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Wetar (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	15,13	960,15	Maluku	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Selaru (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	8,53	541,44	Maluku	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Aru (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	7,91	502,19	Maluku	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	4	30	Pulau Liran, Pulau Leti, Pulau Kei Besar, Pulau Panambulai	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki	0,52	99	Kabupaten Maluku Tenggara Barat		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki	5	11,03	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian KKP
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	2	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Jaringan Air baku yang dibangun/ditingkatkan	Total debit air baku yang dihasilkan (m3/det)		9,73	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang terbangun	Jumlah Kapal perikanan bantuan yang terbangun			Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	20	0,04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
Pengembangan Pelabuhan Saumlaki	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	67,50	Maluku	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Saumlaki	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)		6,20	Maluku	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Kementerian Perhubungan
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	56,74	364,18	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	57	27,11	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,21	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparaturnya pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	57	53,72	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	331	92,35	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	72	180,89	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Maluku Tengah	53	68,9	Kab. Maluku Tengah	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,40	Kab. Maluku Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1	Kab. Maluku Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	15,86	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	1	8,62	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Maluku Tengah	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	131408	94,87	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku	46,81	39,78	Kab. Maluku Tengah	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	24,42	Kab. Maluku Tengah	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,45	Kab. Maluku Tengah	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarannya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	1,44	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,73	Kab. Maluku Tengah	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,41	Kab. Maluku Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Maluku Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,09				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	23				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	23				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	1775				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	2				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	23				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Maluku	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	494				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	12	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	34	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	12	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	1	4,98			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,075	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	12	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	12	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	12	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	12	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,056	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	12	0,29			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	11	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	12	0,67	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	12	0,13			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	12	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	12	0,13			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	12	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,68	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	3	1	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	12	0,84	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	131.408	94,87	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	59.031	5,33	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	26,51	Maluku	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Maluku	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,63	Maluku	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	1,91	Maluku	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK		1,70	Sekitar KI Teluk Weda	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	2	9,27	Maluku (Tepa, Tiakur, Benjina, Wonreli)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Maluku Utara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Perbaiki aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP/KEK Morotai	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi	>1				
Jalan Lingkar Pulau Morotai	Panjang jalan yang dibangun (km)		422,77	Maluku Utara		KemenPUPR/Pemda
Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	0,0	47	Maluku Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-Makian-Kayoa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (selesai)	30	Maluku Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Morotai/KEK Morotai	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Pulau Morotai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi	>1				
Jalan akses KI Weda	Panjang jalan yang dibangun (km)	25	275	Maluku Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Bandara Weda	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	220	Maluku Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)		85	Maluku	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Teluk Weda	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Halmahera Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1061,17	24,18	Provinsi Maluku Utara, Kab. Sula, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Pulau Morotai	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3316,20	71,98	Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan nikel	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi nikel	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Maluku Utara, a.l: Kab. Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Maluku Utara	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Maluku					
ProP : Pembangunan Kota Baru Sofifi				Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan		
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50,00	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Sofifi-Makian-Kayoa	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (selesai)	30,00	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	133	235,10	Provinsi Maluku Utara	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		1,30	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		62,81	Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi Maluku Utara)				Kota Ternate		
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		20,60	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		117,55	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		24,94	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		2,56	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		44,42	Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan (Provinsi Maluku Utara)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	675 desa berkembang; 39 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)		Prov. Maluku Utara: Kab. Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,55				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	4,07				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	34,68	76	Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 6,6 - 7,1%; 2. 64,8 - 65,3	254,91	Kab. Kepulauan Sula	1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; 3. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 4. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 6. Program Penanganan Fakir Miskin; 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian KUKM; 3. Kementerian Desa PDTT; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian PUPR
Sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Ikan yang Dibangun			Kab. Kepulauan Sula	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (start up capital)	Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada Wirausaha Pemula	20	1,43	Kab. Kepulauan Sula	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		1	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		1,20	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	15	0,59	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal	1	1,90	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 29

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	4.010	60,15	Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	4.959	44,63	Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu*	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		144,01	Kab. Kepulauan Sula*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas Provinsi Maluku Utara	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Provinsi Maluku Utara (kecamatan)	6	13,92	Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	6		Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	5	0,72	Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		13,20	Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba	0,55	484,36	Kab. Pulau Morotai		
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		6	Kab. Pulau Morotai	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Jalan Lingkar Pulau Morotai (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	422,77	Maluku Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Pulau Morotai	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan		2,20	Kab. Pulau Morotai	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	50	0,10	Kab. Pulau Morotai	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4,00	Kab. Pulau Morotai	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kab. Pulau Morotai	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kab. Pulau Morotai	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	57,37	371,70	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan, DPP Morotai	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	8,91	DPP Morotai	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	49	22,96	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)	0	0,27	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,21	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	49	48,98	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	350	97,67	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	0,66	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	72	183,81	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Halmahera Selatan, Kepulauan Sula	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Morotai	62,00	86,48	Kab. Morotai	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30	4,16	Kab. Morotai	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5	19,60	Kab. Morotai	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (skala 1-5)	4	14,10	Kab. Morotai	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Morotai	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,40	Kab. Morotai	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1	Kab. Morotai	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Morotai	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Morotai	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Morotai	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industry (unit)	1	40	Kab. Morotai	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	112.954	32,54	Maluku Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	34,68	75,93	Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	2	48,85	Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,27	Kab. Pulau Morotai	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	23,44	Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	2	2,88	Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau Morotai	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,23	Kab. Kepulauan Sula	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,26	Kab. Pulau Morotai	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Kepulauan Sula	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,09				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	23				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	23				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	1.775,07				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	2				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 36

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	23				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Maluku Utara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1281				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 37

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	34	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	1	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 38

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 39

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	11	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	94,53			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,265	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	0,272	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	11	0,50			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	11	0,61	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	11	0,12			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	11	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	11	0,12			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 41

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	11	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,24	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah	11	0,84	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Maluku - 42

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	112.954	32,54	Maluku Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	60.637	6,63	Maluku Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	32,09	Maluku Utara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Maluku Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	2,00	Maluku Utara (Kab. Pulau Taliabu)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,82	Maluku Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	2,03	Maluku Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

3. PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA

3.1 Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	3,00	4,30	4,90	5,50	6,20	6,60
	Tingkat Kemiskinan (%)	14,75	14,56	13,52	13,00	12,35	10,85	8,95
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,72	3,42	3,50	3,30	3,20	2,70	2,40
Nusa Tenggara Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,20	5,60	6,50	6,90	7,30	7,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	21,35	21,09	18,00	17,35	16,15	14,56	12,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,01	3,35	2,70	2,70	2,60	2,20	2,00

Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Nusa Tenggara, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024

Provinsi	Keburuhan Investasi	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Barat	Rp triliun	2,34	30,17	41,09	47,20	56,59	64,59	73,94
Nusa Tenggara Timur	Rp triliun	40,07	44,93	57,35	63,91	71,47	80,94	91,78

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

3.2 Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020-2024

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
NTB	1	Kabupaten Lombok Barat	NTT	1	Kabupaten Manggarai Barat
	2	Kota Mataram*		2	Kabupaten Manggarai
	3	Kabupaten Lombok Tengah		3	Kabupaten Manggarai Timur
	4	Kabupaten Lombok Timur		4	Kabupaten Ngada
	5	Kabupaten Sumbawa Barat		5	Kabupaten Nagekeo
	6	Kabupaten Sumbawa		6	Kabupaten Ende
	7	Kota Bima		7	Kabupaten Sikka
	8	Kabupaten Dompu		8	Kota Kupang*
	9	Kabupaten Bima		9	Kabupaten Kupang
Koridor Pemerataan					
NTB	1	Kabupaten Lombok Utara	NTT	1	Kabupaten Sumba Timur
				2	Kabupaten Sumba Tengah
				3	Kabupaten Sumba Barat
				4	Kabupaten Sumba Barat Daya
				5	Kabupaten Timor Tengah Selatan
				6	Kabupaten Timor Tengah Utara
				7	Kabupaten Malaka
				8	Kabupaten Belu

Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW

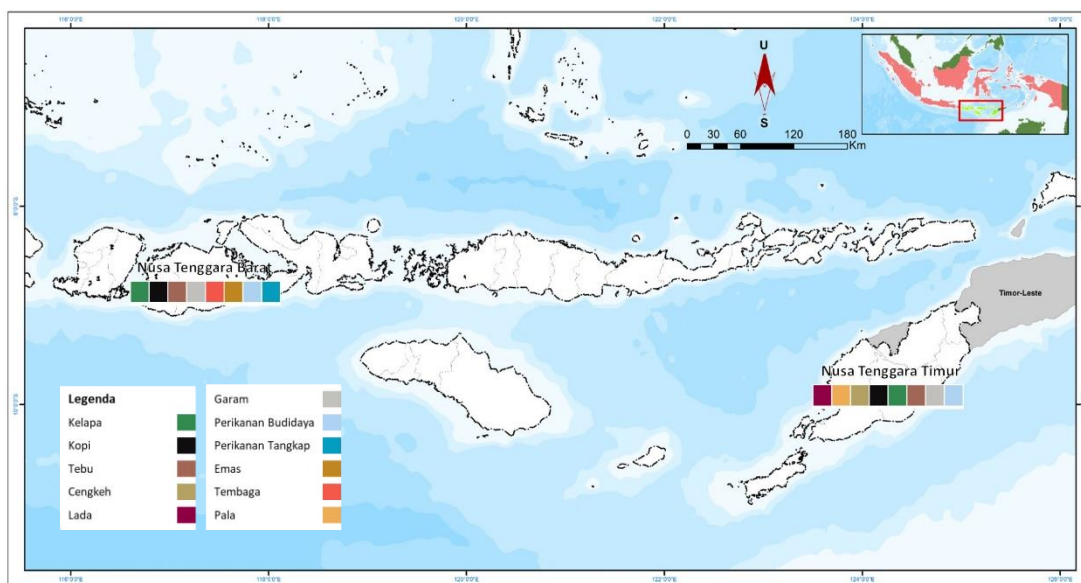
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

3.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu:
 - a. Provinsi Nusa Tenggara Barat: kelapa, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; dan
 - b. Provinsi Nusa Tenggara Timur: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya.
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- 3) Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda).

Gambar 3.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Nusa Tenggara





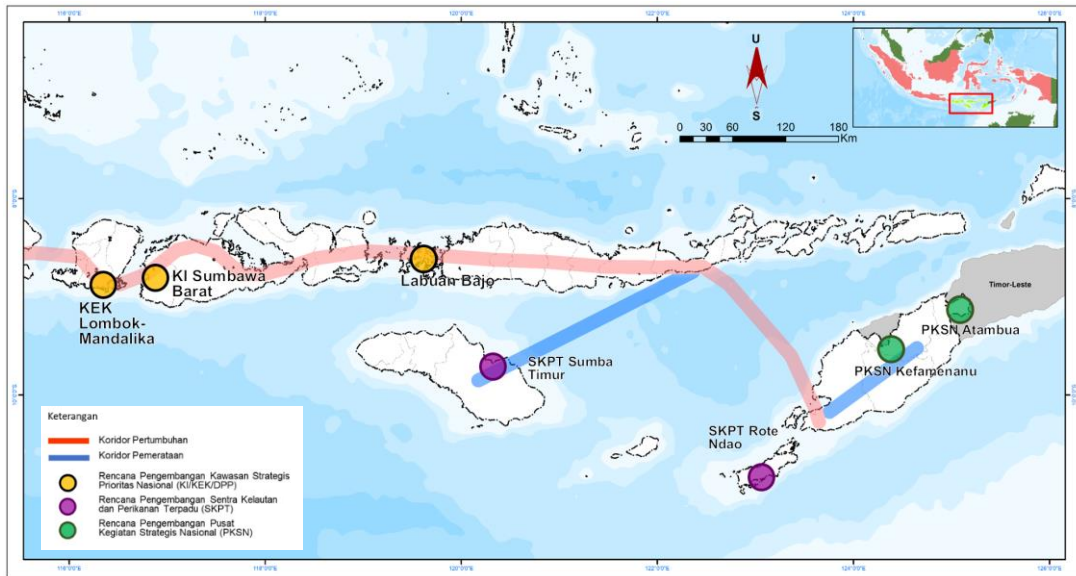
- 4 -

3.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

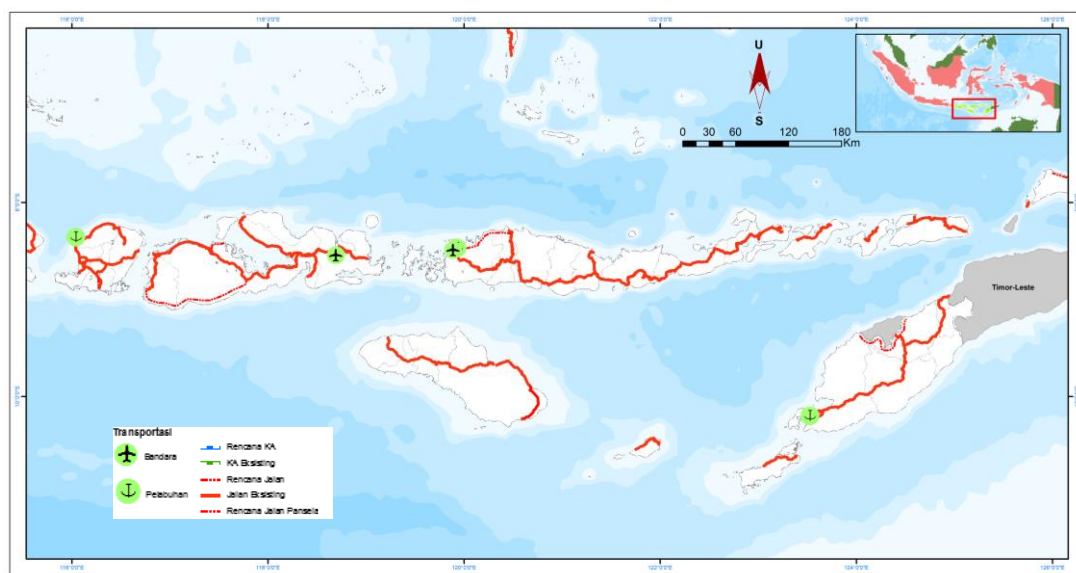
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada KI Sumbawa Barat;
- 2) Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
- 3) Pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
- 4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain Jalan Akses Samota, Jalan Akses KEK Mandalika, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo;
- 5) Penyediaan *outlet* untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan *feeder* yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;
- 6) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - a. Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.
 - b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 15 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi kreatif, tambang di Nusa Tenggara Barat, otomotif dan manufaktur di Nusa Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
 - c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan.
 - d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa Tenggara.

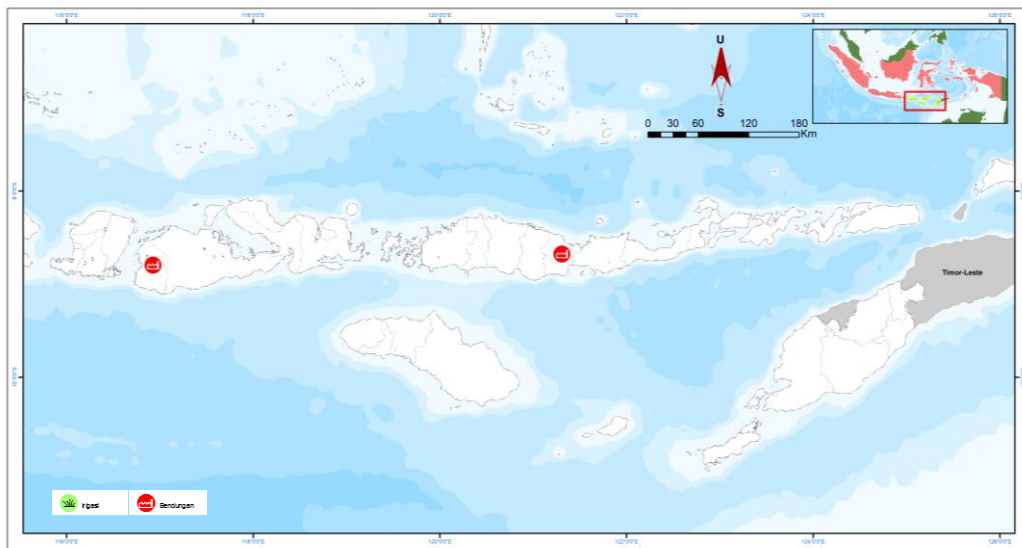
Gambar 3.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020 – 2024



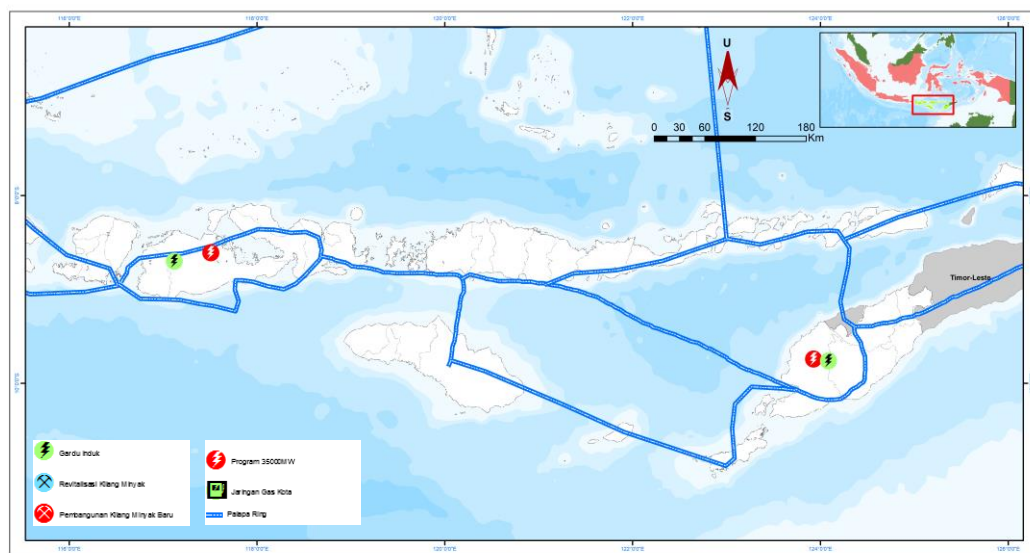
Gambar 3.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020 – 2024



Gambar 3.4.
Peta Rencana Infrastruktur Pengairan Nusa Tenggara Tahun 2020 – 2024



Gambar 3.5.
Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Sumber Energi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020 – 2024





- 7 -

3.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Mataram dan Kota Kupang (Tabel 3.3);
- 2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

3.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah. Adapun Kabupaten Lombok Utara sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada koridor pemerataan;
- 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Nusa Tenggara berlokasi di 12 kabupaten berikut, antara lain: Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 38 kecamatan lokpri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
- 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan

- dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur, KPPN Sumbawa, KPPN Dompu, KPPN Lombok Timur, dan KPPN Lombok Tengah;
 - 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima, Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
 - 8) Penanganan stunting dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 8 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023;
 - 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,87 persen di NTB, dan 15,69 persen di NTT; dan
 - 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, yang meliputi:
 - a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
 - c. Peningkatan konservasi hutan; dan
 - d. Pemantapan pemulihan pascabencana di Pulau Lombok dan sekitarnya.

3.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;



- 9 -

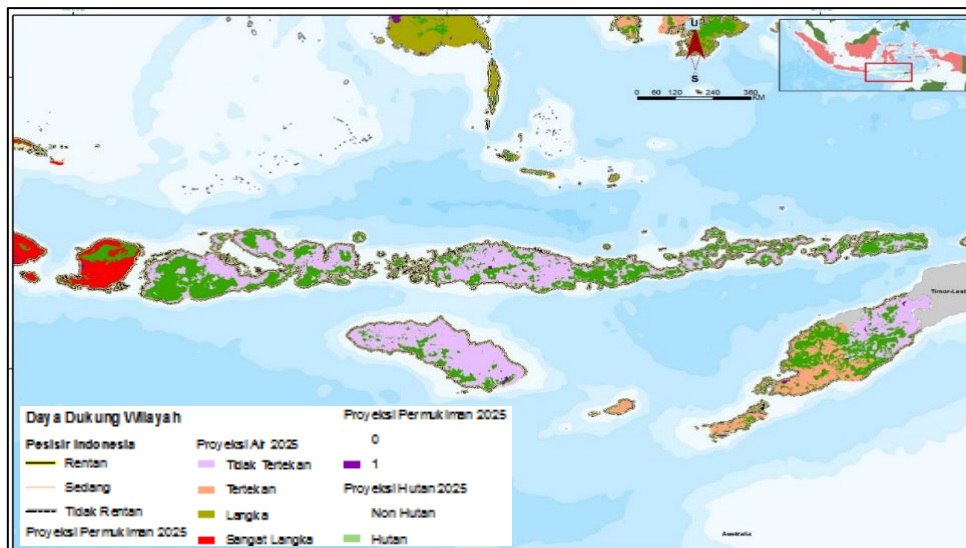
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka);
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas mencakup Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Tengah) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Raijua);
- 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
 - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
 - d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - i. Pembentukan bank tanah;
 - j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:



- 10 -

- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;
- 15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
- a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
 - b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
 - c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
 - d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
 - f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
 - g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
 - j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Gambar 3.6.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2025

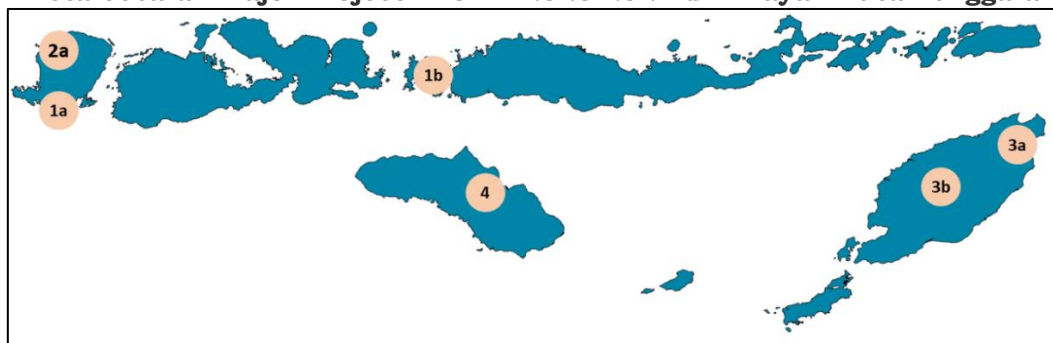


3.3 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Nusa Tenggara

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Lombok dan (b) Labuan Bajo;
- 2) Pemulihan Pasca Bencana Pulau Lombok dan Sekitarnya;
- 3) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Atambua dan (b) PKSN Kefamenanu; dan
- 4) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: Pulau Sumba.

Gambar 3.7.
Peta Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Nusa Tenggara





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

KEPULAUAN NUSA TENGGARA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PP 3: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Laju pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara (persen/tahun)	5,09	52.347,87			
	Share PDRB Wilayah Nusa Tenggara (persen)	1,51				
	IPM Wilayah Nusa Tenggara	68,35-71,91				
	Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara (persen)	13,69				
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
Perbaikan Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	>1				
Pengembangan Bandara Lombok	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		350	Nusa Tenggara Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemhub, BUMN
Jalan Akses KEK Mandalika (dukungan untuk Key Tourism Area Prioritas)	Panjang jalan yang dibangun (km)	4	150	Nusa Tenggara Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	
Jalan Bypass BIL-Mandalika	Panjang jalan yang dibangun (km)	12,60	892	Nusa Tenggara Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR

Nusa Tenggara - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		6,50	Kab. Lombok Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan dan pengembangan Gardu Induk Kuta	Jumlah kapasitas Gardu Induk (MVA)	60		Prov. Nusa Tenggara Barat		PLN
Pembangunan jaringan nirkabel melalui pengembangan menara telekomunikasi	Jumlah BTS yang terbangun (unit)			Prov. Nusa Tenggara Barat	Program aksesibilitas telekomunikasi dan informasi	Kemenkominfo
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas		1,40	Prov. Nusa Tenggara Barat	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Sumbawa Barat	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Sumbawa Barat	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	880,87	20,15	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kota Bima	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	481,60	30,53	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	2.585,27	104,09	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Dompu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan tembaga	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB					
Optimalisasi produksi tembaga	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Nusa Tenggara Barat, a.l Kab. Dompu, Kab. Bima	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Nusa Tenggara Barat, a.l Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (NTB)				Kota Mataram		
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	711	1.256,16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		22,40	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		393,75	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		236,92	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		50,21	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		8,11	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		174	Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1079 desa berkembang; 143 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)		Prov. NTB: Lombok Utara		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	10,61				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	60,44	59,61	1. Provinsi NTB: Kab. Bima, Kab. Sumbawa; 2. Provinsi NTT: Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Sumba Timur	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 24 - 24,5%; 2. 69,6 - 70,1	1056,47	Kab. Lombok Utara	1. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 2. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 3. Program Pengembangan Kepariwisata; 4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; 5. Program Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Program Penanganan Fakir Miskin; 7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Kementerian Desa PDTT; 2. Kementerian Pariwisata; 3. Kementerian KUKM; 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian PUPR
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	4	1,10	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		2	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	15	0,59	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal		1,30	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)		3	Kab. Lombok Utara	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		8,58	Kab. Lombok Utara (KSPN Gili Tramena dskt., dan KSPN Rinjani dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	96	2,45	Kab. Lombok Utara	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDPT
Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	Jumlah Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	7	15,28	Kab. Lombok Utara	Program Pengembangan Kepariwisata	Kementerian Pariwisata
Wirausaha Pemula Yang Didukung Modal Awal Usaha	Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada Wirausaha Pemula	625	44,69	Kab. Lombok Utara	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian KUKM
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus; Jumlah sekolah terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau sekolah darurat	4	3,20	Kab. Lombok Utara	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	75	1	Kab. Lombok Utara	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	33.755	303,80	Kab. Lombok Utara	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	19.939	309,62	Kab. Lombok Utara	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0,01	359,87	Kab. Lombok Utara*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	68,43	189,85	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, DPP Lombok-Mandalika	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDPT 2. Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	24,01	DPP Lombok-Mandalika	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		19,17	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		46,07	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	326	91,16	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,56	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	8	1,21	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Utara, Bima, Sumbawa Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	53.00; 59.00; NA; 75.00	1.300,75	Kab. Lombok Timur	1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Lombok Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Lombok Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan (unit)	1	2	Kab. Sumbawa	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan (ton)	2.000	58,80	Kab. Sumbawa	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan (dosis)	1.239.877,50	1000,23	Kab. Sumbawa	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	30	10,09	Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	4,78	Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	4	3,37	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	12,60	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,72	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	2	9,47	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	4	160,00	Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Dompu	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	590721	38,9	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	60,435	59,61	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	30,59	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,33	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	26,44	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

Nusa Tenggara - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	2,00	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,18	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,07	Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bima dan Kab. Sumbawa	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)					
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	2	10	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Kementerian Koperasi dan UKM
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	4	7	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1	2,50	Prov. NTB	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi		1,20	Prov. Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Program Beasiswa Kurang Mampu	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	8.000	284	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Beasiswa Berprestasi Bagi Siswa Miskin	Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	100	2	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus; Jumlah sekolah terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau sekolah darurat	4	3,20	Lombok Utara	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin *indikasi pendanaan masih merupakan total di 34 provinsi	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10.000.000		Nusa Tenggara Barat*	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan *indikasi pendanaan masih merupakan total di 11 Provinsi; 182 Kab/Kota	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Kartu Sembako Murah	4.847.877	0	Nusa Tenggara Barat	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun	150	375	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Peningkatan Kualitas)	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.100	27,50	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah	500	12,50	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
PLTS Rooftop	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop		2,19	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Barat	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		19,21	Kab. Lombok Barat		Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Utara	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		19,08	Kab. Lombok Utara		Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Tengah	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		54,80	Kab. Lombok Tengah		Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Lombok Timur	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		89,64	Kab. Lombok Timur		Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Sumbawa Barat	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		67,73	Kab. Sumbawa Barat		Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Sumbawa	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		17,96	Kab. Sumbawa		Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kota Mataram	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		11,42	Kota Mataram		Pemerintah Kota Mataram
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,29				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	42,5				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	34				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	34				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.667				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	34				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	2				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	805				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		50,82	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		19,96	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,33	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,33	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	34	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	100	2,67			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	11	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	45	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	11	0,50			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	11	0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	11	0,12			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	11	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	11	0,12			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	11	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	14,87	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	590.721	38,88	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	22.256	0,54	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	23	32,09	NTB	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	6	1,84	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	6	1,86	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	3,33	NTB (KSN TN. Gunung Rinjani, KSN Kawasan Bima)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Labuan Bajo	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	>1				
Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		28,50	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan baru di NTT (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	400	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemhub, Pemda, KPBU
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo	Panjang jalan yang dibangun (km)	21	1.402,21	Nusa Tenggara Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		28,50	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemhub (KPBU)
Pembangunan PLTP Ulumbu 5	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	20		Flores		PLN
Gardu Induk Labuan Bajo (70 kV)	Jumlah Kapasitas Gardu Induk (MVA)					Badan Usaha
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	997,01	62,88	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1.335,36	29,91	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Malaka	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	421,45	9,16	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	748,67	30,16	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.l Kab. Kupang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.l Kab. Bima	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (NTT)				Kota Kupang		
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	588	1.039,58	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		246,18	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		52,13	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		4,45	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		12	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		118,97	Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1079 desa berkembang; 143 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	7 (terentaskan 6 kabupaten)		Prov. NTT: Kab. Lembata, Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sabu Raijua dan Alor		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,51				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	20,81				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	48,20	51,10	1. Provinsi NTB: Kab. Bima, Kab. Sumbawa; 2. Provinsi NTT: Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Sumba Timur	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 24,4 - 24,9%; 2. 65,3 - 65,8	2.873.543,57	Kab. Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan	1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi; 2. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro; 3. Program Pendidikan Dasar Dan Menengah; 4. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; 5. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 6. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 7. Program Pemberdayaan Sosial; 8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 9. Program Penanganan Fakir Miskin; 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 12. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Kementerian ESDM; 2. Kementerian KUKM; 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Kementerian Perdagangan; 5. Kementerian Desa PDTT; 6. Kementerian Sosial; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Kementerian PUPR;
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia		0,22	Kab. Belu	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana			1	Kab. Malaka	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian KUKM
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Sekolah SMP yang dibangun	2	43,12	Kab. Sumba Timur	Program Pendidikan Dasar Dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya pasar rakyat	2	56,70	Kab. Timor Tengah Selatan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pukesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun			Kab. Sumba Barat Daya		Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	3	12,85	Kab. Malaka, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital	5	9	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Malaka, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	133	5,31	Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Malaka, Sumba Barat, Belu	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal	1	18,20	Kab. Kupang, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)		3	Kab. Timor Tengah Selatan	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal		7,50	Kab. Sumba Barat (KSPN Waikabubak-Manupeu-Tanah Daru dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan		2,40	Kab. Sumba Barat Daya	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	490	12,39	Kab. Malaka, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Jumlah Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	314	8,34	Kab. Sumba Barat Daya, Malaka, Belu, Manggarai	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi prioritas perbatasan	Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas perbatasan	40	10	Kab. Malaka, Belu, Kupang	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di Daerah Perbatasan	Panjang Jalan Strategis Desa yang ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan Daerah Tertinggal		6	Kab. Malaka	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan	100	6,68	Kab. Malaka	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)		2,2	Kab. Sumba Timur, Belu, Kupang, Sumba Barat Daya	Program Pemberdayaan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	245.527	3682,91	Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan* *) Lokus intervensi berada pada daerah tertinggal di dalam maupun di luar koridor kewilayahan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	304.543	2466,80	Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Sumba Timur yang Mandiri	Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha	4	11,98	Kab. Sumba Timur	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T	0,19	922,65	Kab. Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Sumba (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun	23	1.483,54	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Barat Daya dan Sumba Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR/Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahan-nya tersedia di Prov NTT (kecamatan)	38	3285,10	Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah



Nusa Tenggara - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah

Nusa Tenggara - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah

Nusa Tenggara - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	38		Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara		Pemerintah Daerah
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		72,54	Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Sabu Raijua	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR

Nusa Tenggara - 29

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	15	2,16	Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		52,80	Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM

Nusa Tenggara - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	4	0,40	Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu Mehara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua	0,48	1379,81	Kab. Belu		
Jalan Perbatasan NTT	Panjang jalan yang dibangun (km)	4,55	1.256,02	Nusa Tenggara Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Terminal Motaain	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		17	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	Jumlah moda kapal ternak yang disediakan di Kabupaten Belu (rute)	1	38,50	Kab. Belu	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)		6,38	Nusa Tenggara Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kab. Belu	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Belu	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kab. Belu	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,10	Kab. Belu	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun		2,40	Kab. Belu	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	250	0,08	Kab. Belu	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	250	0,08	Kab. Belu	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	250	0,20	Kab. Belu	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Belu	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pelatihan Vokasional	Jumlah peserta (orang) pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya	100	1	Kab. Belu	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya		1,80	Kab. Belu	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas jagung	Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas jagung (unit)	1	0,20	Kab. Belu	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas bawang merah	Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4) untuk komoditas bawang merah (unit)	1	0,20	Kab. Belu	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Pengembangan Sarana Industri Alat Mesin Pertanian Jagung	Jumlah sarana prasarana produksi pertanian jagung (unit)	1	0,20	Kota Atambua	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan (paket)	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan Penanganan penyakit ternak, teknologi produksi dan pembuatan pakan ternak	Pelatihan Penanganan penyakit ternak, teknologi produksi dan pembuatan pakan ternak (paket)	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan Sistem Agribisnis usahatani ternak sapi	Pelatihan Sistem Agribisnis usahatani ternak sapi (paket)	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	Pelatihan budidaya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan (paket)	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian

Nusa Tenggara - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelatihan penanganan penyakit hama, teknologi produksi untuk komoditas jagung dan bawang merah	jumlah pelatihan mengenai penangan penyakit hama untuk komoditas jagung dan bawang merah	1	0,40	Kab. Belu	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	12	4,02	Kab. Belu	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Fasilitasi Legislasi RDTR Atambua Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,50	Atambua	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR
Fasilitasi Legislasi RDTR Motaain Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,20	Kab. Belu	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu	0,57	131,64	Kab. Timor Tengah Utara		
Pengembangan Pelabuhan Wini	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	45	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Terminal Wini	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		25,16	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Petani dan Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Petani dan Nelayan yang mendaftar	500	0,16	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	250	0,20	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		0,90	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,1	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp Miliar)*	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024				
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Timor Tengah Utara	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya		1,80	Kab. Timor Tengah Utara	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pelaksanaan inseminasi buatan	Pelaksanaan inseminasi buatan (Akteptor)	1000	0,20	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pelatihan penggemukan sapi dan kambing	Jumlah pelatihan yang terlaksana untuk penggemukan sapi dan kambing (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan pembuatan pakan ternak sapi dan kambing	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pakan ternak sapi dan kambing (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Fasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos	Jumlah masyarakat yang difasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya kambing	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan budidaya kambing (paket)	1	0,40	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong	Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong	100	0,36	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Lahan Garam yang difasilitasi	Luas lahan (ha) garam yang difasilitasi	20	10	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian KKP
Pembangunan sarana niaga garam rakyat	Jumlah (unit) sarana niaga garam rakyat yang dibangun	1	2,20	Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian KKP
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	11	3,69	Kab. Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Maritaing	jumlah pelabuhan penyebrangan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	85	Nusa Tenggara Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan

Nusa Tenggara - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Fasilitasi Legislasi RDTR Wini Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,20	Kab. Timor Tengah Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	60,25	700,61	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, DPP Labuan Bajo	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	22,24	DPP Labuan Bajo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	863	59,78	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

Nusa Tenggara - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	863	122,48	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	1.000	279,26	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,56	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 36

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Jumlah desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD (desa)	72	204,25	Manggarai, Ngada, Sumba Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	21	3,17	Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Rai Jua, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	59.00; 58.00; 45.00	189,55	Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada	1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan (unit)	1	2	Kab. Sumba Timur	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan (ton)	2.000	58,80	Kab. Sumba Timur	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan (dosis)	1000	0,04	Kab. Sumba Timur	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	20	4,80	Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1,20	Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 37

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industry (unit)	3	120	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba Timur	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	124.198	166,70	NTT	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	48,20	51,10	Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba Timur	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	18,92	Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba Timur	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	750	0,65	Kab. Malaka dan Kab. Timor Tengah Utara	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	27,08	Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,38	Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	180	0,83	Kab. Sumba Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	750	0,24	Kab. Malaka dan Kab. Timor Tengah Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	180		Kab. Sumba Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,29				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 38

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	42,5				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	34				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	34				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.667				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	34				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	2				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	862				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	8	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 39

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	23	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	34	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	23	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,52			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	1	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	100	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	23	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	23	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	23	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	23	0,48			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 41

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	23	0,27			
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	23	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	40	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	23	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 42

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	23	0,68			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	22	0,31	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	23	0,42	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	23	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	23	0,26			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	23	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	23	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 43

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	23	0,26			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	23	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	18,96	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	6	4	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 44

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	124.198	166,70	NTT	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	43.347	0,80	NTT	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	32,10	NTT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	NTT	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	2	12	NTT (Kab Flores Timur, Kab. Manggarai Timur, Kab. Malaka, Kab. Sumba Tengah, Kab Alor, Kab Sabu Raijua)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	1,31	NTT	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nusa Tenggara - 45

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	0,91	NTT	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	4,20	Haumeni Ana, Turiskain (NTT)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	1,83	NTT (KSN Kawasan Mbay)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

4. PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI

4.1. Target Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Target Pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,01	5,80	6,20	6,60	6,70	7,30	7,60
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,80	7,66	7,00	6,68	6,45	5,93	5,65
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,86	6,25	6,70	6,50	6,30	5,90	5,60
Sulawesi Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,30	7,50	7,60	7,70	8,00	8,30	8,60
	Tingkat Kemiskinan (%)	14,75	13,48	13,00	12,79	12,35	11,85	11,45
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,43	3,15	3,30	3,30	3,20	2,80	2,40
Sulawesi Selatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,07	7,10	7,10	7,50	7,70	8,10	8,40
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,06	8,69	8,46	8,25	7,35	6,75	5,68
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	4,97	5,20	5,10	5,00	4,50	4,20
Sulawesi Tenggara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,42	6,30	6,40	6,80	7,10	8,60	8,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25	11,24	10,76	10,36	9,35	8,15	7,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,26	3,59	3,30	3,20	3,10	2,80	2,40
Gorontalo	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,51	6,50	6,50	6,80	7,20	7,80	7,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	16,81	15,52	15,00	14,60	14,25	13,65	13,20
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,03	4,06	3,60	3,40	3,20	2,80	2,40
Sulawesi Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,23	5,00	5,10	5,40	5,70	6,40	8,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25	11,02	9,62	9,36	8,79	7,51	4,85
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,16	3,18	3,00	2,90	2,70	2,30	2,00

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.

Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sulawesi, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang sekitar Rp. 469.73 Triliun.

Tabel 4.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi 2020-2024

Provinsi	Kebuthan Investasi	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	Rp Triliun	41,24	44,10	50,03	55,15	61,74	69,99	78,85
Sulawesi Tengah	Rp Triliun	49,44	60,54	60,77	67,46	75,71	86,04	97,54
Sulawesi Selatan	Rp Triliun	162,24	179,36	202,76	224,84	249,72	280,50	314,77
Sulawesi Tenggara	Rp Triliun	40,71	44,11	50,48	55,72	62,00	69,94	79,11
Gorontalo	Rp Triliun	11,09	12,16	13,51	15,09	16,88	18,99	21,37
Sulawesi Barat	Rp Triliun	11,07	10,66	14,77	16,04	17,55	19,28	21,62

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

4.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi

Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan Wilayah Sulawesi 2020-2024

Provinsi	No.	Kab/Kota	Provinsi	No.	KabupatenKota
Koridor Pertumbuhan					
Sulawesi Utara	1	Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Selatan	1	Kabupaten Luwu Timur
	2	Kota Manado		2	Kabupaten Luwu Utara
	3	Kabupaten Minahasa		3	Kabupaten Luwu
	4	Kota Bitung		4	Kota Palopo*
	5	Kota Tomohon		5	Kabupaten Wajo
	6	Kabupaten Minahasa Selatan		6	Kabupaten Soppeng
	7	Kabupaten Bolaang Mongondow		7	Kota Pinrang
	8	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara		8	Kota Parepare*
Sulawesi Tengah	1	Kabupaten Buol	9	Kabupaten Barru	
	2	Kabupaten Tolitoli	10	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	
	3	Kabupaten Parigi Moutong	11	Kabupaten Maros	
	4	Kabupaten Donggala	12	Kota Makassar	
	5	Kota Palu*	13	Kabupaten Gowa	
	6	Kabupaten Poso	14	Kabupaten Takalar	
Sulawesi Tenggara	1	Kabupaten Kolaka Utara	Gorontalo	1	Kabupaten Gorontalo Utara
	2	Kabupaten Kolaka		2	Kabupaten Gorontalo
	3	Kabupaten Kolaka Timur		3	Kota Gorontalo*
	4	Kota Kendari*	Sulawesi Barat	1	Kabupaten Polewali Mandar
	5	Kabupaten Konawe		2	Kabupaten Majene
			3	Kabupaten Mamuju*	
			4	Kabupaten Mamuju	

Provinsi	No.	Kab/Kota	Provinsi	No.	KabupatenKota
					Tengah
Koridor Pemerataan					
Sulawesi Utara	1	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Tenggara	1	Kabupaten Konawe Selatan
	2	Kabupaten Kepulauan Talaud		2	Kabupaten Muna
	3	Kabupaten Kepulauan Sitaro		3	Kabupaten Wakatobi
Sulawesi Tengah	1	Kabupaten Sigi	Gorontalo	1	Kabupaten Boalemo
	2	Kabupaten Tojo Una-Una	Sulawesi Barat	1	Kabupaten Mamuju Utara
	3	Kabupaten Banggai			
	4	Kabupaten Morowali Utara			
	5	Kabupaten Morowali			
Sulawesi Selatan	1	Kabupaten Toraja			
	2	Kabupaten Toraja Utara			
	3	Kabupaten Bone			
	4	Kabupaten Bantaeng			
	5	Kabupaten Bulukumba			
	6	Kabupaten Sinjai			

Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

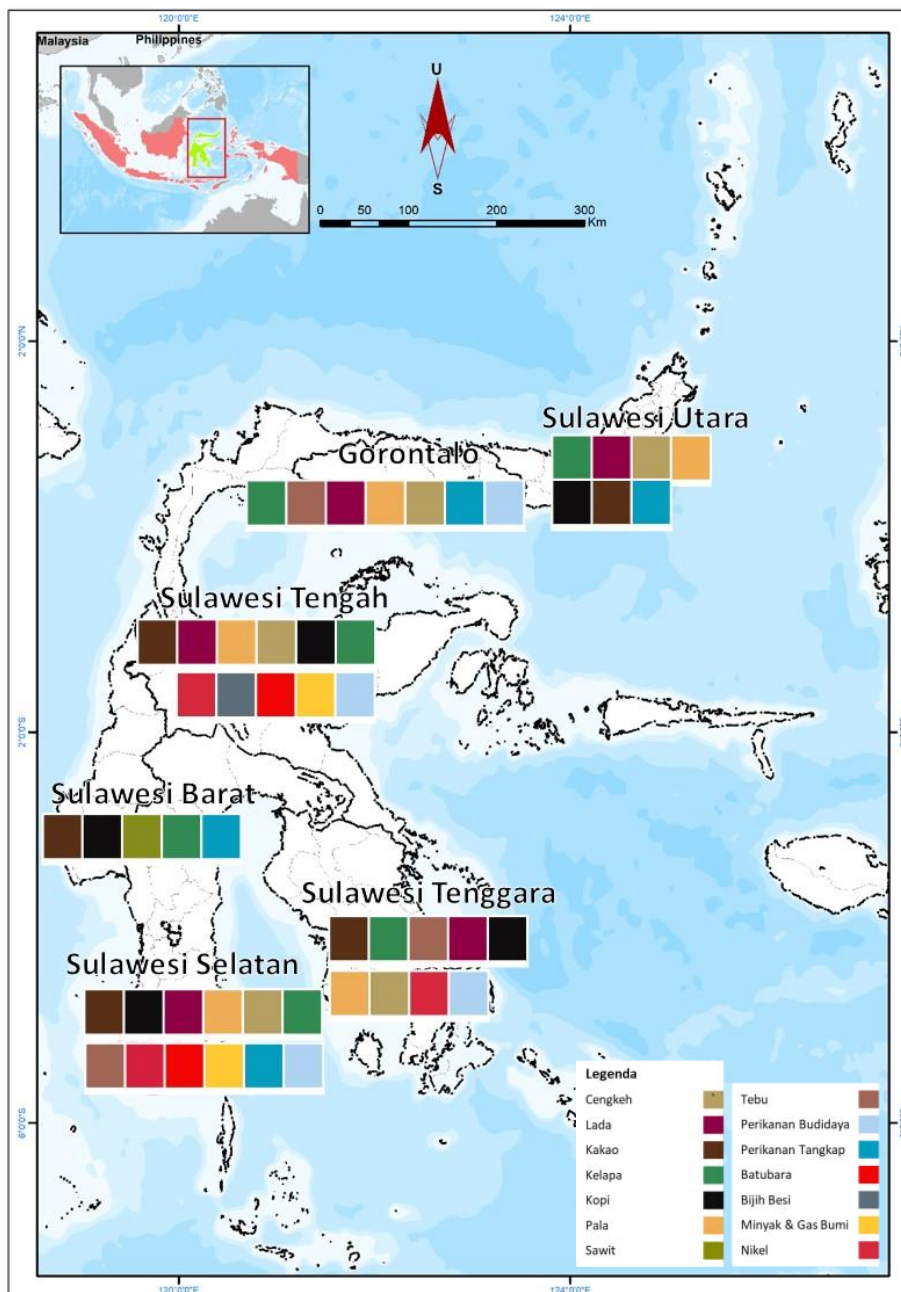
4.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan budidaya, yang difokuskan pada komoditas:
 - a. Provinsi Sulawesi Utara: kelapa, lada, cengkeh, pala, kopi, kakao, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - b. Provinsi Sulawesi Tengah: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - c. Provinsi Sulawesi Selatan: kakao, kopi, lada, pala, cengkeh, kelapa, tebu, nikel, batu bara, minyak dan gas bumi, garam, perikanan tangkap dan budidaya;
 - d. Provinsi Sulawesi Tenggara: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - e. Provinsi Gorontalo: kelapa, tebu, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya;
 - f. Provinsi Sulawesi Barat: kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan perikanan tangkap dan budidaya.

- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- 3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Talaud, WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda) WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau), dan WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera).

Gambar 4.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Sulawesi

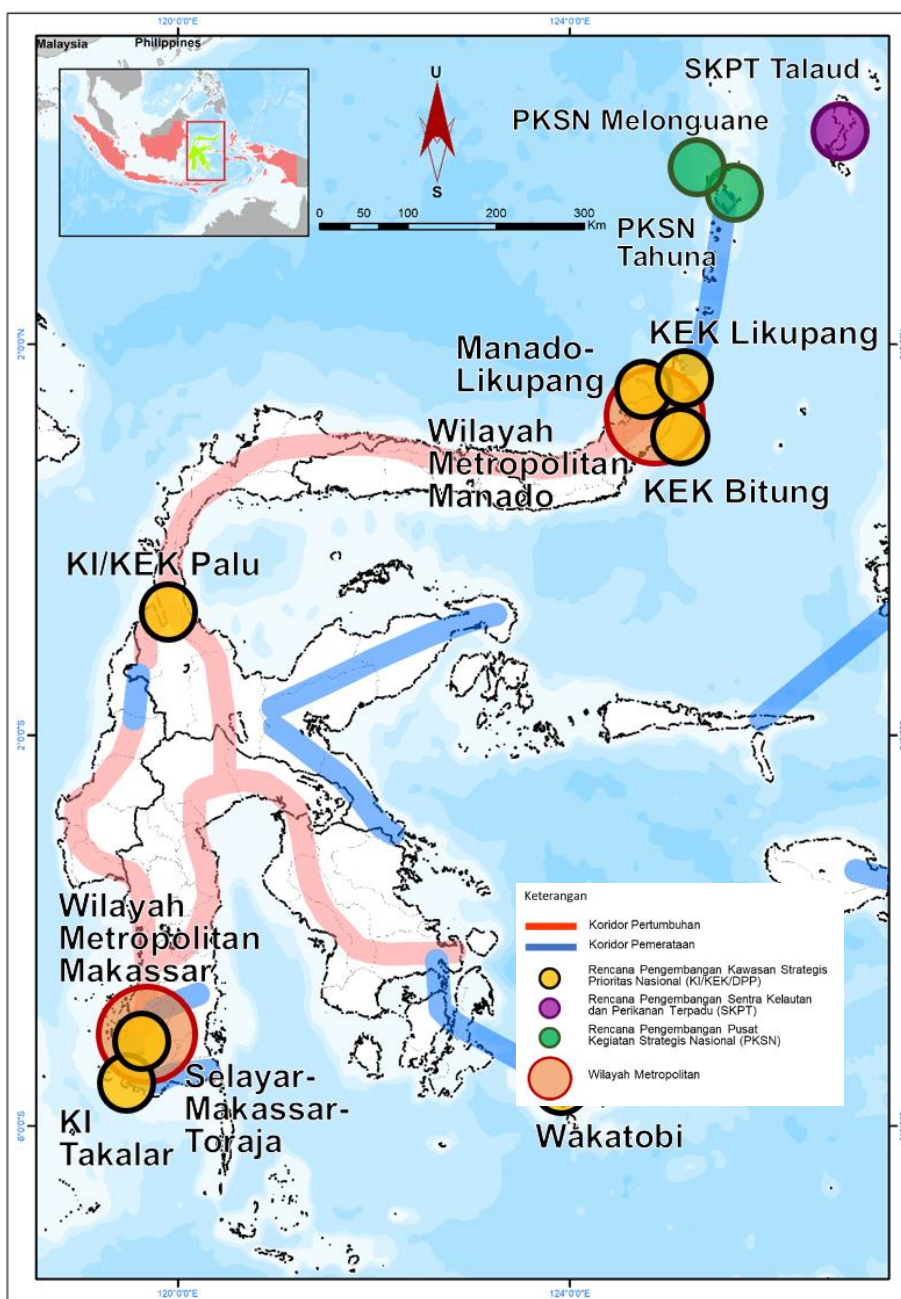


4.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

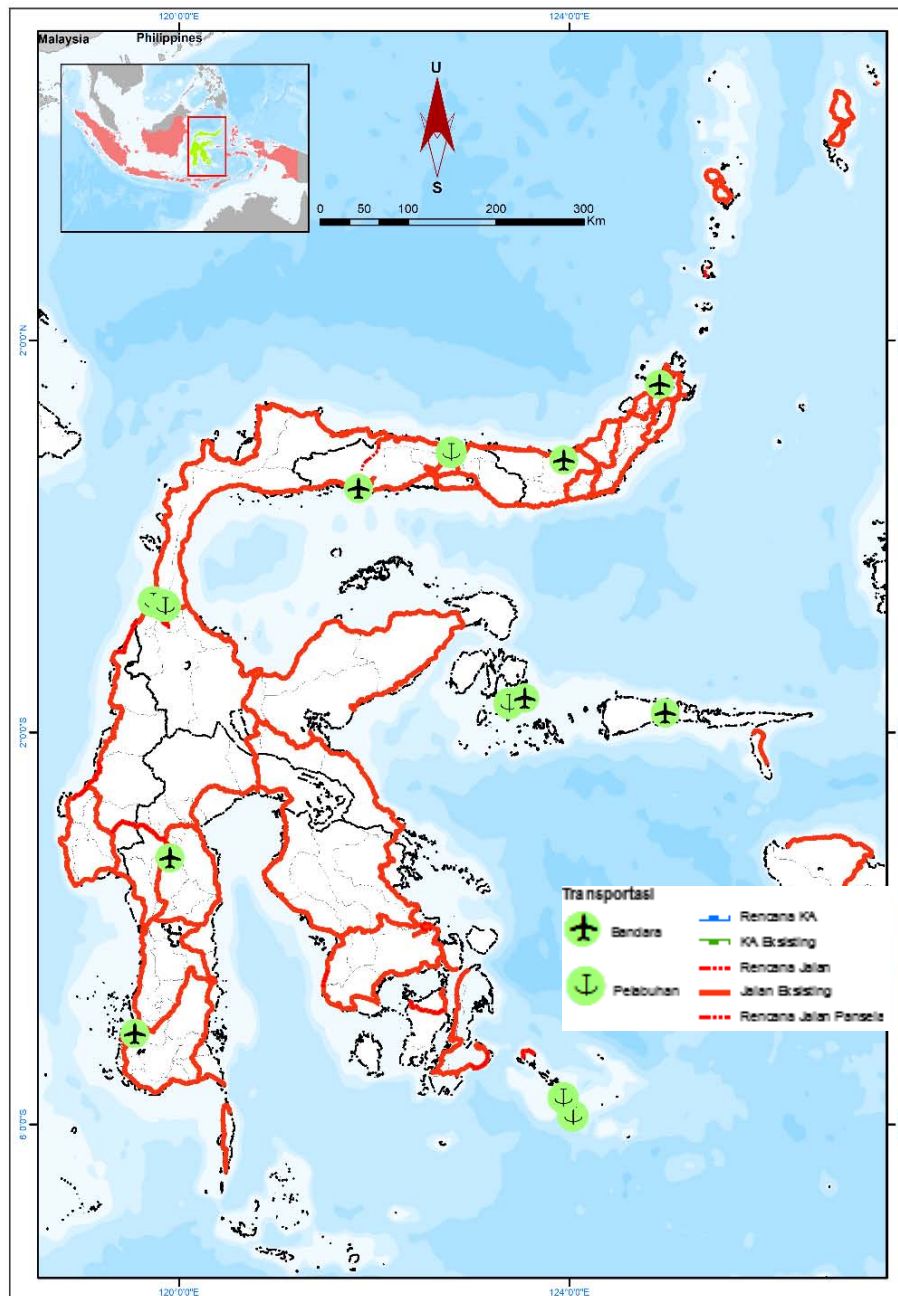
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
- 2) Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar, dan DPP Wakatobi;
- 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan Jalan Trans Sulawesi dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain: Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar P. Wangi-Wangi (Wakatobi), Jalan Akses Wisata Likupang, KA Makassar Parepare, Rekonstruksi Pelabuhan Wani, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pahuwato, Bandara Boloang Mangondow, Pengembangan Bandara Banggal Laut, Bandara Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar;
- 4) Pengembangan pusat perdagangan pelabuhan *hub* Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Makassar;
- 5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 6) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja:
 - a. Pengembangan 325 SMK di wilayah Sulawesi yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
 - b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 26 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kimia dan Otomotif di Sulawesi Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian;
 - c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 42 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki; dan
 - d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Sulawesi.

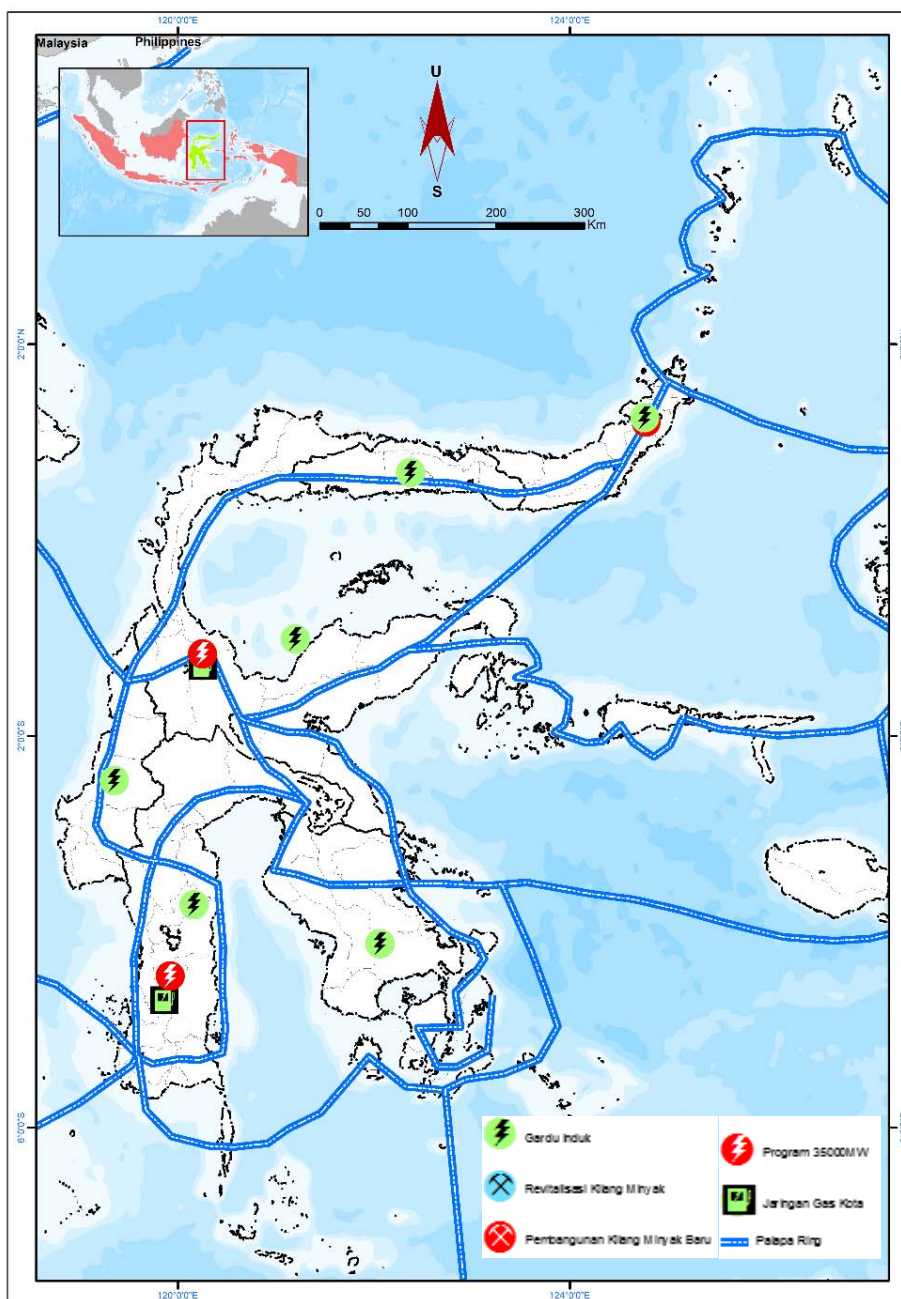
Gambar 4.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Sulawesi



Gambar 4.3.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Transportasi Wilayah Sulawesi



Gambar 4.4.
Peta Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Sulawesi





- 9 -

4.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan perkotaan di WM Makassar dan WM Manado sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Parepare, Palopo, Kendari, Mamuju dan Gorontalo (Tabel 4.3);
- 2) Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Makassar (Mamminasata) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; dan
- 3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

4.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 3 kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada koridor kewilayahan, antara lain: Sigi dan Donggala berada pada koridor pemerataan, sedangkan Tojo Una-Una berada pada koridor pertumbuhan;
- 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sulawesi berlokasi di 15 kabupaten berikut, antara lain: Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo; Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat; Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan; Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, Parigi Moutong, dan Toli-toli di Provinsi Sulawesi Tengah; serta Bombana, Konawe, dan Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Utara, 3 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 1 kecamatan lokpri di Provinsi Gorontalo;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane;
- 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa



- 10 -

dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

- 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju, KPPN Pinrang, KPPN Morowali, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, KPPN Muna, KPPN Barru, KPPN Luwu Timur, KPPN Bone, KPPN Minahasa Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN Gorontalo;
- 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Wakorumba-Maligano/Mutiara di Kabupaten Muna, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju Utara/Pasang Kayu, Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampolore - Pamona Timur di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, serta Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo;
- 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, 11 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Kabupaten di Provinsi Gorontalo, dan 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi pada tahun 2023. Khusus Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan mencapai eliminasi penyakit Schistosomiasis pada tahun 2024 dengan lokasi fokus di 28 Desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; dan
- 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65 persen di Provinsi Sulawesi Utara, 11,26 persen di Provinsi Sulawesi Tengah, 8,7 persen di Provinsi Sulawesi Tenggara, 13,26 persen di Provinsi Gorontalo, 8 persen di Provinsi Sulawesi Barat, dan 6,91 persen di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan wilayah utara Pulau Sulawesi;



- 11 -

- b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
- c. Peningkatan konservasi hutan;
- d. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; dan
- e. Pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya.

4.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Banggai Laut) dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa Utara);
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow), Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kepulauan Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana), Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto);
- 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:



- 12 -

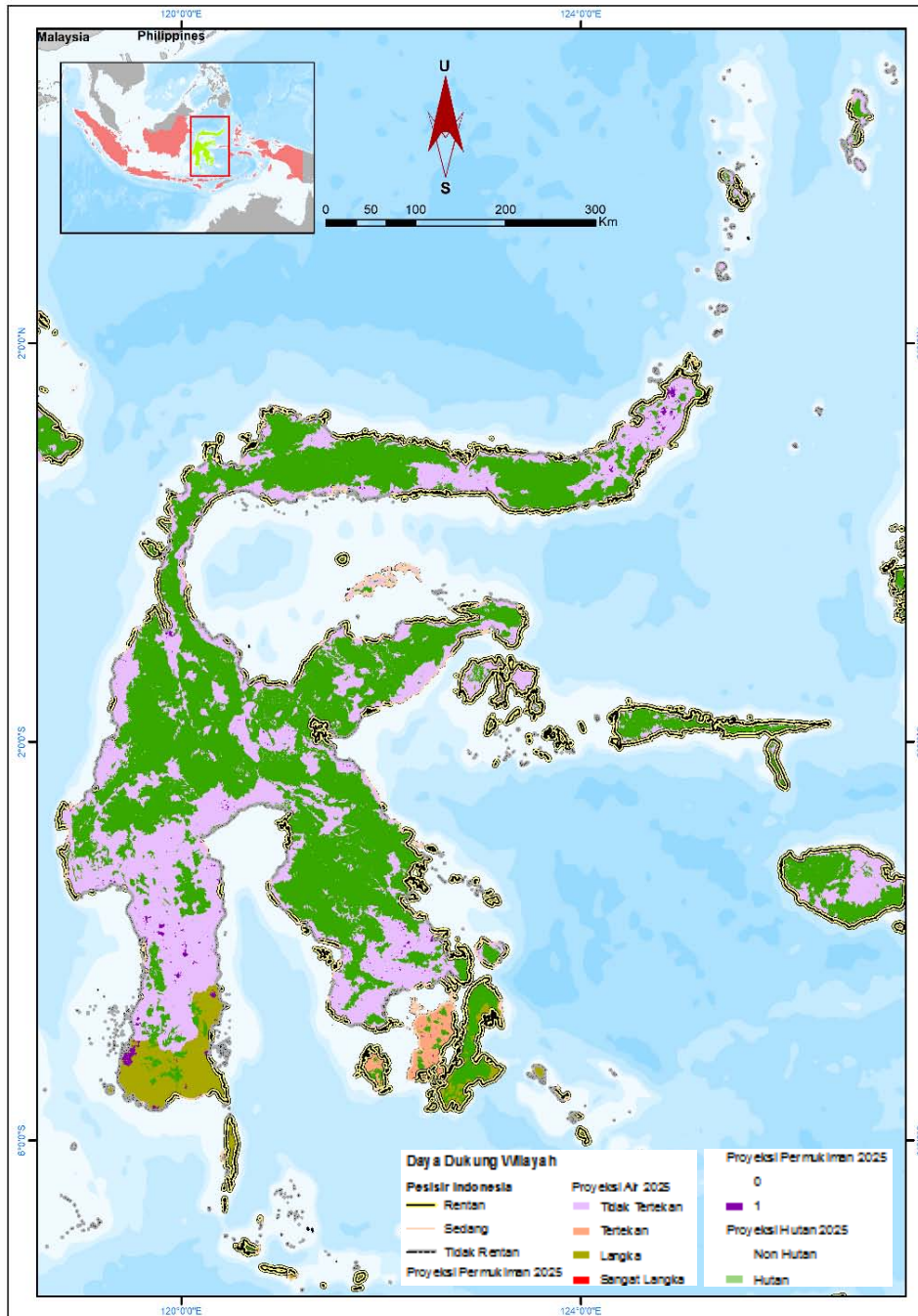
- a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - h. Pembentukan bank tanah;
 - i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
- 15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, meliputi:
- a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan;
 - b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
 - c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
 - d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
 - f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
 - g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
 - j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Gambar 4.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Sulawesi tahun 2025





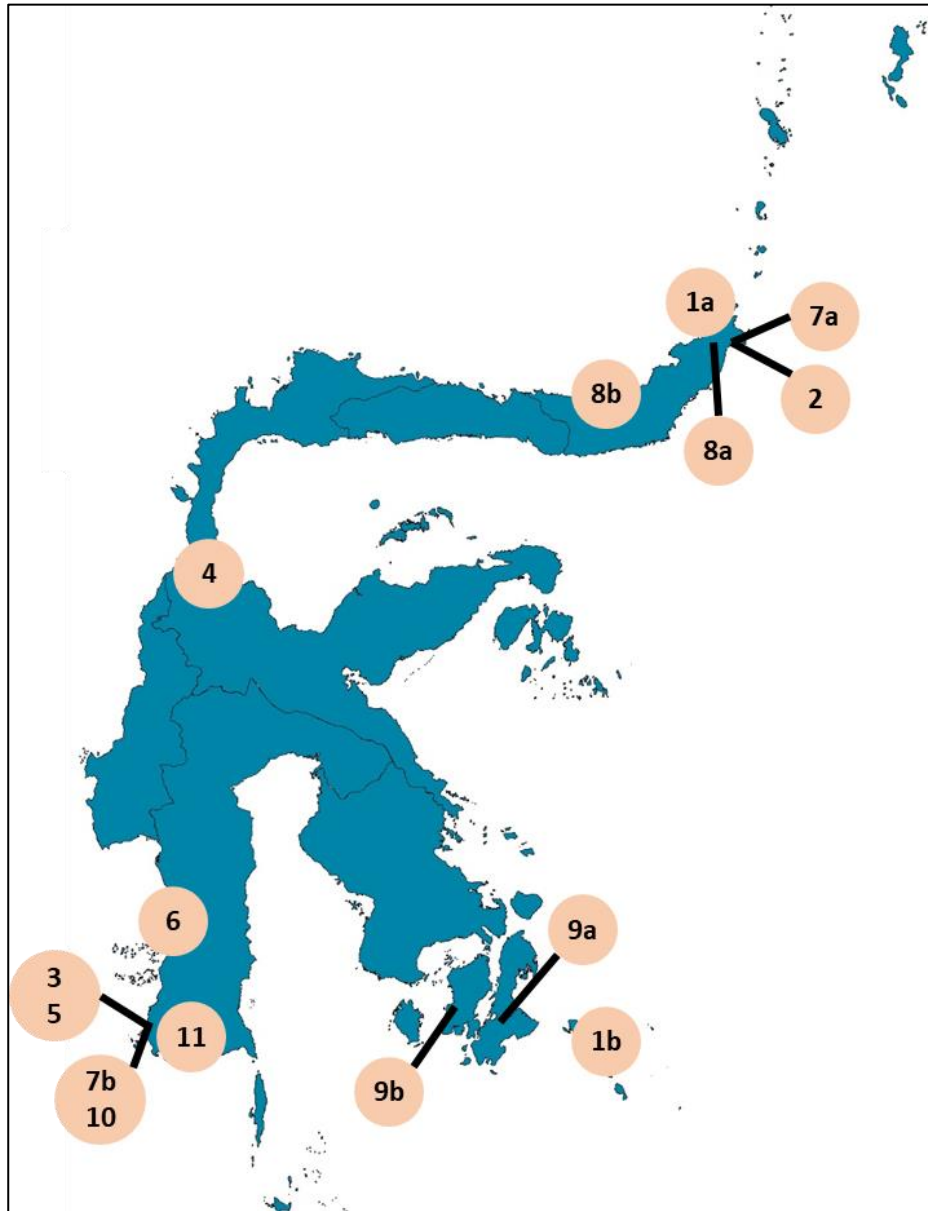
- 14 -

4.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Sulawesi

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) di wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Manado - Likupang dan (b) Wakatobi;
- 2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
- 3) Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar;
- 4) Pemulihan Pasca Bencana Kota Palu dan Sekitarnya;
- 5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar;
- 6) Pembangunan KA Makasar-Parepare;
- 7) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Bitung dan (b) Makassar;
- 8) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kuwil Kawangkoan dan (b) Lolak;
- 9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) Pulau Buton dan (b) Pulau Muna;
- 10) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sulawesi Selatan; dan
- 11) Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sulawesi Selatan.

Gambar 4.6.
Peta Sebaran Rencana *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Sulawesi





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU SULAWESI

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PP 5: Pembangunan Wilayah Sulawesi	Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi (persen/tahun)	6,91	189.354,45			
	Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen)	6,23				
	IPM Wilayah Sulawesi	69,41-75,83				
	Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi (persen)	7,90				
Provinsi Sulawesi Utara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	>1				
Pengembangan Pelabuhan Bitung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)	1 (selesai)	25.000	Sulawesi Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Bitung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kota Bitung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	5,95	Prov. Sulawesi Utara	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/DPP Baru Manado - Likupang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	>1				
Jalan Akses Likupang (Dukungan KPBU)	Panjang jalan yang dibangun (km)		120	Sulawesi Utara		KPBU
Pembangunan PLTMG Minahasa	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Prov. Sulawesi Utara		PLN
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Likupang/DPP Baru Manado - Likupang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Minahasa Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	2.009,52	45,79	Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	4.718,46	102,38	Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Bitung, Kota Tomohon	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	744,25	47,01	Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	311,04	25,03	Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang Mongondow	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,1		Provinsi Sulawesi Utara, a.l: Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Minahasa Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,6		Provinsi Sulawesi Utara,	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado (Bimindo)				Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa Utara		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara		Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Bitung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)	1 (selesai)	25.000	Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	322	569,30	Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	50	Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa Utara (Provinsi Sulawesi Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		787,13	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		112,50	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		27,70	Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa Utara (Provinsi Sulawesi Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		142,56	Kota Tomohon, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		14,40	WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	3,17	WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1043 desa berkembang; 507 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,51				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	7,92				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Sulawesi Utara (kecamatan)	14	37,74	Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah



Sulawesi - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	14		Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	5	0,72	Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energ	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Sulawesi Utara (Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Sitaro, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepulauan Talaud)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)	0,00	23,62	Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Sitaro, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepulauan Talaud	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		13,20	Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec. Miangas	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	8	60	Pulau Mantehage, Pulau Kawio, Pulau kawaluso, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Kakarotan, Pulau Kabaruan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna	0,53	29,98	Kabupaten Kep Sangihe		
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	2	Kabupaten Kep Sangihe	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kabupaten Kep Sangihe	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kabupaten Kep Sangihe	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang terbe	Jumlah Kapal perikanan bantuan yang terbangun			Kabupaten Kep Sangihe	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan pelabuhan laut Tahuna	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		22,50	Kabupaten Kep Sangihe	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kementerian Perhubungan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	20	0,04	Kabupaten Kep Sangihe	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kabupaten Kep Sangihe	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kabupaten Kep Sangihe	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane	0,48	64,81	Kabupaten Kep Talaud		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud	5	10,96	Kepulauan Talaud	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	2	Kepulauan Talaud	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Melongguane	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan		40	Sulawesi Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kepulauan Talaud	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kepulauan Talaud	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan		5,50	Kepulauan Talaud	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	20	0,04	Kepulauan Talaud	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kepulauan Talaud	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kepulauan Talaud	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	65,16	255,03	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro, DPP Manado-Likupang	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	16,91	DPP Manado-Likupang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	362	29,54	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)	0	0,27	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	362	60,88	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	494	137,98	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Minahasa Utara	45.00	127,7	Kab. Minahasa Utara	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Minahasa Utara	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Minahasa Utara	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3,00	Kab. Minahasa Utara	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Minahasa Utara	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Minahasa Utara	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40,00	Kab. Minahasa Utara	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	132.387	97,0	Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,32				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	43,5				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	87				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	87				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	6.475				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	87				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	8				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di Provinsi Sulawesi Utara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.215				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km ²)	2.800	52,84	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km ²)	2.800	19,68	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	16	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2	3,21			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	3	0,86	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	16	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	16	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	42	0,84			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	16	0,27	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	0,17	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	16	0,66			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	15	0,28	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	16	0,86	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	16	0,18			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	16	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	16	0,18			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	16	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	50,39	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	6	5	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	132.387	97,00	Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	22.112	0,42	Sulawesi Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	32,10	Sulawesi Utara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sulawesi Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Sulawesi Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK/KSPN		1,80	Sekitar Kawasan Pariwisata Likupang	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Sulawesi Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	1,83	Sulawesi Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tengah						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah	>1				
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		130,50	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		101,50	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		812	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)		1.218,70	Sulawesi Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Bandara Mutiara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		245	Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Palu	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kota Palu	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTU Palu III	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Kota palu		PLN
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	996,44	79,37	Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	316,41	6,84	Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Donggala, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Toli toli	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	867,94	54,95	Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Sigi, Kab. Poso	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1542,99	35,41	Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Banggai, Kab. Poso, Kab. Donggala, Kab. Toli Toli, Kab. Buol, Kab. Tojo Una Una	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan nikel	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi nikel	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan bijih besi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi bijih besi	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil				Kota Palu		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Sulawesi Tengah		KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	381,50	674,49	Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		10,90	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		139,08	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		95,20	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1043 desa berkembang; 507 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)		Prov. Sulawesi Tengah: Kab. Tojo Una-una, Sigi, Donggala		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	0,12				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	59,29	128,74	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 16,2 - 16,7% 2. 69,7 - 70,2	1.654,96	Kab. Tojo Una-una, Sigi, Donggala	1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 3. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5. Program Penanganan Fakir Miskin; 6. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro; 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 8. Program Pengelolaan Ruang Laut	1. Kementerian ESDM; 2. Kementerian Desa PDTT; 3. Kementerian Sosial; 4. Kementerian KUKM; 5. Kementerian PUPR
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia	2	2,84	Kab. Tojo Una-una	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)	289	7,39	Kab. Donggala, Tojo Una-una, Sigi	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal		3,60	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital		3	Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal		4,90	Kab. Sigi, Tojo Una-una	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal (km)		3	Kab. Sigi	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisawatan ke desa wisata di daerah tertinggal	20	10	Kab. Tojo Una-una (KSPN Toge-an-rommi dskt); Kab. Sigi (KSPN Lore Lindu dskt dan KSPN Lore Lindu dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal	44	1,77	Kab. Tojo Una-una, Donggala, Sigi	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan pemerintah daerah di daerah rawan konflik	Jumlah Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertentu Rawan Konflik	78	2,08	Kab. Donggala	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	42.046	630,69	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Pemberian Modal usaha bagi penduduk miskin dan rentan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif	225	2,50	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	53.673	434,75	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana			2	Kab. Sigi, Donggala	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian KUKM
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)		259,43	Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	1	7,50	Pulau Lingayan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Sulawesi Tengah (kecamatan)	3	12,10	Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	3		Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	3	0,432	Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Toli-Toli)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		4,97	Kab. Toli-Toli	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		6,60	Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	1	0,10	Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemea	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	63,7	301,57	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri



Sulawesi - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	221	39,99	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)	0	0,27	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	221	83,03	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	604	168,76	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Banggai, Parigi Moutong	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Morowali, Kab. Buol dan Kab. Poso	35.00; 67.00; 60.00	310,30	Kab. Morowali, Kab. Buol, dan Kab. Poso	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Poso dan Kab. Morowali	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Poso dan Kab. Morowali	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Poso dan Kab. Morowali	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Poso	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Buol	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)		1	Kab. Buol	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 29

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab. Morowali, Kab. Buol, dan Kab. Poso	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	15,86	Kab. Buol	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab. Morowali, Kab. Buol, dan Kab. Poso	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kaawasan)	1	8,62	Kab. Buol	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	3	120	Kab. Morowali, Kab. Buol, dan Kab. Poso	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	337.110	305	Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah	59,29	128,74	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	52,90	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	287,70	1,55	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Poso, dan Kab. Parigi Moutong	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	5	66,22	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	3	6,42	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	90	0,83	Kab. Sigi, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	287,70	0,82	Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Poso, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	90		Kab. Sigi, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi Moutong	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)			Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala		
Pembangunan Ruang SD dan Kelas Baru	Unit Sekolah Baru Yang dibangun		725,35	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin *indikasi pendanaan masih merupakan total di 34 provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat	10.000.000		Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala*	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan *indikasi pendanaan masih merupakan total di 11 Provinsi; 182 Kab/Kota	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Kartu Sembako Murah	4.847.877		Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala*	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial
Bantuan Sosial Bangunan Rumah Tidak Layak Huni *indikasi pendanaan masih merupakan total di 34 provinsi	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	6.000		Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala*	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	2	10	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi Sulawesi Tengah dukungan rehabilitasi rumah rusak berat	Jumlah Rumah Umum Layak Huni yang Difasilitasi Melalui Bantuan PSU Rumah Umum	2000	3.749	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pemberdayaan Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya	1000	2.100	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Pembangunan Baru)	Jumlah Rumah Swadaya yang Dibangun Baru	150	375	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Jamban/MCK Desa	Sistem Pengelolaan Air Limbah	25	21	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPAL Kawasan Huntep Tondo (7500 KK)	Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		13	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPAL Kawasan Huntep Petobo (2700 KK)	Jumlah rumah tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		97,22	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan TPA Sampah	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota yang terbangun		37,34	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM	Jumlah kapasitas produksi unit SPAM baru	120	3264,80	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Perbaikan Hilir Sungai Palu	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan (km)		20,64	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan Donggala	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana	4	7	Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik	1	2,50	Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Jalan Penanganan Jalan dampak bencana Palu	Panjang jalan yang dibangun (km)		1218,71	Sulawesi Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR (PHLN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rekonstruksi Jembatan Palu 4	Jembatan yang dibangun (lokasi)		325	Kota Palu	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR (PHLN)
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan Sulawesi Tengah	Jembatan yang dibangun (lokasi)		23,19	Kota Palu	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR (PHLN)
Rekonstruksi Gedung Anutapura Medical Centre (AMC) RSUD Anutapura			227,70	Kota Palu	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR (PHLN)
Rekonstruksi IAIN Palu	Rekonstruksi Kampus 1 IAIN		119,30	Kota Palu	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR (PHLN)
Pembangunan IPA New Pasigala	Terlayannya sistem penyediaan air minum untuk masyarakat terdampak bencana		100	Kabupaten Sigi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR (PHLN)
Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum	Terlayannya sistem penyediaan air minum untuk masyarakat terdampak bencana		301,80	Kota Palu, Kabupaten Sigi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR (PHLN)
Pengembangan Bandara Mutiara	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		245	Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		812	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		130,50	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani (PHLN)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Pelabuhan (lokasi)		101,50	Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub (PHLN)
Penyiapan/ penataan lokasi berjualan bagi pelaku usaha mikro, koperasi terdampak bencana	Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang direlokasi/ditempatkan beserta dukungan sarana tempat berjualan	150	2,50	Taman Kota Kaombona Palu		Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng
Peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan Koperasi terdampak bencana	Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang mendapatkan dukungan peralatan /modal kerja	50	7,50	Kota Palu		Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan Koperasi terdampak bencana	Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang mendapatkan pelatihan	150	2,50	Kota Palu		Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng
Pemulihan Sektor Transportasi	Persentase Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;	25	35,10	Wilayah Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah (Jembatan IV dan Jembatan V) serta wilayah hunian baru;	Persentase Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;		Wilayah Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	
Melaksanakan rehabilitasi prasarana terkait dengan akses masuk antara lain terminal, pelabuhan laut dan bandara udara beserta jaringan pendukungnya;	Persentase Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjangkau aspirasi masyarakat penerima manfaat;		Wilayah Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	
Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/ atau membangun fasilitas baru yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan.	Persentase Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang		Wilayah Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	
Melaksanakan pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap	Persentase infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap terbangun	25	7,52	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Sigi	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		21,08	Kabupaten Sigi		Pemerintah Kabupaten Sigi
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Donggala	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		4,80	Kabupaten Donggala		Pemerintah Kabupaten Donggala
Pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah	Terpulihkannya 5 sektor di 4 Kab/Kota pascabencana		6	Provinsi Sulawesi Tengah		Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,32				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	43,5				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	87				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	87				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	6.475				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	87				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	8				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Tengah	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.865				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	14	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 36

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	4,93			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 37

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	14	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat pengembangan kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dalam hal penerapan SPM di daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	43	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	16	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 38

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	14	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	14	0,331			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	13	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	14	0,74	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	14	0,16			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 39

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	14	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	14	0,16			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,84	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanian						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	337.110	305	Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Pertanian Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanian	Luas cakupan peta dasar pertanian (Ha)	275.632	4,16	Sulawesi Tengah	Program Pengelolaan Pertanian Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanian	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanian yang menerapkan pelayanan pertanian modern berbasis digital (satker)	12	32,10	Sulawesi Tengah	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 41

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sulawesi Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Sulawesi Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Sulawesi Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Selatan						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Pembangunan DPP Baru Toraja-Selayar-Makassar dan sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	>1				
Pengembangan Pelabuhan Makassar	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)	1 (selesai)	10.000	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	12 (selesai)	2.638,70	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	12 (selesai)	3.790,40	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Bandara Hasanuddin	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		250,00	Kota Makassar-Sulawesi Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Pembangunan Bandara Buntu Kunkik	Bandara baru yang dibangun (lokasi)		131,10	Sulawesi Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan PLTA Malea	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Kab. Tana Toraja		IPP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 42

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan PLTA Bakaru II	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	140		Kab. Pinrang		PLN
Pembangunan PLTA Poko	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)	130		Prov. Sulawesi Selatan		PLN
Pembangunan PLTMG Selayar II	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Kab. Kepulauan Selayar		PLN
Pembangunan PLTG/MG/GU/MGU Makassar	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Kota Makassar		PLN
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kota Makassar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat		Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Takalar	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Takalar	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumapua	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua / Sumapapua (1 unit)	operasi	1.001	Sulawesi Selatan (Kab. Barru/Kab. Pangkajene Kepulauan/Kab. Bantaeng/Kab. Gowa)		KPBU
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 43

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	575,40	45,79	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	1191,58	75,09	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Enrekang, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3643,09	18,89	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Enrekang, Kab. Luwu, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	693,83	18,89	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Janeponto, Kab. Takalar, Kab. Wajo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	382,01	18,89	Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Janeponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Bone, Kab. Wajo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan nikel	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 44

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Optimalisasi produksi nikel	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sulawesi Selatan, a.l: Kab. Bulukumba, Kab. Bone, Kab. Sinjai	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sulawesi Selatan, a.l: Kab. Takalar, kab. Wajo, Kab. Luwu	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata)				Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 45

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Sulawesi Selatan		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan		Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)	1 (selesai)	1.000	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Rel (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel	1 (selesai)	1.000	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota)	1	150	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Makassar Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (kota)	1 (selesai)	510	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Pelabuhan Makassar	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)	1 (selesai)	10.000	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo IV), Swasta
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	12 (selesai)	2.638,70	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	12 (selesai)	3.790,40	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 46

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Bandara Hasanuddin	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		250	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Sulawesi	Panjang jalan tol Mamminasata yang dibangun		6.000	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan		KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1046,50	1.850,21	Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	40	Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Mamminasata (lpd)		43,50	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		3,20	Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		960,61	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		590,63	Kota Makassar Kab Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 47

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		35,90	Kota Makassar, Kab Gowa, Kab Takalar, Kab Maros (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		826,47	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		227,80	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		8,94	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		251,46	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	13,48	WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Selatan)				Kota Pare-pare, Kota Palopo		
Pembangunan KA Makassar - Pare Pare (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	12	2.613,70	Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh, KPBU
Pembangunan KA Makassar - Pare Pare (APBN)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	12	3.790,40	Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh, KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		26,60	Kota Palopo, Kota Pare-Pare (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		153,78	Kota Palopo, Kota Pare-Pare (Provinsi Sulawesi Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		16,34	Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1043 desa berkembang;	507 desa mandiri			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 48

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	9,22				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	58,11	88	Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	66,13	358,84	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	8,90	DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	111	44,61	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 49

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	111	88,93	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 50

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (oran)	740	206,60	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Enrekang, Bone	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 51

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Luwu Timur dan Kab. Bone	50.00; 51.00; 57.00; 58.00	252,16	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Pinrang dan Kab. Bone	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Barru	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	27	4,01	Kab. Barru dan Kab.Luwu Timur	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	6	3,51	Kab. Barru dan Kab.Luwu Timur	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	4	3,37	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,72	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	4	160	Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu Timur, dan Kab.Bone	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 52

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	418.568	395	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	58,11	87,52	Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	45,13	Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,12	Kab. Wajo	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	37,84	Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	2,89	Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Luwu Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	307	1,51	Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,03	Kab. Wajo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	307		Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,32				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	43,50				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	87				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	87				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 53

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	6.475				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	87				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	8				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Selatan	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.457				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,6	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km ²)	2.800	98,4	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km ²)	2.800	72,50	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 54

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	25	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	25	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2	5,00			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 55

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	25	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 56

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	25	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	25	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	25	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	25	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	25	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	68%	1,21			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	25	0,27	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,6	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 57

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	25	0,71			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	24	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	25	0,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	25	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	25	0,29			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	25	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	25	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 58

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	25	0,29			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	25	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,60	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 59

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	418.568	395	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	233.306	4,43	Sulawesi Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	25	32,10	Sulawesi Selatan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Sulawesi Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	10	1,31	Sulawesi Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 60

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK/KSPN		1,80	Sekitar Kawasan Pariwisata Tana Toraja	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	10	0,91	Sulawesi Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,57	Sulawesi Selatan (KSN Pare Pare)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tenggara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Wakatobi	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Wakatobi	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Wakatobi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jalan Akses KSPN Wakatobi	Panjang jalan yang dibangun (km)	30	225,00	Sulawesi Tenggara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jembatan Kapota (wakatobi)	Jembatan yang dibangun (km)	1	250,00	Sulawesi Tenggara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		288,24	Sulawesi Tenggara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 61

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	3080,35	246,04	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3637,03	18,89	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	112,07	7,33	Kab. Kolaka Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1001,64	22,59	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Muna, Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	1470,80	18,89	Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan nikel	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Optimalisasi produksi nikel	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 62

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,1		Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,6		Provinsi Sulawesi Tenggara, a.l: Kab. Kolaka Utara, Kab. Buton Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Tenggara)				Kota Kendari		
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	311,50	550,73	Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		53,60	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		112,50	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		227,56	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		13,07	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		7,53	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 63

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1043 desa berkembang; 507 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	10,56				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	58,98	106,43	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	62,42	331,06	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi, DPP Wakatobi	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	16,01	DPP Wakatobi	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	175	44,84	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 64

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	175	80,02	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	646	180,40	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 65

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Buton, Kolaka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	NA; 52.00; 54.00	248,54	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Konawe Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Konawe Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Wakatobi	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Muna	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Muna	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 66

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	3	120	Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan Kab. Muna	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	213.099	233,70	Sulawesi Tenggara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	58,98	106,43	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	2	67,30	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	1.509,71	0,93	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	3	33,92	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	2	3,17	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	75	0,86	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	1.509,71	0,25	Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 67

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	75		Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan Kab. Konawe	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,32				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	43,50				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	87				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	87				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	6.475				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	87				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	8				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Tenggara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	823				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 68

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	18	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 69

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,3	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	100%	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 70

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	100%	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah	100%	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	18	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 71

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	1	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	18	0,62			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	17	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	18	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	18	0,20			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 72

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	18	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	18	0,20			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	18	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,19	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 73

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	4	2,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	213.099	233,70	Sulawesi Tenggara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	62913	1,01	Sulawesi Tenggara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	32,10	Sulawesi Tenggara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sulawesi Tenggara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 74

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis RDTR		2,00	Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Utara)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Sulawesi Tenggara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Sulawesi Tenggara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,74	Sulawesi Tenggara (KSN TN Rawa Aopa-Watumohai-Rawa Tinondo)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Gorontalo						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1006,68	23,20	Provinsi Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Kab. Goronralo Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	224,41	18,89	Provinsi Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	257,08	18,89	Provinsi Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Kab. Goronralo Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 75

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Gorontalo	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Gorontalo	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Gorontalo)				Kota Gorontalo		
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	147	259,90	Provinsi Gorontalo	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		6,80	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		129,63	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		18,61	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		2,94	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		10,25	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	856	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1043 desa berkembang; 507 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 76

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	21,04				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	65,80	93,84	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Gorontalo	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Gorontalo (kecamatan)	1	2,52	Kec. Anggrek		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desanya dibangun (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	1		Kec. Anggrek		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan		0,22	Kec. Anggrek	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 77

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		2,20	Kec. Anggrek	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	1	0,10	Kec. Anggrek	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pengembangan Pelabuhan Anggrek	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan		259,57	Kec. Anggrek	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	66,35	99,23	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	224	11,04	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	224	18,02	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	216	60,19	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 78

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Boalemo, Gorontalo, Pohuwato	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo Utara	NA; NA; 58.00	331,48	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab.Gorontalo Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab.Gorontalo Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab.Gorontalo Utara	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab.Gorontalo Utara	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	344	163,76	Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	6	3,51	Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 79

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	3	120	Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan Kab.Gorontalo Utara	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	55.608	55,60	Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo	65,80	93,84	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1 SP	45,87	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	787 Ha	0,94	Kab. Gorontalo	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	4 Kawasan	40,67	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1 Kawasan	5,54	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,69	Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	787 Ha	0,13	Kab. Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,32				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 80

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	43,5				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	87				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	87				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	6.475				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	87				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	8				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Gorontalo	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	521				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 81

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	7	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	4,93			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 82

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	7	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 83

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	24	0,20			
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 84

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	7	0,442			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	6	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	7	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	7	0,08			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	7	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	7	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 85

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	7	0,08			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	7	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,74	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 86

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	55.608	55,60	Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	5.439	0,10	Gorontalo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	7	32,10	Gorontalo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Gorontalo	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	1,31	Gorontalo	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	7	0,91	Gorontalo	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,57	Gorontalo (KSN Gorontalo-Paguyuman-Kwandang)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 87

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Provinsi Sulawesi Barat						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	269,37	17,09	Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamasa	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	539,47	43,35	Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	797,61	18,32	Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju, Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Pasangkayu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Pasangkayu, Kab. Mamuju Tengah	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sulawesi Barat, a.l: Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 88

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sulawesi Barat	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sulawesi					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sulawesi Barat)				Mamuju (PKW)		
Pengembangan Pelabuhan Belang-Belang	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan		90	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh
Jalan penghubung lintas (tapalang-mambi)			120	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan akses pelabuhan Belang Belang	Panjang jalan dibangun/dipelihara (Km)		60	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	161	284,65	Provinsi Sulawesi Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan TPA Baru	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		36,93	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		3,10	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun		97,70	Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Polri
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1043 desa berkembang; 507 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	7,39				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	72,62	79,91	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDPT 2. Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 89

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	63,90	69,30	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	168	10,91	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,21	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	168	21,56	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (desa)	95	26,57	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,62	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,27	Majene, Mamasa, Polewali Mandar	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	4	0,60	Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamasa	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 90

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah	54.00; 50.00	1.189,48	Kab. Mamuju	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 6. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 7. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Mamuju	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Mamuju	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Mamuju	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan (unit)	2	3	Kab. Mamuju	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan (ton)	2.000	58,80	Kab. Mamuju	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit (dosis)	1.239.877,50	1.000,23	Kab. Mamuju	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Mamuju Tengah	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,40	Kab. Mamuju	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1	Kab. Mamuju	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 91

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	95.761	86,50	Sulawesi Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat	72,62	79,91	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	53,76	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,53	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	21,60	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,18	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,73	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,11	Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 92

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang Kayu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,32				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	43,50				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	87				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	87				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	6.475				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	87				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	8				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sulawesi Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	594				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 93

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	7	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 94

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	4,93			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 95

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	7	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	7	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Penerapan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan PATEN	24	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	36%	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 96

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	7	0,41			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	6	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	7	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	7	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	7	0,08			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	7	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	7	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 97

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	7	0,08			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	7	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,51	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sulawesi - 98

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	95.761	86,50	Sulawesi Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	36.996	0,70	Sulawesi Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	32,10	Sulawesi Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sulawesi Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	6	1,31	Sulawesi Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	6	0,91	Sulawesi Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

5. PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

5.1. Target Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Target Pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06	5,06	5,10	5,50	5,90	6,70	7,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,77	7,49	6,43	6,15	5,75	5,15	4,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,26	4,45	4,00	3,70	3,60	3,10	2,80
Kalimantan Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,64	6,40	5,80	6,10	6,40	6,70	6,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,17	4,98	4,75	4,44	4,19	3,85	3,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,01	4,10	3,70	3,70	3,60	3,30	3,20
Kalimantan Selatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	3,90	3,90	4,50	4,80	5,60	6,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,54	4,55	4,20	4,00	3,75	3,24	2,80
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	4,31	4,20	4,00	3,90	3,40	3,10
Kalimantan Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	5,60	5,80	6,70	7,10	8,00	8,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	5,94	5,58	5,25	4,66	4,11	3,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,60	6,09	6,20	6,00	5,80	5,40	5,10
Kalimantan Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,04	6,70	6,70	7,10	7,40	7,80	8,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,09	6,63	5,85	5,44	4,85	4,41	4,04
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,22	4,40	4,60	4,40	4,30	3,80	3,50

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan: 1. Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

2. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Kalimantan, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Kalimantan 2020-2024

Provinsi	Kebutuhan Investasi	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	Rp triliun	63,81	70,29	79,01	87,79	98,45	111,05	127,78
Kalimantan Tengah	Rp triliun	56,74	62,86	69,57	77,81	87,89	99,38	114,37
Kalimantan Selatan	Rp triliun	39,05	42,50	46,09	50,38	55,20	60,85	68,41
Kalimantan Timur	Rp triliun	174,70	188,95	212,55	249,79	287,30	332,56	396,73
Kalimantan Utara	Rp triliun	29,84	33,49	40,93	46,15	52,26	59,26	68,69

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan: 1) Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

2) Investasi di Kalimantan Timur belum termasuk perkiraan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara.

5.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan melalui: (1) penyiapan dan penyusunan rencana induk (masterplan) secara terpadu yang mengutamakan nilai-nilai sosial budaya bangsa; tata ruang dan lahan, daya dukung lingkungan, dan pertahanan dan keamanan; serta mempertimbangkan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (2) pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pembangkit listrik, sumber air bersih dan air baku, waduk dan bendungan; (3) pembangunan Istana Negara, gedung parlemen dan lembaga tinggi negara, pusat-pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan perumahan bagi ASN, TNI dan Polri; (4) pengembangan tata kelola Ibu Kota yang bersih, hijau, cerdas dan berkelanjutan; (5) pengembangan dan perluasan kerjasama dan kemitraan pemerintah dan badan usaha dalam investasi dan pembiayaan pembangunan perkotaan; serta (6) perluasan kerjasama dan kemitraan internasional dalam pengembangan perkotaan.

Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan pada tahun 2020-2024 yaitu (1) hilirisasi pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; (2) penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir; (3) pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur; (4) percepatan pembangunan kawasan perbatasan; serta, (5) pelestarian kawasan hutan dan daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*).

Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan tersebut akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Kalimantan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Kalimantan Barat	1	Kota Pontianak*	Kalimantan Selatan	1	Kabupaten Barito Kuala
	2	Kabupaten Kubu Raya		2	Kota Banjarmasin
	3	Kabupaten Ketapang		3	Kabupaten Banjar
Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Lamandau		4	Kota Banjar Baru
	2	Kabupaten Kotawaringin Timur		5	Kabupaten Tanah Laut
	3	Kabupaten Katingan		6	Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Timur	4	Kota Palangkaraya*		7	Kabupaten Kota Baru
	1	Kota Balikpapan*	Kalimantan Utara	1	Kota Tarakan*
	2	Kota Samarinda*			
	3	Kabupaten Kutai Kartanegara			
4	Kabupaten Penajam Paser Utara				
Koridor Pemerataan					
Kalimantan Utara	1	Kabupaten Malinau	Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Kotawaringin Barat
	2	Kabupaten Nunukan		2	Kabupaten Pulang Pisau
	3	Kabupaten Bulungan		3	Kabupaten Seruyan
	4	Kabupaten Tana Tidung	1	Kabupaten Sambas	
Kalimantan Timur	1	Kabupaten Paser	Kalimantan Barat	2	Kota Singkawang*
	2	Kabupaten Kutai Barat		3	Kabupaten Bengkayang
	3	Kabupaten Kutai Timur		4	Kabupaten Landak
	4	Kabupaten Bontang		5	Kabupaten Mempawah
	5	Kabupaten Berau			

Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Kalimantan akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

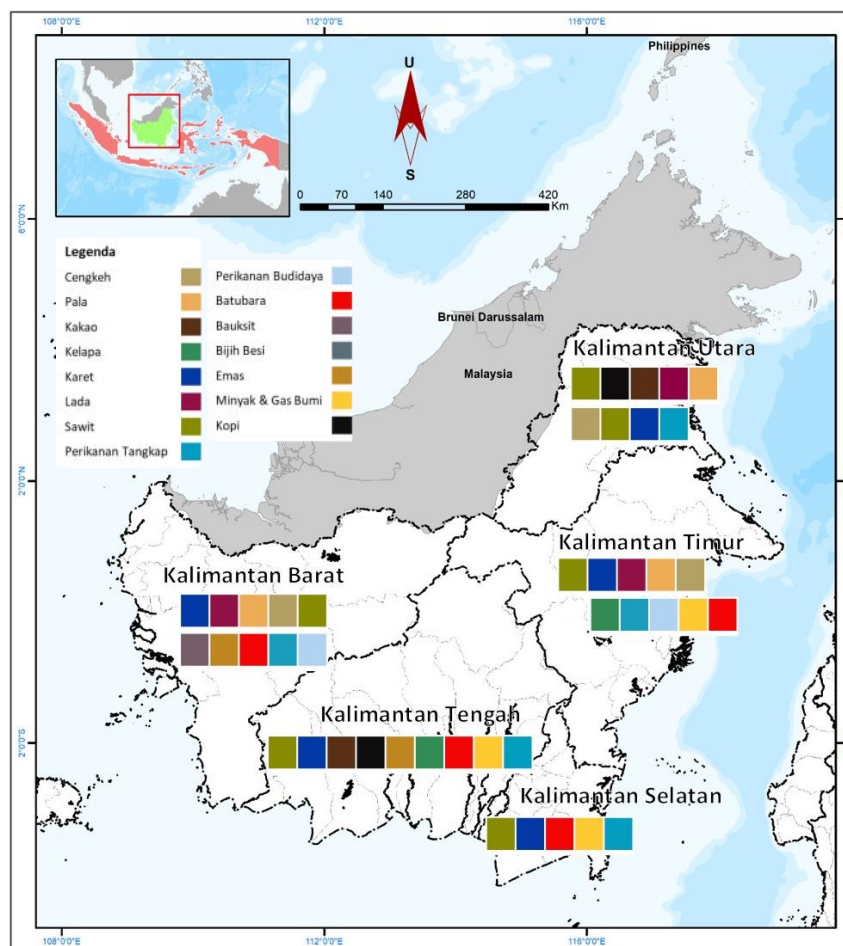
5.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antaran lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi, gas bumi, batubara, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas antara lain:
 - a. Provinsi Kalimantan Barat: karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap, perikanan budidaya, bauksit, emas, dan batu bara;

- b. Provinsi Kalimantan Tengah: kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, emas, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya;
 - c. Provinsi Kalimantan Selatan: kelapa sawit, karet, batubara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - d. Provinsi Kalimantan Timur: kelapa sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya minyak dan gas bumi serta batubara; dan
 - e. Provinsi Kalimantan Utara: kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh dan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- 2) Pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP yaitu SKPT Sebatik, WPP 711 (berlokasi di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan), WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa), WPP 713 (berlokasi di Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 716 (berlokasi di Laut Sulawesi dan utara Pulau Halmahera);
 - 3) Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) antara lain KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Berau, KPPN Kutai Timur, KPPN Kubu Raya, KPPN Mempawah, KPPN Bengkayang, KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Nunukan, dan KPPN Sambas.

Gambar 5.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Kalimantan





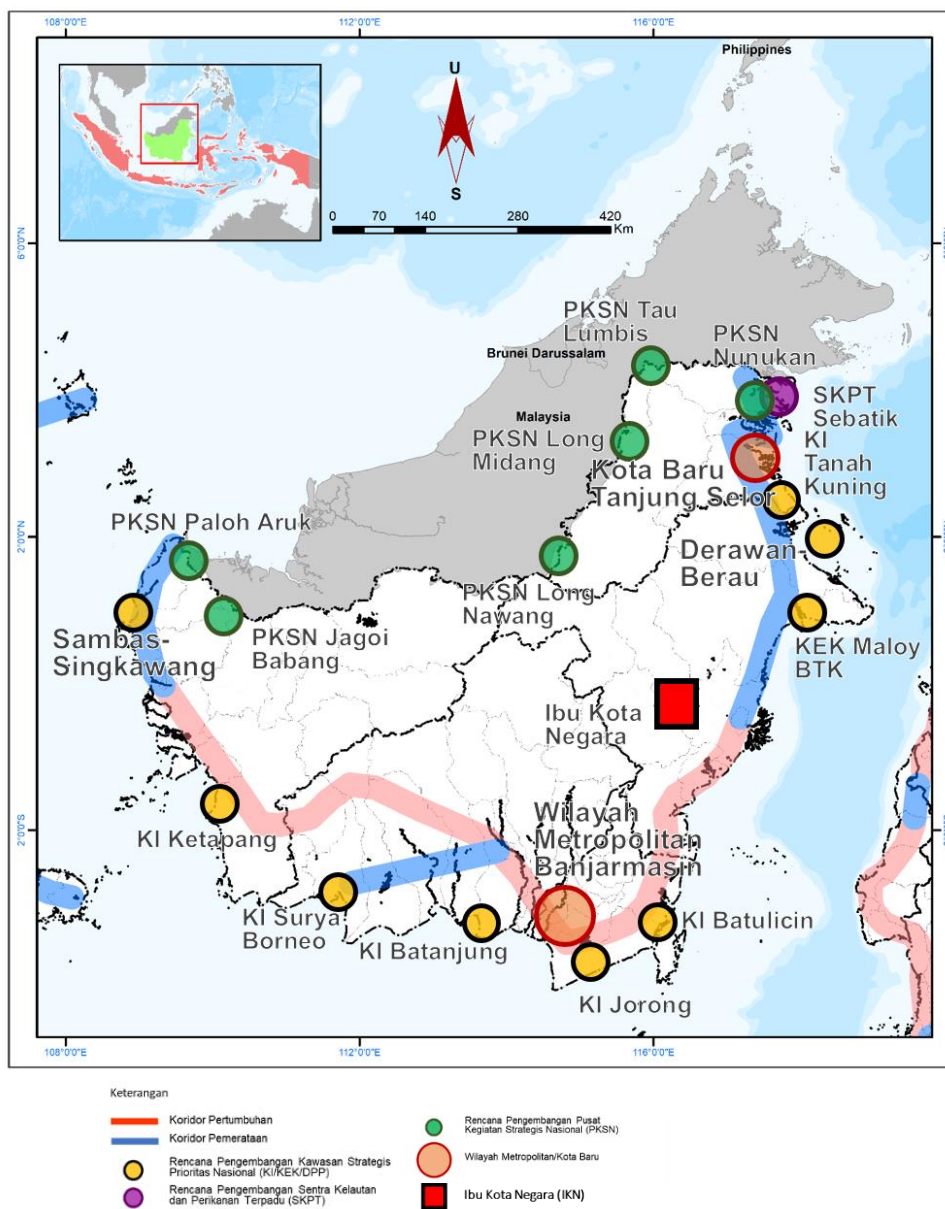
- 5 -

5.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) antara lain KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu KEK MBTK;
- 2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah antara lain DPP Baru Sambas - Singkawang, dan DPP Baru Derawan-Berau;
- 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Trans Kalimantan, serta jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam, Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan Pelabuhan Pelaihari, Pembangunan Pelabuhan Hub Kijing, Pelabuhan Tanah Kuning, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Selor, Bandara Baru Murung Raya, Bandara Baru Singkawang, Bandara Baru Ketapang Baru, Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN; dan
- 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
- 5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - a. pengembangan SMK di wilayah Kalimantan secara keseluruhan berjumlah 204 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.
 - b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 38 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Tambang di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, Makanan dan Minuman di Kalimantan Selatan, Otomotif di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Perkapalan di Kalimantan Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
 - c. pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 35 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh pertanian, buruh konstruksi gedung dan manajer umum (perdagangan).
 - d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Kalimantan.

Gambar 5.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Kalimantan

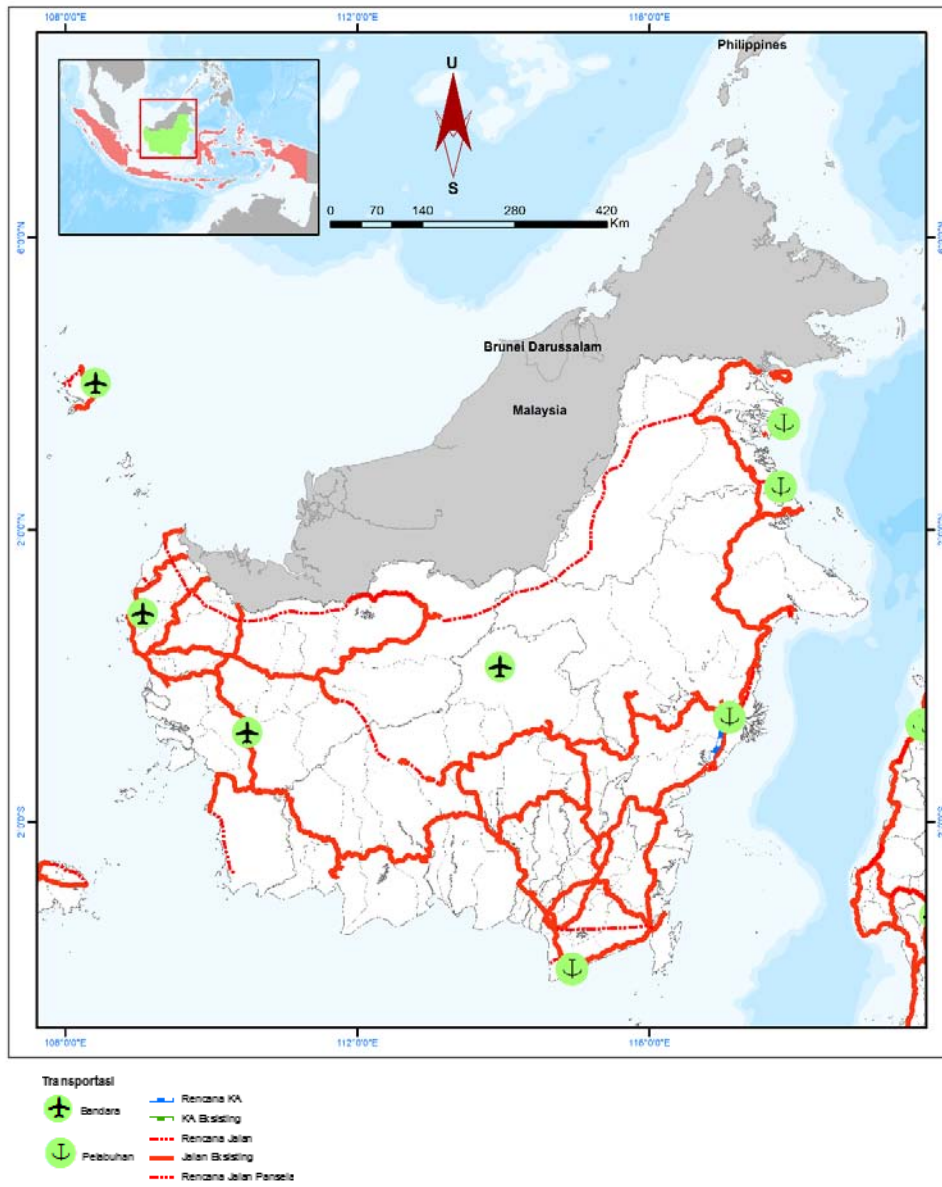




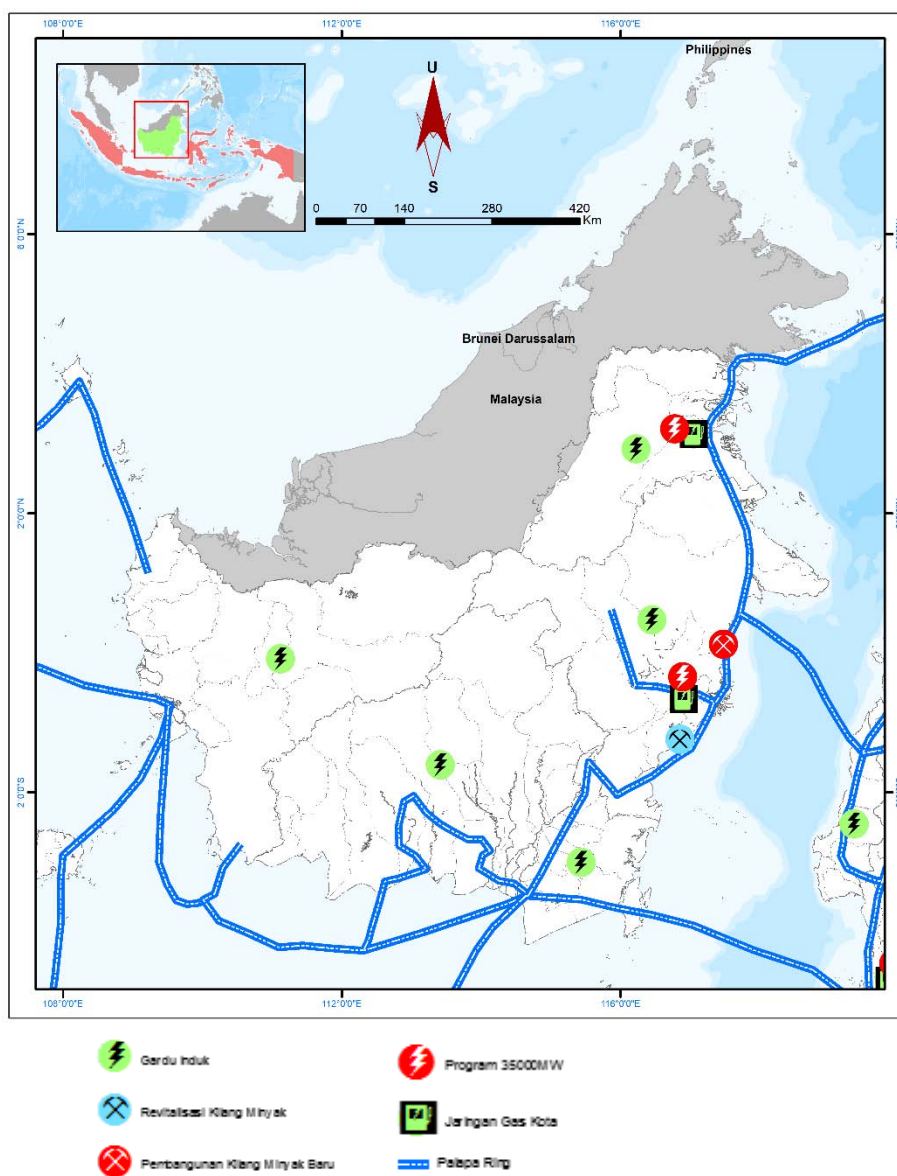
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

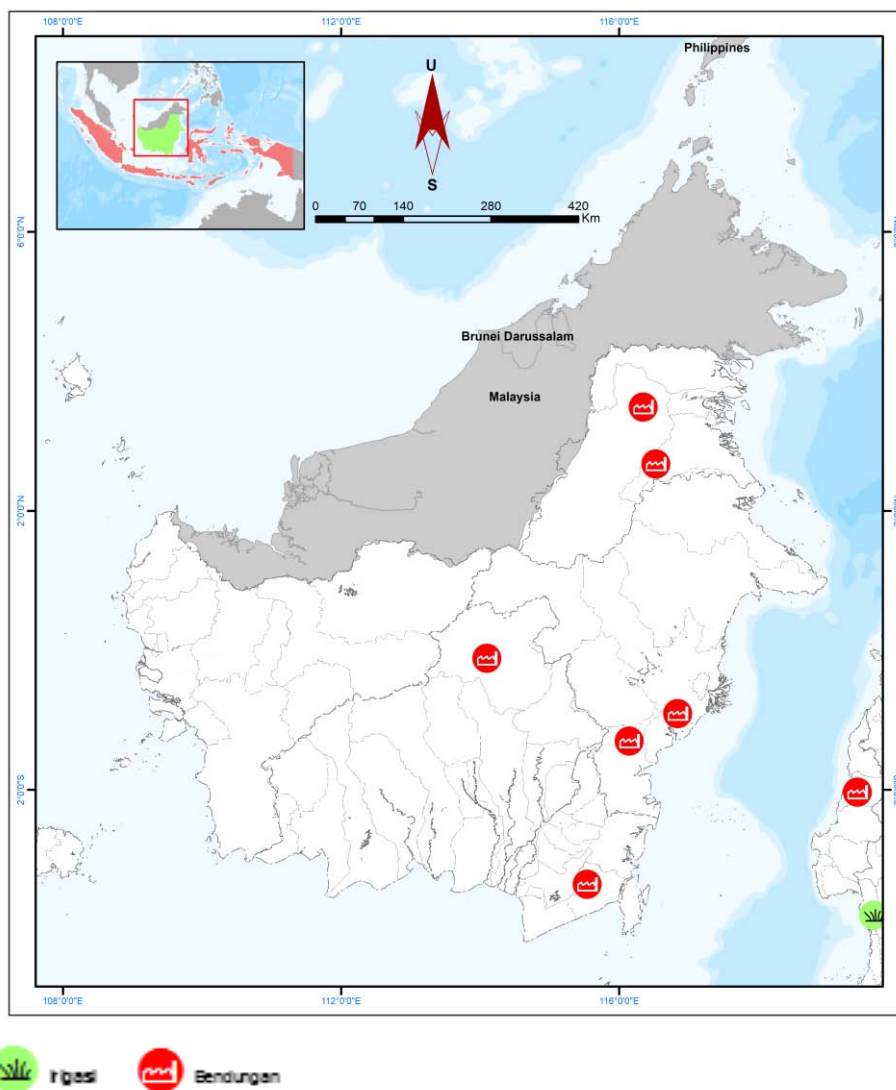
Gambar 5.3.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Transportasi Wilayah Kalimantan



Gambar 5.4.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Kalimantan Tahun 2024



Gambar 5.5.
Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah Kalimantan Tahun 2024



5.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan perkotaan di WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang, Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan (Tabel 5.3);
- 2) Pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan
- 3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.



- 10 -

5.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 - 2022), yang mana untuk Pulau Kalimantan berlokasi di 12 kabupaten yaitu Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas di Provinsi Kalimantan Barat; Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan; Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah; Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur; dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara;
- 3) Revitalisasi kawasan transmigrasi di antara lain Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas, Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau, Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser, Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur, dan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala;
- 4) Pengembangan ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN antara lain PKSN Long Nawang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang.
- 5) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Barat, 3 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Timur, dan 20 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Utara;
- 6) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan pada tahun 2023;
- 7) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai



- 11 -

target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,23 persen di Provinsi Kalimantan Barat, 3,5 persen di Provinsi Kalimantan Tengah, 4,44 persen di Provinsi Kalimantan Utara, 4,24 persen di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3,04 persen di Provinsi Kalimantan Selatan; dan

- 8) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan wilayah timur Pulau Kalimantan;
 - b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan
 - c. Peningkatan konservasi hutan.

5.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut

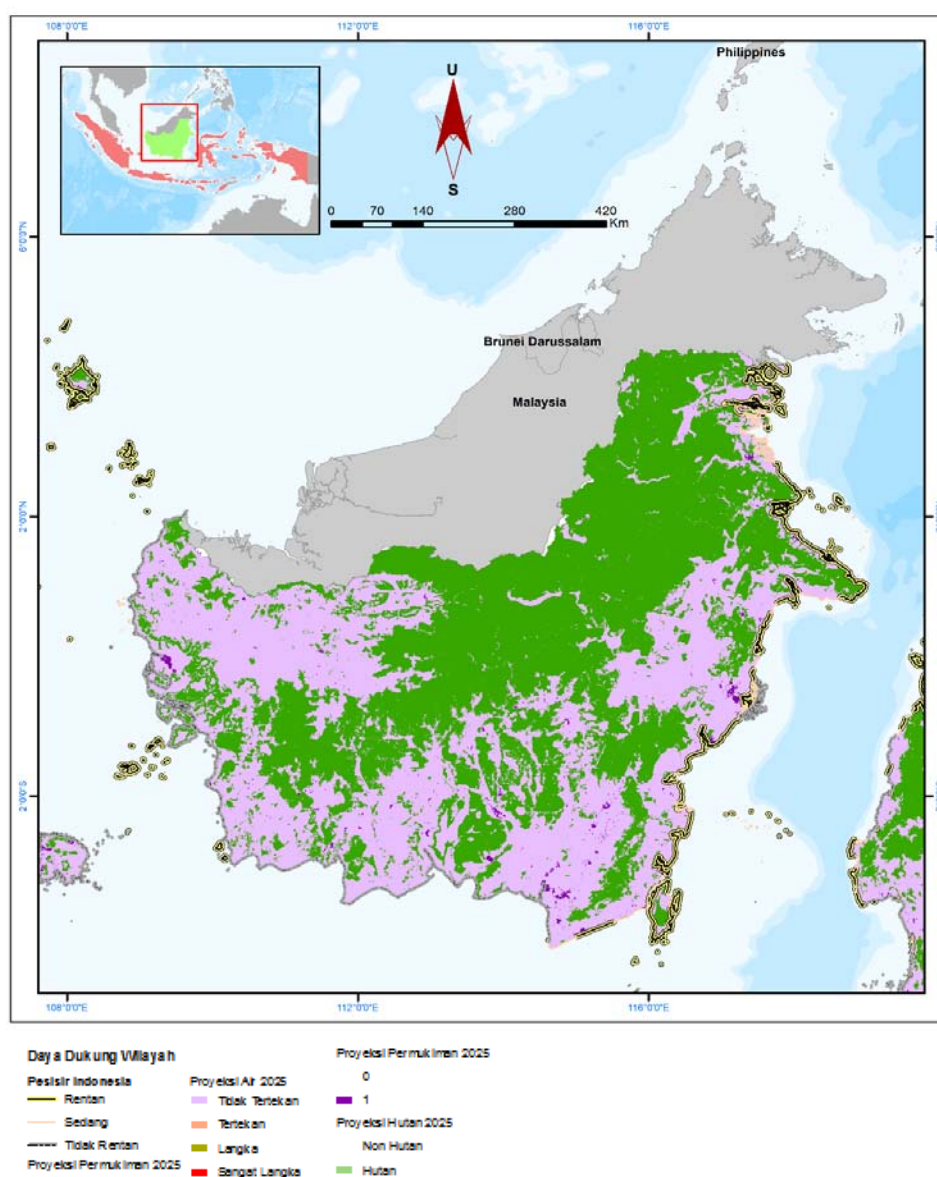
- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan hutan, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 9) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 10) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Mahakam Ulu);
- 11) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau);
- 12) Penataan ruang dan lahan, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;



- 12 -

- d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - h. Pembentukan bank tanah;
 - i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 13) Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim:
- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
 - b. Peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan;
 - c. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
 - d. Peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
 - e. Peningkatan penanganan abrasi pantai di daerah kepulauan, dan konservasi hutan.
- 14) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
- a. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
 - b. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - c. Pengembangan energi baru terbarukan;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
 - e. Penegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan wisata;
 - g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan
 - h. Optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Gambar 5.6.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Kalimantan Tahun 2025



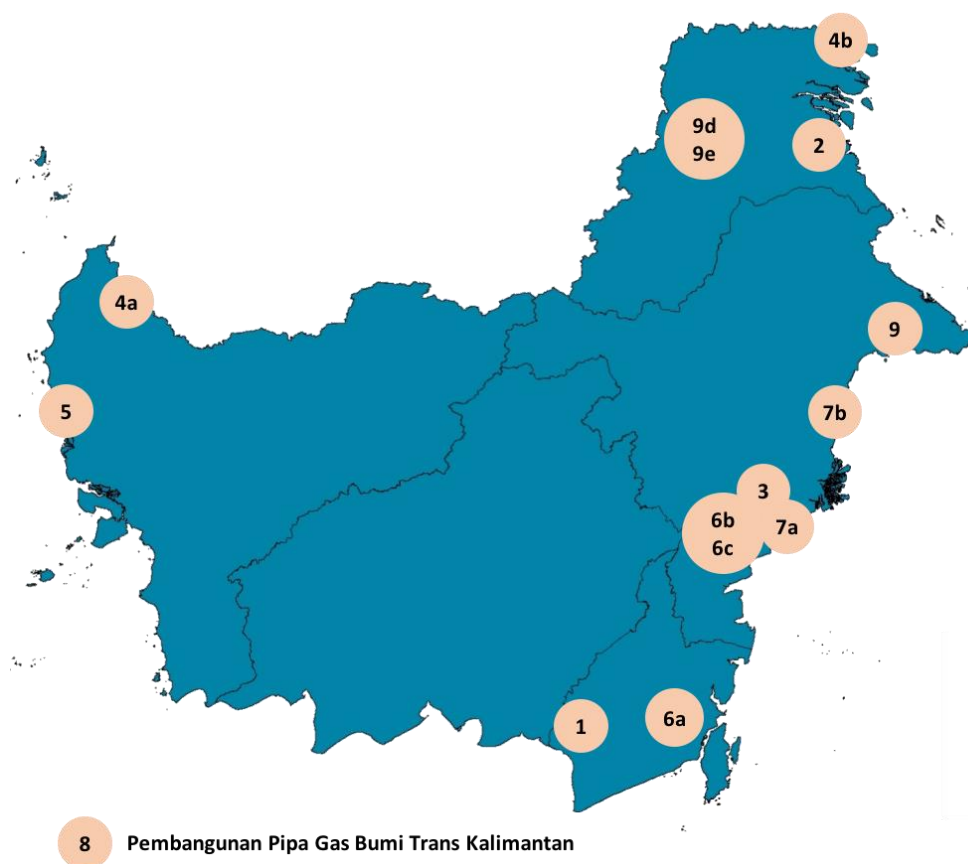
5.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Kalimantan

Selain penjabaran strategi pembangunan Wilayah Kalimantan, maka untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Wilayah Kalimantan, dalam kurun waktu 2020-2024 akan dilaksanakan *Major Project* sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin;
- 2) Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor;
- 3) Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);

- 4) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Paloh-Aruk dan (b) PKSN Nunukan;
- 5) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kijing;
- 6) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kusan, (b) Lembakan, (c) Sepaku Semoi, (d) Kayan, (e) Mentarang;
- 7) (a) Revitalisasi Kilang Minyak Balikpapan dan (b) Pembangunan Kilang Baru Bontang;
- 8) Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan; dan
- 9) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Kalimantan Timur.

Gambar 5.7.
Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Kalimantan



Kalimantan - 1

Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU KALIMANTAN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PP 4: Pembangunan Wilayah Kalimantan	Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan (persen/tahun)	5,37	303.849,82			
	Share PDRB Wilayah Kalimantan (persen)	8,22				
	IPM Wilayah Kalimantan	71,22-79,25				
	Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (persen)	3,29				
Provinsi Kalimantan Barat						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	>1				
Pengembangan Pelabuhan Kijing	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Kijing (lokasi)	1 (selesai)	12.500	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh, BUMN (Pelindo II), Swasta
Jalan Akses KI Ketapang	Panjang jalan yang dibangun (km)	12	123	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		76	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenuh
Pembangunan Terminal Nanga Badau	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		60	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenuh



Kalimantan - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1 (selesai)	50	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	250	Kalimantan Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan	Panjang jalan yang dibangun (km)		10	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Ketapang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembangunan DPP Baru Sambas-Singkawang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	>1				
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.000	Kalimantan Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jembatan Sambas Besar	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	1.860	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku DPP Sambas-Singkawang	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)	0,03	9,75	Kab. Sambas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	617,31	25,60	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	3199,44	68,99	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kubu Raya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Akselerasi Replanting dan Penerapan	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan bauksit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Optimalisasi produksi bauksit	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat					
Optimalisasi produksi batu bara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan					



Kalimantan - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Barat)				Kota Pontianak, Kota Singkawang		
Pembangunan Bandara Singkawang-Kalbar	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.000	Kota Singkawang (lingkup pelayanan), Provinsi Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalteng - Kalbar	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)	407,20		Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat		BU
Jembatan Kapuas 3	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	300	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	602	1.064,34	Provinsi Kalimantan Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		512,17	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		263,31	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		18,20	Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi Kalimantan Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		502,87	Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi Kalimantan Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		75,85	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		14,77	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1460 desa berkembang; 232 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					



Kalimantan - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,51				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5,78				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	65,30	56,63	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Kalimantan Barat (kecamatan)	14	4,89	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desanya dibangun (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah



Kalimantan - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	14		Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	0,29	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		4,40	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM



Kalimantan - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec. Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec. Puring Kencana	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh-Aruk	0,52	277	Kab. Sambas		
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1		Kab. Sambas	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Kementerian Perindustrian
Jalan perbatasan Kalbar	Panjang jalan yang dibangun (km)		98,40	Kalimantan Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah (unit) PLTS Roof Top yang dibangun		2,20	Kab. Sambas	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,10	Kab. Sambas	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)		76	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1	50	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan

Kalimantan - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	1	3,20	Kab. Sambas	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Sambas	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Pengembangan Area Sentra Industri Lada	Luas Area kawasan industri lada yang dikembangkan (Ha)	500	4	Kab. Sambas	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	jumlah kabupaten yang dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya	1		Kab. Sambas	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Kementerian Perindustrian
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	7	2,35	Kab. Sambas	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang	0,39	115	Kab. Bengkayang		
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya (ha)	85	6,90	Kab. Bengkayang	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	1 (selesai)	50	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	4	Kab. Bengkayang	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Jaringan Air baku yang dibangun/ditingkatkan	Total debit air baku yang dihasilkan (m3/det)	0,19	47,65	Kab. Bengkayang	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kab. Bengkayang	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Bengkayang	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM



Kalimantan - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	3	0,30	Kab. Bengkayang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	3	1,01	Kab. Bengkayang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	59,18	311,57	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	812	39,13	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penguatan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	812	75,83	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	669	186,72	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



Kalimantan - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Ketapang, Sambas, Sintang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang dan Sambas	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang dan Kab. Sambas	53.00; 47.00; NA; 45.00	192,45	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	10	2,59	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	1	1,29	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	4	3,37	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	15,86	Kab.Kubu Raya	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,72	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	1	8,62	Kab.Kubu Raya	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	4	160	Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan Kab. Mempawah	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM

Kalimantan - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	929.571	210,47	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Kotawaringin Barat	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	65,30	56,63	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	24,59	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,61	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	27,84	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,02	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,33	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,23	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,35				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	42,8				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	61				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	61				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4.411				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	61				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	6				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.445				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

Kalimantan - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	15	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	15	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,22			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	15	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	15	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	15	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	15	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	15	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	15	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	266,77			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	15	0,27	Pusat	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)			Kab. Ketapang	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	15	0,60			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	14	0,31	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	15	0,55	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	15	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	15	0,17			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	15	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	15	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	15	0,17			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	15	0,22	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,21	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	2	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanian						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	929.571	210,47	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Pertanian Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanian	Luas cakupan peta dasar pertanian (Ha)	952.995	0,73	Kalimantan Barat	Program Pengelolaan Pertanian Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanian	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	32,09	Kalimantan Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kalimantan Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

Kalimantan - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	1,31	Kalimantan Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	7	0,91	Kalimantan Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Tengah						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	>1				
Jalan Akses KI Surya Borneo	Panjang jalan yang dibangun (km)	1	10	Kalimantan Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Surya Borneo	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batangjung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	>1				
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batangjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (selesai)	3.001,44	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Batangjung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR



Kalimantan - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	780,02	35,41	Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Kapuas, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	368,70	29,30	Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	2806,99	177,66	Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	1.501,82	34,19	Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kapuas, Kab. Sukamara, Kab. Seruyan, Kab. Pulang Pisau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan

Kalimantan - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)			Kab. Murung Raya	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Tengah, a.l: Kab. Kotawaringin barat, Kab. Kapuas, Kab. Sukamara, Kab. Seruyan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Tengah)				Kota Palangkaraya		
Jembatan Kahayan 2	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1	300	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalsel-Kaltim	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (km)	76,80		Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah		BU
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalteng - Kalbar	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (km)	407,20		Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah		BU

Kalimantan - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	354	624,99	Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		162,28	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		4,20	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1460 desa berkembang; 232 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	1,98				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	30,30	35,69	Kab. Lamandau	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	62,63	225,02	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	392	29,52	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



Kalimantan - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	392	54,23	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	470	131,38	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

Kalimantan - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Kotawaringin Barat	65	79,17	Kab. Kotawaringin Barat	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian EDM
Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar	Jumlah unit alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit)	125	1,09	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	31	4,03	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	34	19,04	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengadaan moda sarana pemasaran	Jumlah unit moda sarana pemasaran yang terbangun (unit)	3	0,66	Kab. Kotawaringin Barat	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1	13,33	Kab. Kotawaringin Barat	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Kotawaringin Barat	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Kotawaringin Barat	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	308.506	166,38	Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

Kalimantan - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah	30,30	35,69	Kab. Lamandau	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDPT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	20,99	Kab. Lamandau	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	200	0,11	Kab. Lamandau	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Lamandau	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		1,83	Kab. Lamandau	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,30	Kab. Lamandau	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	200	0,13	Kab. Lamandau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Lamandau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,35				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	42,80				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	61				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	61				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4.411				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	61				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	6				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Tengah	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.254,29				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		18,94	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		42,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



Kalimantan - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	15	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	15	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	4,93			

Kalimantan - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	15	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	15	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	15	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	15	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 29

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	15	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	15	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	43	224,40			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	15	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	15	0,58			

Kalimantan - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	14	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	15	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	15	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	15	0,17			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	15	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	15	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	15	0,17			

Kalimantan - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	15	0,22	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	17,41	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	308.506	166,38	Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	315.400	3,63	Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	15	32,09	Kalimantan Tengah	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kalimantan Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Kalimantan Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/ Kota	8	0,91	Kalimantan Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Selatan						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				

Kalimantan - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Batulicin	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Selatan	>1				
Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		45	Kalimantan Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuhub
Jalan Akses KI Batu Licin	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	60	Kalimantan Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Batulicin	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Tanah Bumbu	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Jorong	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Selatan	>1				
Jalan Akses Bandara Samsodien Noer	Panjang jalan yang dibangun (km)		20	Kalimantan Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Akses KI Jorong	Panjang jalan yang dibangun (km)	6	60	Kalimantan Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Jorong	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Tanah Laut	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan					

Kalimantan - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, kab. Tanah Bumbu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	783	35,41	Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai, Kab. Tabalong, Kab. Balangan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan gas	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Selatan, a.l: Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula)	Share PDRB ADHB Metropolitan Terhadap Wilayah Pulau, Indeks Kota Berkelanjutan *)	6,40	4.813,53	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri



Kalimantan - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Pipa gas Bumi Kaltim - Kalsel	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (km)	208,80	36.400	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Selatan)		BU
Pembangunan Pipa gas Bumi Kalsel-Kaltim	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (km)	76,80		Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan		BU
Pengembangan sistem angkutan umum perkotaan berbasis jalan	Sistem angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenuh
Jalan Akses Bandara Samsuedin Noer	Panjang jalan yang dibangun (km)		20	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (selesai)	3.001,44	Kota Banjarmasin, Kab. Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh, Pemda, KPBU, Badan Usaha
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	581	1.027,21	Provinsi Kalimantan Selatan (WM Banjarmasin)	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	50	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		3,20	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		243,06	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		34,30	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		192,11	Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala (Provinsi Kalimantan Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD

Kalimantan - 36

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		22,39	Kab Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		1,93	Kab Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		37,14	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	17,86	WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1460 desa berkembang; 232 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	2,25				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	75,03	40,93	Kab. Barito Kuala	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	63,75	297,27	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	479	38,18	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



Kalimantan - 37

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	479	78,58	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	611	170,78	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

Kalimantan - 38

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	72.00; 62.00	287,46	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Banjar	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Banjar	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Banjar	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	344	163,76	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	6	3,51	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

Kalimantan - 39

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	247.829	181,81	Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Selatan	75,03	40,93	Kab. Barito Kuala	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDPT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	25,87	Kab. Barito Kuala	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,24	Kab. Barito Kuala	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Barito Kuala	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	0,96	Kab. Barito Kuala	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		1,45	Kab. Barito Kuala	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDPT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,09	Kab. Barito Kuala	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Barito Kuala	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,35				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	42,80				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	61				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	61				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4.410,69				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	61				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	6				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Selatan	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.236,72				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km ²)	2.800	79,46	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km ²)	2.800	30,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG

Kalimantan - 41

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	14	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 42

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2	3,93			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	5	1,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,89			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	14	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 43

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	14	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	14	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 44

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	14	0,55			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	13	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	14	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	14	0,16			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	14	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	14	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 45

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	14	0,16			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	14	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	17,75	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 46

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	247.829	181,81	Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	15.760	0,70	Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	14	32,09	Kalimantan Selatan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kalimantan Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Kalimantan Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

Kalimantan - 47

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Kalimantan Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Timur						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Pembangunan DPP Baru Derawan-Berau	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur	>1				
Pengembangan Bandara Kalimarau	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		28,40	Kalimantan Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuhub
Pengembangan Bandara Maratua	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		75	Kalimantan Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Derawan-Berau	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kab. Berau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur	>1				
Pengembangan Pelabuhan Maloy	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		40,50	Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuhub
Pengembangan Bandara Tanjung Bara	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	80	Kalimantan Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuhub

Kalimantan - 48

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Malay Batuta Trans Kalimantan	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kab. Kutai Timur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Kalimantan (1 unit) (tahapan pembangunan)		1.001	Kalimantan Timur (Kab. Kutai Timur/Kab. Kutai Kartanegara)		KPBU
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur					
Akselerasi Replanting dan Penerapan	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	378,32	15,49	Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	2.847,48	61,78	Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	207,64	4,27	Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 49

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur					
Optimalisasi produksi minyak bumi	jumlah produksi (barell)			Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)			Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan					
ProP : Pembangunan Ibu Kota Negara			466.040,50	Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara		
Komponen Proyek K/L Non Fisik			917,60			
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RUU tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN)		3	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Setneg, Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Revisi UU 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (Pencabutan UU DKI Jakarta yang disahkan)		2	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Setneg, Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RPP/Raperpres tentang Insentif untuk Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota Negara yang disusun		2	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Setkab

Kalimantan - 50

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	RPP/Raperpres tentang Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara (PNBP-earmarking, KPBU, Pengelolaan Aset)		2	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Setkab
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Revisi UU 27 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan		2	Pusat		Kementerian PPN/Bappenas, Setneg, Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Penyusunan peta jalan dan kebijakan pemindahan ASN ke IKN (Dokumen Peta Jalan)		2	Pusat	Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN/RB
Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibukota Negara	Kebijakan insentif ASN yang berdampak pada pemindahan IKN (Kebijakan)		2	Pusat		Kementerian PAN/RB
Penyiapan Kelembagaan Ibukota Negara	Raperpres Badan Otorita		2	Pusat	Program Perencanaan Pembangunan Nasional II	Kementerian PPN/Bappenas, Setkab, Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kementerian Keuangan
Perencanaan Ibukota Negara	Strategi Komunikasi dan Kegiatan Public Hearing sebagai sarana sosialisasi dan penampungan aspirasi bagi Penyusunan Rencana Pemindahan Ibukota Negara yang dilaksanakan		100	Pusat	Program Perencanaan Pembangunan Nasional II	Kementerian PPN/Bappenas, KSP, SKP, Kementerian Kominfo
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Masterplan yang disusun (Masterplan IKN, Detail Masterplan & Skematik, Siteplan & Skematik Bangunan, serta Skematik Infrastruktur Dasar)		100	Pusat	Program Perencanaan Pembangunan Nasional II	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN

Kalimantan - 51

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Rencana Tata Ruang yang diselesaikan: - Revisi RTR Pulau (Matek PK) - Revisi RTRW Kaltim(Matek dan Raperda) - Revisi RTRW Kukar (Matek dan Raperda) - Revisi RTRW PPU(Matek dan Raperda) - Revisi RTR Pulau (Matek dan Raperpres) - RTR KSN IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Pemerintahan IKN (Matek dan Raperpres) - RDTR Pusat Kegiatan Ekonomi IKN (Matek dan Raperpres) - Revisi RTRWN (Matek dan RPP) - RDTR BWK I (Matek dan Raperpres) - RDTR BWK II (Matek dan Raperpres)		26,80	Pusat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Perencanaan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang disusun		6	Pusat	Program Perencanaan Pembangunan Nasional V	KLHK, Kementerian PPN/Bappenas
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 5600 Ha		2	Pusat	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kementerian PUPR
Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan Ibukota Negara	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan, AMDAL, dan DED untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang disusun		41	Pusat	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kementerian PUPR
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Luas Kawasan IKN yang Dinventarisasi dan Verifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (Ha)		36,40	Provinsi Kalimantan Timur	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	KLHK
Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN (dokumen)		12,20	Pusat	Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	KLHK dan Bappenas
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)	1.500	137,40	Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	KLHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 52

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Luas Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi lokasi IKN) (Ha)	1.200	95,20	Provinsi Kalimantan Timur	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	KLHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN (Ha)		43,70	Provinsi Kalimantan Timur	Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	KLHK
Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim Skala 1:5000	Jumlah Kabupaten yang dibuat peta dasar skala 1:5000		8,87	Ibu Kota Negara	Informasi Geospasial Dasar	BIG
Lanjutan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di dalam Kawasan Hutan di kawasan Perluasan IKN	Luas lahan yang diinventarisasi kegiatan P4T di kawasan hutan di kawasan perluasan IKN (Hektar)		4,50	Ibu Kota Negara	Infrastruktur Keagrariaan	Kementerian ATR/BPN
Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Transportasi	Tersusunnya dokumen perencanaan transportasi di IKN (Masterplan, FS, DED)		30	Ibu Kota Negara	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kementerian Perhubungan
Mobilisasi ASN, TNI dan POLRI ke Ibu Kota Negara baru	Terlaksananya Pergeseran Personel Polri dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara (orang)		256,55	Ibu Kota Negara	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	SSDM Polri
Komponen Proyek K/L Fisik			465.122,90			
Komponen Proyek KPBU			252.460			
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Gedung Pemerintahan		32.275	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Sarana Pendukung		12.505	Ibu Kota Negara		KPBU Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Listrik		87.312	Ibu Kota Negara		KPBU Kementerian ESDM & Badan Usaha

Kalimantan - 53

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut di IKN	Pengembangan Terminal, Pengembangan dan Rehabilitasi Dermaga; Subsidi Operasional, Penetapan TTS (Traffic Separation Scheme); Pengembangan VTS, SBNP, Telkompel & Fasilitas Lainnya)		1.075	Provinsi Kalimantan Timur	Pembangunan Transportasi Laut	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian di IKN	Pembangunan Stasiun, Kereta Api Subway, KRL, Jalur KA; Pengadaan Kereta Listrik		34.086	Ibu Kota Negara	Pembangunan Transportasi Perkeretaapian	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat di IKN	Pembangunan Terminal dan Pembangunan Halte, BRT, ITS, Kelengkapan Jalan, Bus Air, Pelabuhan Penyebrangan		1.597	Provinsi Kalimantan Timur	Pembangunan Transportasi Darat	KPBU Kementerian Perhubungan & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di kawasan IKN	Terbangunnya jalan dan jembatan (Jalan Nasional (Tol) 57 km, Jalan Nasional (Non Tol) 898 km, Fasilitas Pejalan Kaki 955km, Lajur Sepeda 468 km, Rel Kereta 72 km)		4.315	Ibu Kota Negara	Bina Marga	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Jalan Tol Kalimantan	Panjang Jalan Tol Balikpapan-Jembatan Penajam yang dibangun (km)		477	Provinsi Kalimantan Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di kawasan IKN	Tersedianya kebutuhan air baku sesuai standar 225lt/hr/orang (m3/detik)	4,21	7.836	Ibu Kota Negara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di kawasan IKN	Terbangunnya infrastruktur Permukiman (pengendali banjir, drainase, sanitasi, dan infrastruktur energi)		19.475	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum & Badan Usaha
Penyediaan Perumahan Umum (KPBU)	Penyediaan Perumahan		51.507	Ibu Kota Negara		KPBU Kementerian Pekerjaan Umum & Badan Usaha
Komponen Proyek Swasta Murni/BUMN/BUMD			123.229,88			

Kalimantan - 54

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Infrastruktur Transportasi Udara penunjang IKN	Pengembangan Bandar Udara Sepinggan dan AAP Samarinda		5.766,88	Ibu Kota Negara	Pembangunan Transportasi Udara	PT Angkasa Pura & Badan Usaha Swasta
Penyediaan Perumahan Umum (Badan Usaha Milik Negara/Swasta Murni)	Penyediaan Perumahan		113.479	Ibu Kota Negara		BUMN dan Badan Usaha Swasta
Penyediaan Sarana Kesehatan	Pembangunan sarana kesehatan swasta		1.320	Ibu Kota Negara		Badan Usaha Swasta
Penyediaan Sarana Pendidikan	Pembangunan Perguruan Tinggi & Lembaga Pendidikan Swasta		1.664	Ibu Kota Negara		Badan Usaha Swasta
Penyediaan Sarana Pendukung Kota	Pembangunan RTH (Termasuk Science Techno Park)		1.000	Ibu Kota Negara		Badan Usaha Swasta
Komponen Proyek APBN			89.433			
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Terbangunnya jalan akses ke lokasi IKN		8.000	Ibu Kota Negara	Bina Marga	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Terbangunnya ruang terbuka hijau		2.000	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Istana Kepresidenan		480	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Kodam Khusus Ibu Kota & SAT BKO		7.000	Ibu Kota Negara	Perencanaan dan Penganggaran Mabes TNI	Mabes TNI
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Fasilitas TNI AD		2.250	Ibu Kota Negara	Perencanaan dan Penganggaran TNI AD	TNI AD
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Fasilitas TNI AL		6.000	Ibu Kota Negara	Perencanaan dan Penganggaran TNI AL	TNI AL
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Fasilitas TNI AU		10.000	Ibu Kota Negara	Perencanaan dan Penganggaran TNI AU	TNI AU
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Infrastruktur POLRI		7.352	Ibu Kota Negara	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Slog Polri
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Penyediaan Perumahan Bagi VIP/Eselon I Setara		1.000	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Penyediaan Hunian Dinas		36.791	Ibu Kota Negara	Cipta Karya	
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pencadangan Tanah Akses Infrastruktur dan Kawasan Inti		8.000	Ibu Kota Negara		
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pencadangan Tanah Diplomatic Compound		110	Ibu Kota Negara		

Kalimantan - 55

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Infrastruktur di kawasan IKN	Pembangunan Infrastruktur Transportasi		450	Ibu Kota Negara		
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Timur)				Kota Balikpapan, Kota Samarinda		
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Kalimantan Timur		KPBU
Pembangunan Pipa gas Bumi Kaltim - Kalsel	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (km)	208,80	36.400	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)		BU
Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		200	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Pembangunan Jalur KA Trans Kalimantan (Balikpapan - Samarinda)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	20 (selesai)	450	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batanjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (selesai)	3.001,44	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU, Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Kariangau (Balikpapan)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	100	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Palaran (Samarinda)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	100	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Garongkong-Kariangau	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	1 (selesai)	30	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Kalimantan	Panjang jalan tol Samarinda-Bontang yang dibangun (km)		10.000	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Badan Usaha

Kalimantan - 56

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Jalan Lingkar Samarinda	Panjang jalan yang terbangun (km)	3,89	372,96	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Akses dan Jembatan Pulau Balang	Jembatan yang dibangun (lokasi)		549,33	Kota Balikpapan - Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	462	816,82	Provinsi Kalimantan Timur	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		1.921,23	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		421,88	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		104,80	Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		617,26	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		97,25	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		6,36	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1460 desa berkembang; 232 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	6,00				

Kalimantan - 57

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	58,89	68,38	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
	Penduduk miskin di daerah tertinggal Rata-rata IPM di daerah tertinggal					
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Kalimantan Timur (kecamatan)	3	5,99	Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desanya dibangun (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	3		Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	0,288	Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM

Kalimantan - 58

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		4,4	Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: PPKT Provinsi Kalimantan Timur (Kab. Berau)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		1,31	Kab. Berau	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	63,01	145,36	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara, DPP Baru Derawan-Berau	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	7,12	DPP Baru Derawan-Berau	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	169	17,72	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	169	33,73	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	276	77,05	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

Kalimantan - 59

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Penajam Paser Utara, Kutai Barat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	Indikator Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Berau dan Kab. Kutai Timur	53.00; 64.00	123,19	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Berau	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Berau	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun			Kab. Berau	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Kutai Timur	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT

Kalimantan - 60

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	672.476	742,64	Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur	58,89	68,38	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	2	41,22	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	24,58	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		1,83	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	500	0,75	Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	500		Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,35				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	42,8				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	61				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	61				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 61

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4.410,69				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	61				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	6				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Timur	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	108				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		18,94	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		42,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 62

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	4,93			

Kalimantan - 63

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 64

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	11	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	63	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 65

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	11	0,42			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	11	0,31	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	11	0,12			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	11	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 66

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	11	0,12			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	11	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,81	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 67

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	672.476	742,64	Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	678.868	1,45	Kalimantan Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	32,09	Kalimantan Timur	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Kalimantan Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Kalimantan Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 68

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK/KSPN		1,80	Kawasan Pariwisata Derawan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Kalimantan Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Utara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanah Kuning	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Utara	>1				
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		70	Kalimantan Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning	Panjang jalan yang dibangun (km)	12,50	600	Kalimantan Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Internasional Juwata	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	150	Kalimantan Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Tanah Kuning	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m ³ /detik)		13	Kab. Bulungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara					

Kalimantan - 69

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Akselerasi Replanting dan Penerapan	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	112,55	7,33	Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	102,01	7,94	Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	1309,94	28,45	Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kalimantan Utara, a.l Kota Tarakan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Kalimantan					
ProP : Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor	Jumlah penduduk, indeks kota berkelanjutan *)	100.000		Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan		
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub

Kalimantan - 70

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	84	148,51	Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		2,10	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		80,17	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Bendungan baru yang dibangun	Jumlah bendungan baru yang sedang dibangun	1	30.000	Kab. Bulungan (Bendungan Kayan), Provinsi Kalimantan Utara		BUMN dan/atau Swasta
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun	0	97,70	Kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Polri
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Selor	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)		70	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		115	Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kalimantan Utara)				Kota Tarakan		
Pengembangan Bandara Internasional Juwata	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	150	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Provinsi Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Kalimantan Utara		KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		6,80	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	2.875,67	269,64	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)

Kalimantan - 71

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	1460 desa berkembang; 232 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,51				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	4,64				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	54,92	61,64	Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Kalimantan Utara (kecamatan)	20	84,51	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggis, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggis, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah



Kalimantan - 72

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggis, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggis, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggis, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggis, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah



Kalimantan - 73

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggirir, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	20		Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggirir, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggirir, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Nunukan)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)		16,27	Kab. Nunukan	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR



Kalimantan - 74

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		6,60	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggirir, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggirir, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	0,44	396	Kab. Nunukan		
Penanganan Jalan lingkar Nunukan	Panjang Jalan lingkar (km) yang dibangun/ditingkatkan		80	Kalimantan Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		16	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		8	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan Gudang-SRG yang Termanfaatkan	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya		9	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang Diberikan Pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	14,10	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan

Kalimantan - 75

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik	5	11,03	Kab. Nunukan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian KKP
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan			Kab. Nunukan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian KKP
BAKTI INTERNET	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun		2,40	Kab. Nunukan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Petani Go Online	Jumlah user aktif Petani yang mendaftar	250	0,08	Kab. Nunukan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Nelayan Go Online	Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar	250	0,08	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
UMKM Go Online	Jumlah User Aktif Selling UMKM	250	0,20	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo
Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Mansapa	Jumlah (unit) sarana prasarana industri pengolahan yang dibangun		247	Kab. Nunukan	KPBU	KPBU
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi/ kelompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pasca Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun		2	Kab. Nunukan	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
Koperasi/UKM sektor perikanan dan peternakan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya		1,80	Kab. Nunukan	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan UKM
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	15	5,03	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Fasilitasi Legislasi RDTR Nunukan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,50	Kab. Nunukan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 76

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	0,44	1952,58	Kab. Nunukan		
Jalan perbatasan Kaltara	Panjang jalan yang dibangun (km)	19	1933,34	Kab. Nunukan	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya (Ha)	80	7,43	Kab. Nunukan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		2,88	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kab. Nunukan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Nunukan	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	8	0,80	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	8	2,68	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis	0,44	18	Kab. Nunukan		
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya (Ha)	80	7,43	Kab. Nunukan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		2	Kab. Nunukan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4,00	Kab. Nunukan	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo

Kalimantan - 77

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Nunukan	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	8	0,8	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	8	2,68	Kab. Nunukan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang	0,69	18	Kab. Malinau		
Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas (ha) kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya (Ha)	80	7,43	Kab. Malinau	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		2	Kab. Malinau	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4,00	Kab. Malinau	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Malinau	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	8	0,80	Kab. Malinau	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	8	2,68	Kab. Malinau	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	51,88	75,92	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		7,69	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

Kalimantan - 78

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDPT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDPT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		17,54	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	147	40,95	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDPT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDPT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDPT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Malinau, Nunukan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDPT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Bulungan		43,08	Kab. Bulungan	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDPT 3. Kementerian ESDM

Kalimantan - 79

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	5	1,06	Kab. Bulungan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)		1	Kab. Bulungan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Bulungan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Bulungan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Bulungan	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	195.429	88,04	Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	54,92	61,64	Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	33,97	Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	2.318,06	1,14	Kab. Bulungan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	22,17	Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 80

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	3,27	Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,70	Kab. Bulungan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	2.318,06	0,39	Kab. Bulungan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bulungan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,35				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	42,8				
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	61				
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	61				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4.410,69				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	61				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	6				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					

Kalimantan - 81

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kalimantan Utara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	367				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah NLP peta dasar skala besar			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	6	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 82

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	4,93			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58				

Kalimantan - 83

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	6	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	6	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	6	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	6	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	6	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	1,67			

Kalimantan - 84

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	6	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	6	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	6	0,38			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	5	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	6	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Kalimantan - 85

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	6	0,06			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	6	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	6	0,06			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					

Kalimantan - 86

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,803	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	14,45	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	1	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	195.429	88	Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kalimantan - 87

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	143.579	1,45	Kalimantan Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	5	32,09	Kalimantan Utara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kalimantan Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	1,31	Kalimantan Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	0,91	Kalimantan Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

6. PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA

6.1 Target Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Target Pembangunan Wilayah Sumatera 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61	3,70	4,00	4,70	5,20	5,60	5,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,97	15,32	13,34	13,00	12,35	11,71	11,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,36	6,20	6,20	6,00	5,90	5,50	5,20
Sumatera Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,18	5,50	6,40	6,90	7,40	8,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,22	8,83	8,43	7,95	7,25	6,80	6,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,56	5,41	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Sumatera Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,00	5,00	5,50	5,80	6,00	6,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,65	6,42	5,94	5,46	5,13	4,85	4,55
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55	5,33	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,34	2,80	3,70	4,30	4,60	4,90	5,40
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,39	7,08	6,25	5,85	5,55	5,25	4,95
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,20	5,97	6,00	5,80	5,70	5,20	4,90
Jambi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,71	4,30	4,70	5,40	6,00	6,40	6,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,92	7,60	7,29	6,85	6,35	5,75	5,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86	4,19	3,70	3,50	3,40	2,90	2,60

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Selatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,04	5,40	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,8	12,71	11,55	10,95	10,45	10,05	9,38
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,23	4,48	4,00	3,80	3,60	3,20	2,90
Bengkulu	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	5,10	5,10	5,70	6,00	6,20	6,30
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,43	15,23	13,40	13,00	12,25	10,95	10,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,51	3,39	3,50	3,30	3,10	2,70	2,30
Lampung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,30	5,50	5,90	6,20	6,50	7,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,14	12,62	11,56	11,27	10,35	9,68	9,20
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,06	4,03	3,80	3,60	3,40	3,00	2,70
Kepulauan Bangka Belitung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45	3,60	3,90	4,60	5,10	5,50	5,80
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,25	4,62	4,40	4,16	3,85	3,35	3,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,65	3,62	3,30	3,10	3,00	2,50	2,20
Kepulauan Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	4,50	4,70	5,80	6,40	6,80	7,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,20	5,90	5,30	4,95	4,54	4,15	3,79
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,12	6,91	6,90	6,70	6,50	6,10	5,80

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020

Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sumatera, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sumatera 2020-2024

Provinsi	Kebutuhan Investasi	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Rp triliun	66,28	64,12	82,90	89,39	97,16	105,84	121,49
Sumatera Utara	Rp triliun	224,16	242,90	269,70	296,68	329,17	366,63	431,45
Sumatera Barat	Rp triliun	66,47	70,89	83,41	90,60	99,22	109,70	122,24
Riau	Rp triliun	201,26	226,57	242,31	262,79	292,28	318,99	359,70
Jambi	Rp triliun	41,74	42,92	49,77	54,30	60,12	66,78	75,64
Sumatera Selatan	Rp triliun	173,16	177,13	199,90	220,02	244,14	271,15	309,00
Bengkulu	Rp triliun	26,06	28,54	31,81	34,75	38,80	42,92	48,31
Lampung	Rp triliun	100,48	109,49	120,71	131,84	147,70	164,12	186,17
Kepulauan Bangka Belitung	Rp triliun	15,98	15,51	19,30	20,96	23,24	25,71	28,52
Kepulauan Riau	Rp triliun	92,77	99,21	110,37	120,47	135,45	151,95	171,03

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

6.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan wilayah Sumatera dilakukan akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Sumatera

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Aceh	1	Kota Sabang*	Jambi	1	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2	Kota Banda Aceh*		2	Kabupaten Muaro Jambi
	3	Kabupaten Aceh Besar		3	Kota Jambi*
	4	Kabupaten Pidie	Sumatera Selatan	1	Kabupaten Musi Banyuasin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
	5	Kabupaten Pidie Jaya		2	Kabupaten Banyuasin
	6	Kabupaten Bireuen		3	Kota Palembang
	7	Kota Lhoksumawe*		4	Kabupaten Ogan Komerling Ilir
	8	Kabupaten Aceh Utara		5	Kabupaten Ogan Hilir
	9	Kabupaten Aceh Timur		6	Kabupaten Muara Enim
	10	Kota Langsa*		7	Kota Prabumulih*
	11	Kabupaten Aceh Tamiang		8	Kabupaten Empat Lawang
Sumatera Utara	1	Kabupaten Langkat		9	Kabupaten Lahat
	2	Kota Binjai		10	Kabupaten Musi Rawas
	3	Kota Medan		11	Kota Lubuk Linggau*
	4	Kabupaten Deli Serdang		Bengkulu	1
	5	Kabupaten Karo	2		Kabupaten Kepahiang
	6	Kabupaten Serdang Bedagai	3		Kabupaten Bengkulu Tengah
	7	Kabupaten Batubara	4		Kota Bengkulu*
	8	Kabupaten Simalungun	Lampung	1	Kabupaten Tulangbawang
	9	Kota Tanjung Balai		2	Kabupaten Lampung Tengah
	10	Kabupaten Asahan		3	Kota Metro
	11	Kabupaten Labuhan Batu Utara		4	Kabupaten Lampung Selatan
	12	Kabupaten Labuhan Batu		5	Kota Bandar Lampung*
	13	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		6	Kabupaten Pesawaran
Sumatera Barat	1	Kabupaten Lima Puluh Koto	Bangka Belitung	7	Kabupaten Lampung Timur
	2	Kota Payakumbuh		1	Kabupaten Bangka Barat
	3	Kabupaten Agam		2	Kabupaten Bangka
	4	Kota Bukittinggi*	3	Kota Pangkal Pinang*	
	5	Kota Padang Panjang	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Karimun
	6	Kabupaten Padang Pariaman		2	Kota Batam
	7	Kota Padang*		3	Kabupaten Bintan
8	Kabupaten Rokan Hilir	4		Kota Tanjung Pinang*	
Riau	2	Kota Dumai*			
Riau	3	Kabupaten Bengkalis			
	4	Kabupaten Siak			
	5	Kota Pekanbaru*			
	6	Kabupaten Pelalawan			
	7	Kabupaten Indragiri Hulu			
	8	Kabupaten Kampar			
Koridor Pemerataan					
Aceh	1	Kabupaten Aceh Tengah	Bengkulu	1	Kabupaten Mukomuko
	2	Kabupaten Aceh Barat		2	Kabupaten Bengkulu Utara
	3	Kabupaten Bener Meriah		3	Kabupaten Bengkulu

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
					Selatan
	4	Kabupaten Nagan Raya		4	Kabupaten Seluma
	5	Kabupaten Simeulue		5	Kabupaten Kaur
Sumatera Utara	1	Kota Pematang Siantar*	Lampung	1	Kabupaten Lampung Utara
	2	Kabupaten Samosir		2	Kabupaten Pringsewu
	3	Kabupaten Toba Samosir		3	Kabupaten Tanggamus
	4	Kabupaten Dairi		4	Kabupaten Lampung Barat
	5	Kabupaten Phakphak Barat		5	Kabupaten Pesisir Barat
	6	Kabupaten Hubang Hasundutan	Bangka Belitung	1	Kabupaten Bangka Tengah
	7	Kabupaten Tapanuli Utara		2	Kabupaten Bangka Selatan
	8	Kabupaten Tapanuli Tengah		3	Kabupaten Belitung
	9	Kota Sibolga*		4	Kabupaten Belitung Timur
	10	Kota Gunung Sitoli*	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Kepulauan Anambas
	11	Kabupaten Nias		2	Kabupaten Natuna
	12	Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Barat	1	Kabupaten Tanah Datar
	13	Kabupaten Nias Barat		2	Kabupaten Solok
	14	Kabupaten Nias Utara		3	Kota Solok*
Jambi	1	Kabupaten Serolangun		4	Kabupaten Pesisir Selatan
	2	Kabupaten Bungo		5	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	3	Kabupaten Batang Hari			
	4	Kabupaten Tebo			
	5	Kabupaten Merangin			
	6	Kabupaten Kerinci			
	7	Kota Sungai Penuh			

Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sumatera akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

6.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao,

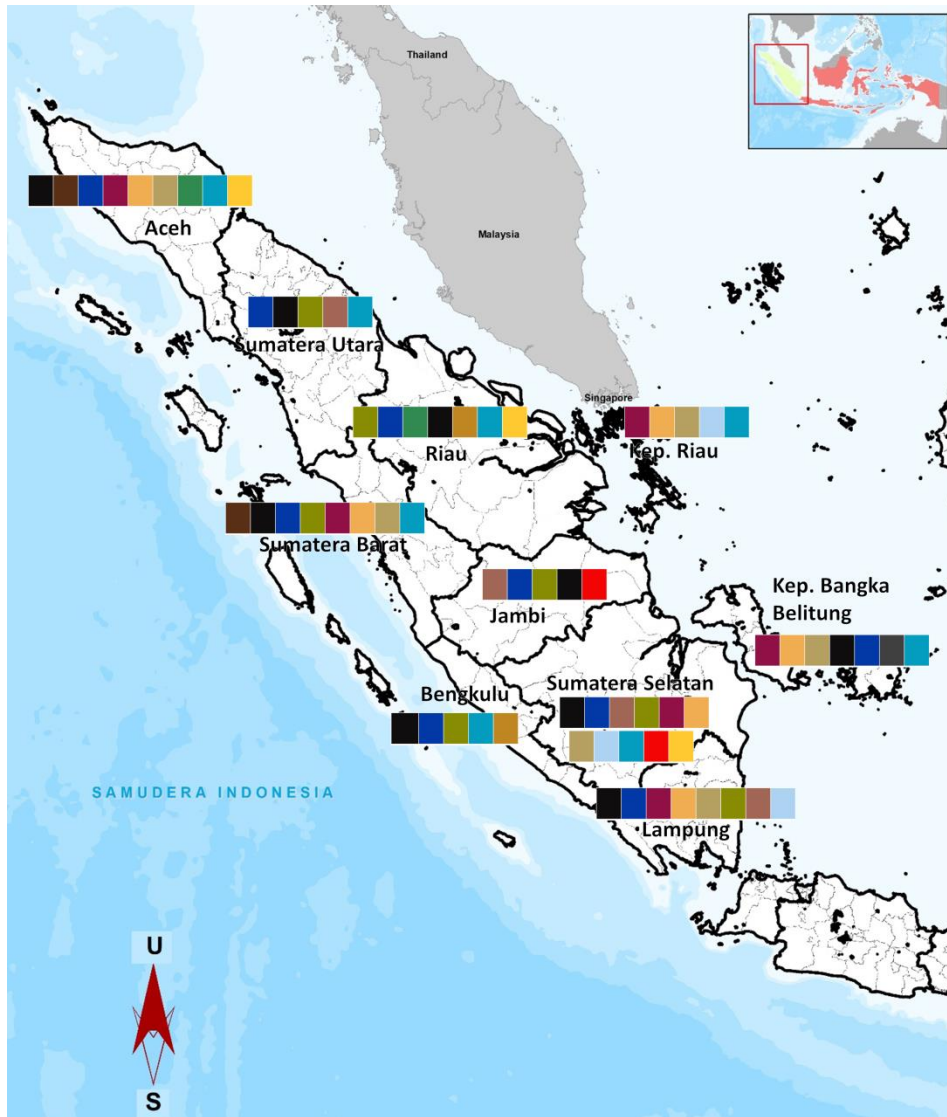


- 6 -

kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya, yang difokuskan pada:

- a. Provinsi Aceh: kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap dan budidaya, dan minyak dan gas bumi;
 - b. Provinsi Sumatera Utara: karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - c. Provinsi Sumatera Barat: kakao, kopi, karet, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - d. Provinsi Riau: kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi;
 - e. Provinsi Jambi: tebu, karet, kelapa sawit, kopi, perikanan budidaya, dan batubara;
 - f. Provinsi Sumatera Selatan: kopi, karet, tebu, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya, batubara, minyak bumi, dan gas bumi;
 - g. Provinsi Bengkulu: kopi, karet, kelapa sawit, perikanan budidaya, dan emas;
 - h. Provinsi Lampung: kopi, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - i. Provinsi Bangka Belitung: lada, pala, cengkeh, karet, kopi, timah, dan perikanan tangkap; dan
 - j. Provinsi Kepulauan Riau: lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap.
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
 - 3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Mentawai, WPP 571 (di Selat Malaka dan Laut Andaman) dan WPP 572 (di Samudera Hindia Barat Sumatera dan Selat Sunda);
 - 4) Pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Gayo Lues

Gambar 6.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Sumatera



Legenda

Kakao		
Karet		
Kelapa		
Kopi		
Lada		
Pala		
Sawit		
Tebu		



- 8 -

6.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

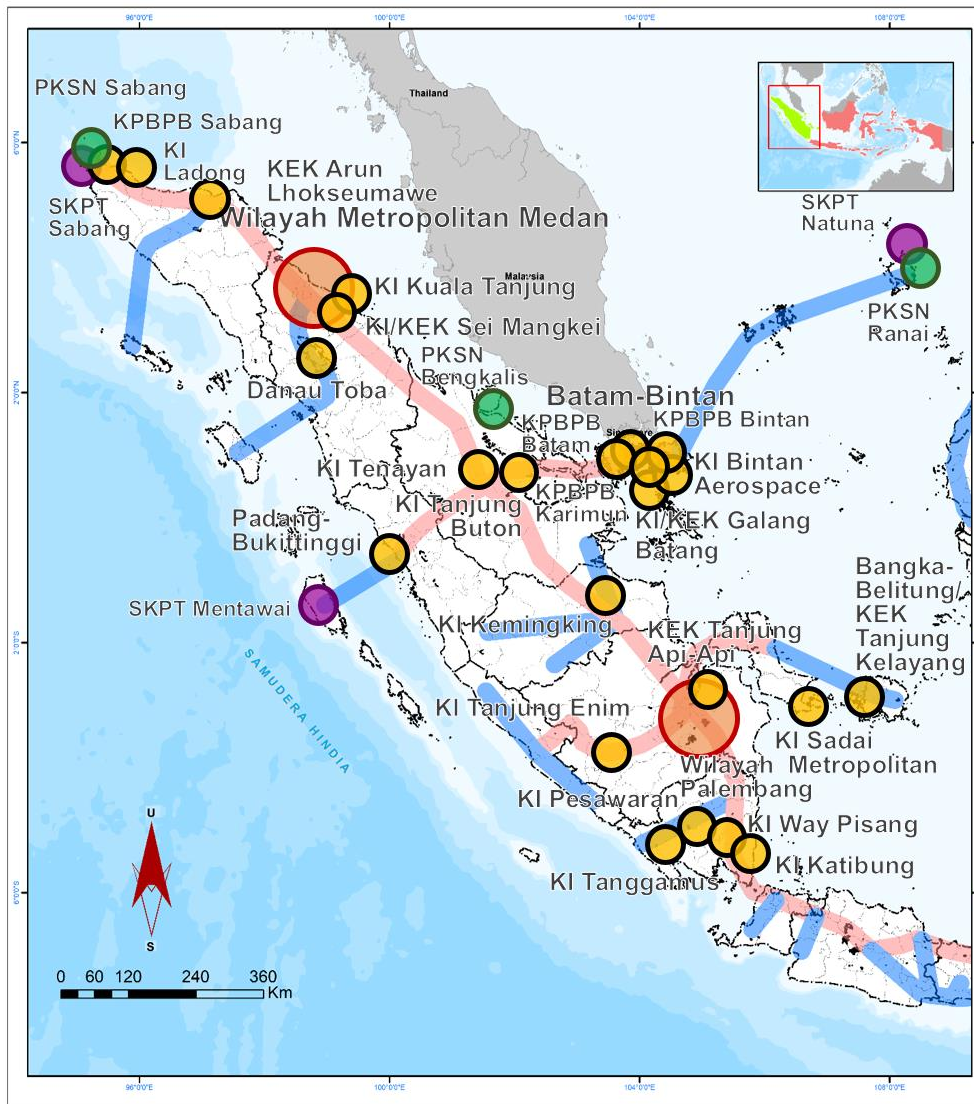
- 1) Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan, di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai serta Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galang Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam-Bintan-Karimun, dan KPBPB Sabang;
- 2) Pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Danau Toba, DPP Baru Padang-Bukittinggi, DPP Baru Batam-Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang;
- 3) Pengembangan industri kedirgantaraan di Batam dan Bintan;
- 4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain: konektivitas melalui Tol Trans Sumatera, Penanganan Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Lintas Penghubung Timur dan Barat Sumatera, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Lintas Tengah Aceh, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, Pembangunan KA Trans Sumatera, Reaktivasi Jalur KA Pariaman – Naras – Sungai Limau, Pembangunan KA Tanjung Enim – Tanjung Api-Api (potensi), Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri – Pekanbaru), Pembangunan KA Lahan – Tarahan, Bandara Bukit Malintang, Bandara Rokot;
- 5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
- 6) Pemantapan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera;
- 7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - a. pengembangan SMK 816 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.



- 9 -

- b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 91 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (kimia di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, manufaktur di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, otomotif di Sumatera Utara, Riau, dan Lampung, makanan dan minuman di Sumatera Utara dan Riau, ekonomi kreatif di Riau, migas di Aceh, dan tambang di Sumatera Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
- c. pengembangan 87 unit BLK di wilayah Sumatera mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki.
- d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi Wilayah Sumatera.

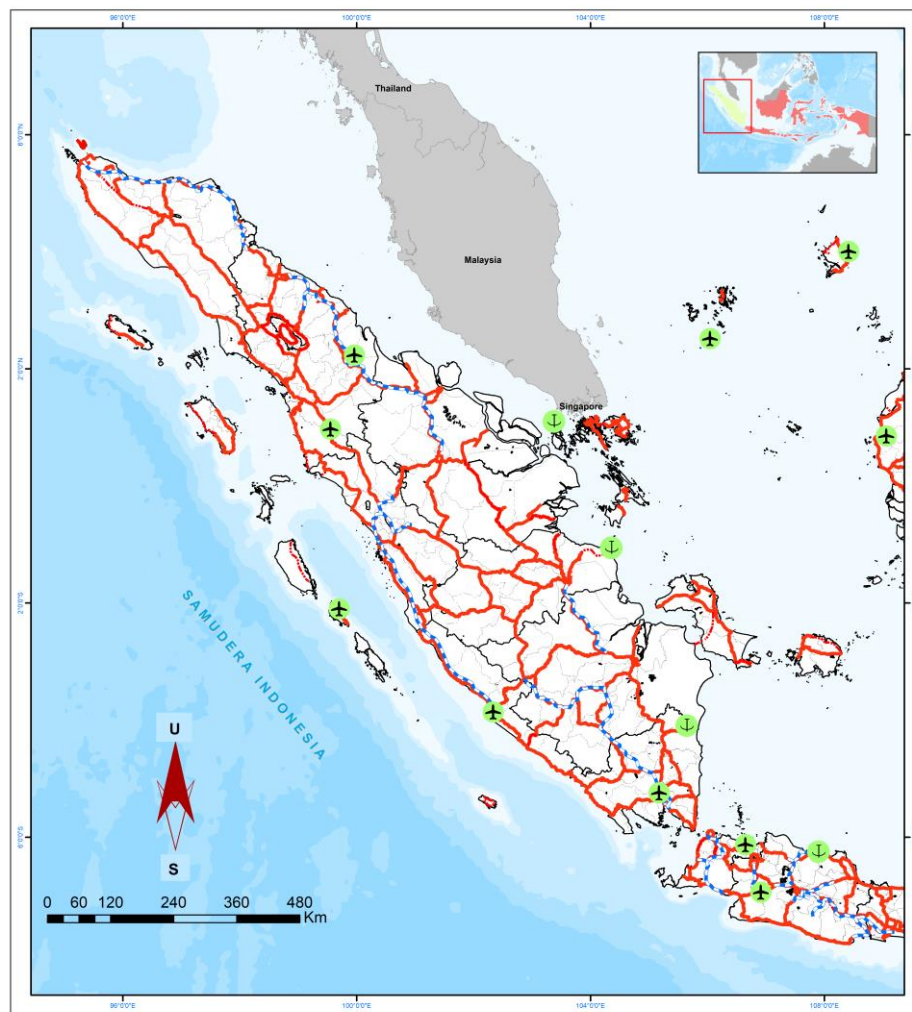
Gambar 6.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Sumatera



Keterangan

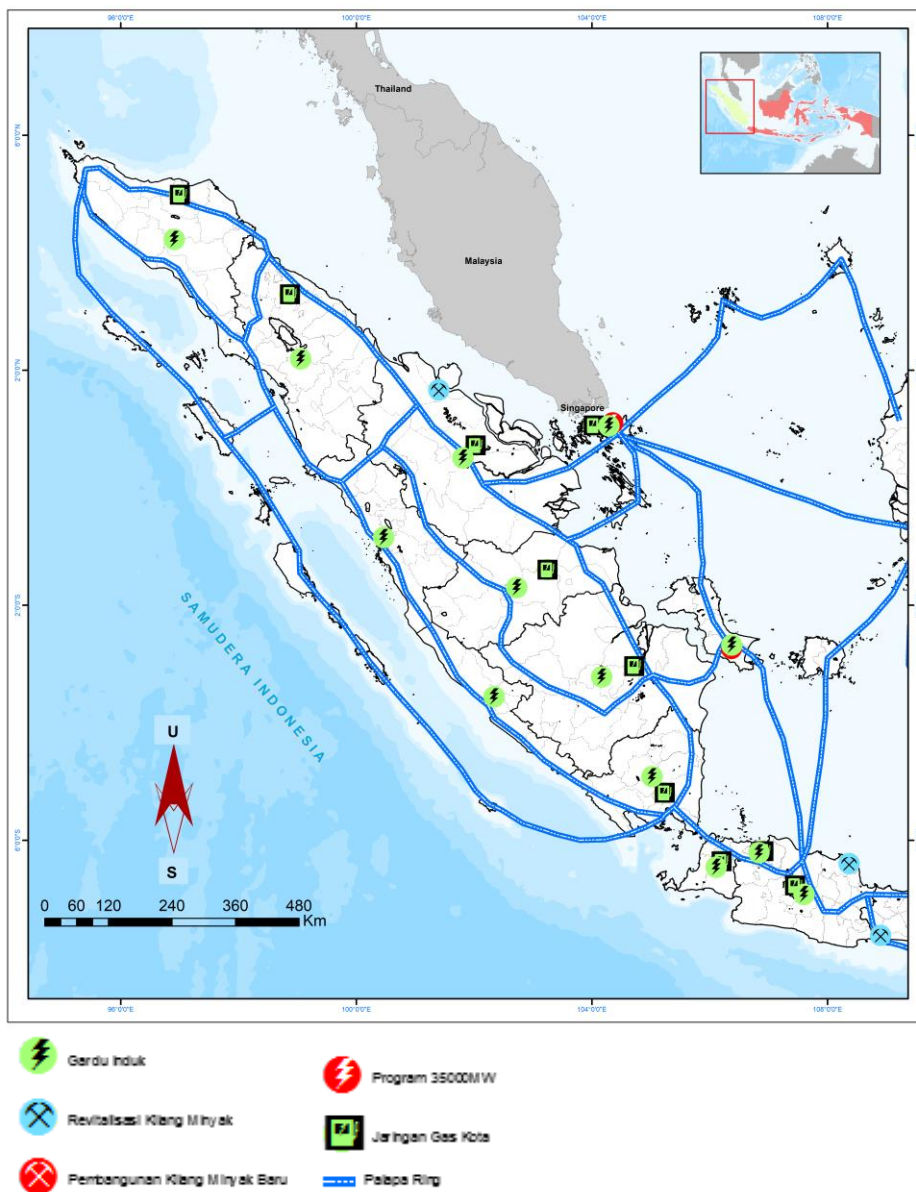
- Koridor Pertumbuhan
- Koridor Pemerataan
- Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KI/KEK/DPP)
- Rencana Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
- Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Wilayah Metropolitan

Gambar 6.3.
Peta Jaringan Infrastruktur Transportasi Wilayah Sumatera Tahun 2024

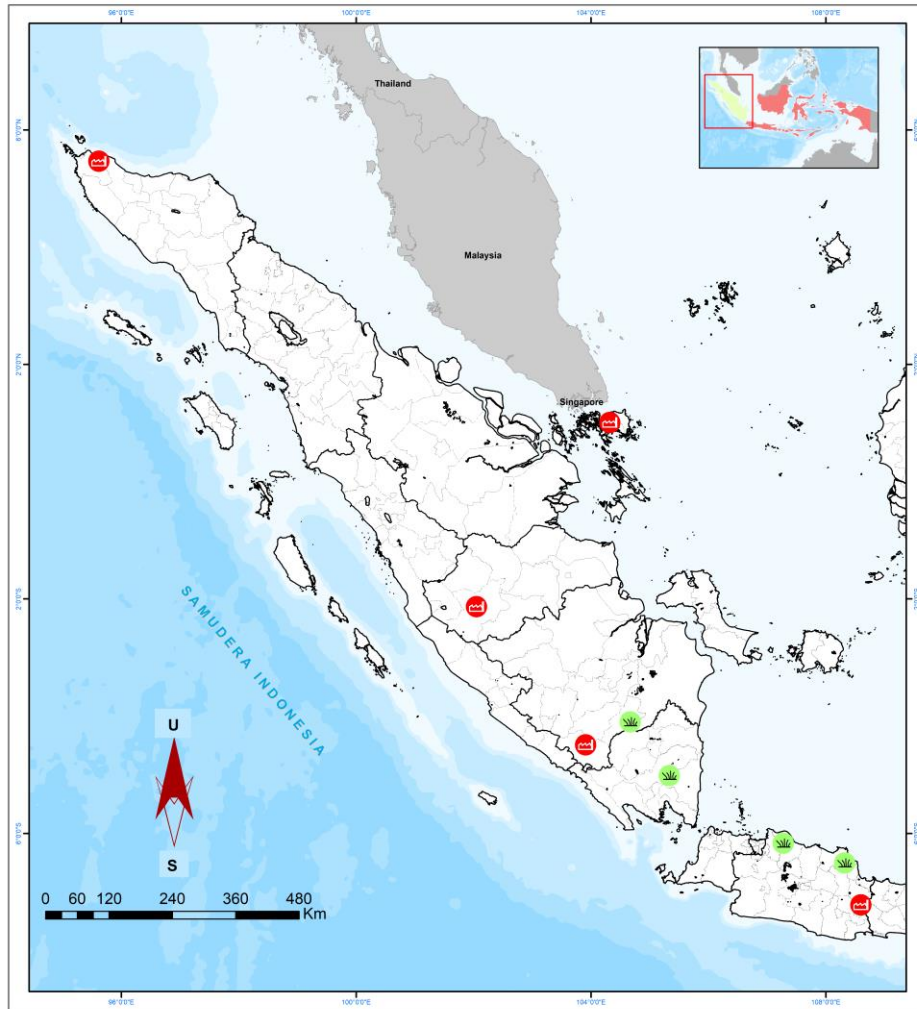


- Transportasi**
- Bandara
 - Pelabuhan
 - Rencana KA
 - KA Eksisting
 - Rencana Jalan
 - Jalan Eksisting
 - Rencana Jalan Pansel

Gambar 6.4.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Sumatera Tahun 2024



Gambar 6.5.
Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah Sumatera Tahun 2024





- 14 -

6.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera serta Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, Sibolga, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padang, Solok, Bukittinggi, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Prabumulih, Lubuk Linggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang dan Batam (Tabel 6.3);
- 2) Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Medan (Mebidangro) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; dan
- 3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

6.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung, 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan, dan 4 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Utara. Dari 7 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatera, 6 kabupaten termasuk dalam koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat; Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sumatera berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Aceh Singkil di Provinsi Aceh; Seluma di Provinsi Bengkulu; Lampung Barat di Provinsi Lampung; Pasaman Barat dan Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat, dan Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 4 kecamatan lokpri di Provinsi Aceh, 2 kecamatan lokpri di



- 15 -

- Provinsi Sumatera Utara, 15 kecamatan lokpri di Provinsi Riau, dan 35 kecamatan lokpri di Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKS N Sabang, PKS N Bengkalis, dan PKS N Ranai;
 - 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN Samosir, KPPN Agam, KPPN Banyuasin, KPPN Muaro Jambi, KPPN Belitung, KPPN Bangka Selatan, KPPN Belitung Timur, KPPN Bintan Kepulauan, KPPN Karimun, KPPN Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji;
 - 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu, Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo, Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan, Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara, Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang, dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji;
 - 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 10 Kabupaten/Kota di Aceh, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 4 Kabupaten di Riau, 4 Kabupaten di Jambi, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 4 Kabupaten di Bengkulu, 6 Kabupaten di Lampung, 3 Kabupaten di Bangka Belitung dan 3 Kabupaten di Kepulauan Riau yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera pada tahun 2023;
 - 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga



- 16 -

Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,75% di Provinsi Aceh, 6,83% di Provinsi Sumatera Utara, 4,55% di Provinsi Sumatera Barat, 12,09% di Provinsi Bengkulu, 10,01% di Provinsi Lampung, 5,7% di Provinsi Riau, 4,21% di Provinsi Kepulauan Riau, 5,74% di Provinsi Jambi, 3,44% di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 10,38% di Provinsi Sumatera Selatan; dan

- 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan wilayah pantai barat Pulau Sumatera;
 - b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
 - c. Peningkatan konservasi hutan; dan
 - d. Dukungan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.

6.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Aceh antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Pengelolaan dana Otonomi Khusus Aceh secara transparan, akuntabel, efisien,



- 17 -

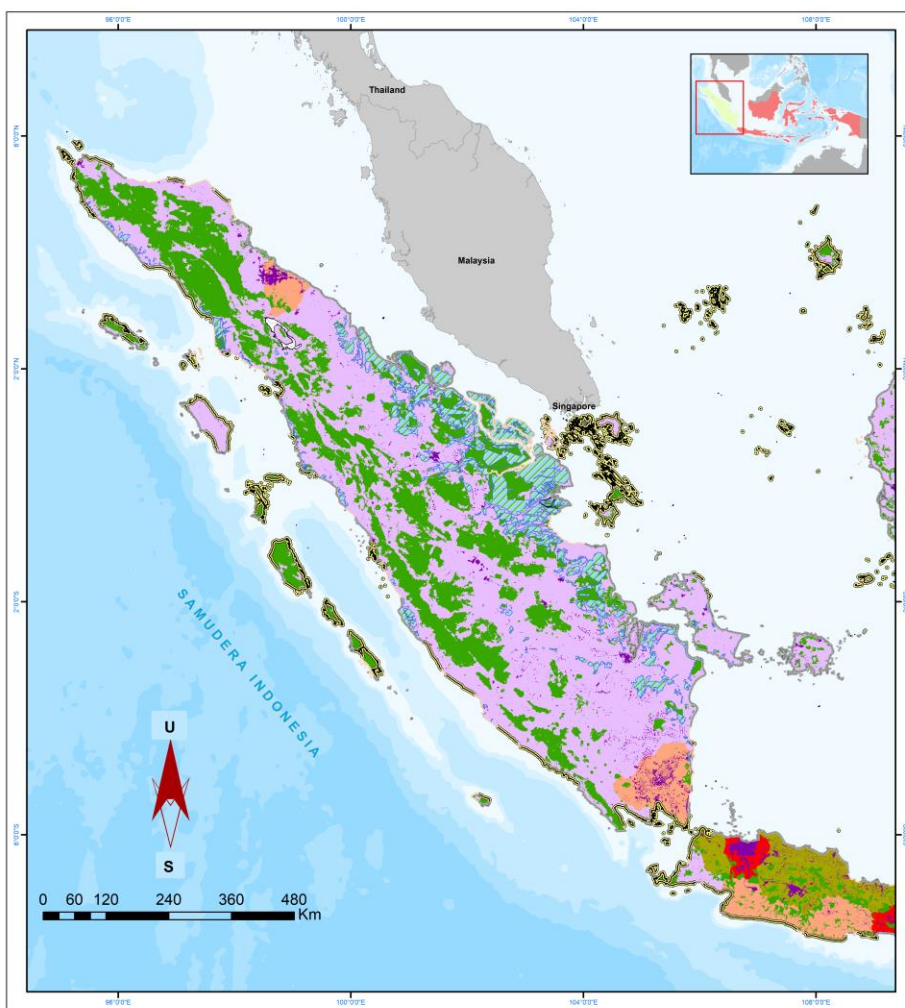
- efektif dan adil, dan berkelanjutan;
- 12) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan) dan Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai); dan;
 - 13) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Subulussalam), Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat, Kabupaten Medan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas), Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung), Provinsi Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Tengah), Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir) dan Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kab, Indragiri Hilir);
 - 14) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
 - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
 - d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - i. Pembentukan bank tanah;
 - j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
 - 15) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:



- 18 -

- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
- 16) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
- a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
 - b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
 - c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
 - d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
 - f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
 - g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
 - j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Gambar 6.6.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Sumatera 2025



Daya Dukung Wilayah		Proyeksi Permukiman 2025
Pesisir Indonesia	Proyeksi Air 2025	0
— Rentan	— Tidak Bertekanan	1
— Sedang	— Tekanan	Proyeksi Hutan 2025
— Tidak Rentan	— Langka	Non Hutan
Proyeksi Permukiman 2025	— Sangat Langka	Hutan



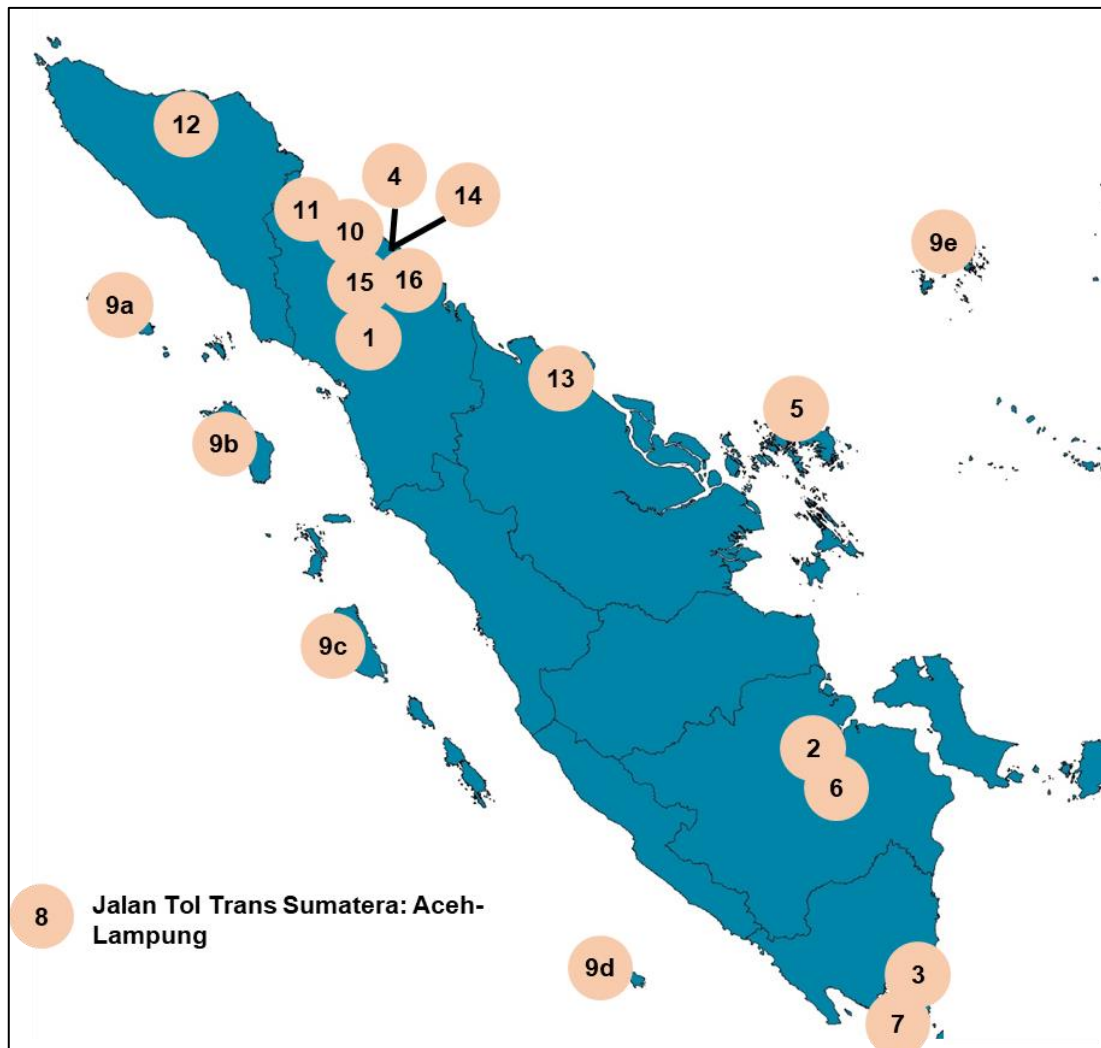
- 20 -

6.3. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Sumatera

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
- 2) Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit di Sumatera Selatan;
- 3) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
- 4) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional;
- 5) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan;
- 6) Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang;
- 7) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
- 8) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung;
- 9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) P. Simeuleu, (b) P. Nias, (c) P. Mentawai, (d) P. Enggano, dan (e) P. Natuna;
- 10) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan;
- 11) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara;
- 12) Pembangunan Waduk Multiguna: Bendungan Keureto;
- 13) Revitalisasi Kilang Minyak Dumai;
- 14) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung;
- 15) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
- 16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.

Gambar 6.7.
Peta Sebaran Rencana *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Sumatera





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU SUMATERA

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PP 1: Pembangunan Wilayah Sumatera	Laju pertumbuhan PDRB Sumatera (persen/tahun)	5,58				
	Share PDRB Wilayah Sumatera (persen)	21,83				
	IPM Wilayah Sumatera (min-maks)	71,90-78,19				
	Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera (persen)	5,76				
Provinsi Aceh						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	>1				
Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	>1				
Pelabuhan Nasional Balohan	Pembangunan pelabuhan		89,06		Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	BP Sabang
Penyelenggaraan Pembangunan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	Realisasi fisik pembangunan jembatan		300	Kota Sabang	Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	BP Sabang
Pengembangan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Sektor kepelabuhanan	Persentase Peningkatan Pendapatan dari Jasa Kepelabuhanan (%)	80	24	Kota Sabang	Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	BP Sabang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Bandara Maimun Saleh	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)		60	Aceh	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	>1				
Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhokseumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (lanjutan)	458,50	Aceh	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Banda Aceh - Sigli yang dibangun (km)			Aceh	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Lhokseumawe - Langsa yang dibangun (km)	45		Aceh	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei liput - Langsa - Lhok seumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	30 (lanjutan)	1.050	Aceh	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Jalan akses KEK Arun Lhoksumawe	Panjang jalan yang dibangun (km)		48	Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Arun Lhokseumawe	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)	0,09	29,25	Kota Lhoksumawe	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Bandara Malikus Saleh Lhokseumawe	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	80	Aceh	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Ladong	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Ladong	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	523,38	32,97	Provinsi Aceh, Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues, Kab. Bener Meriah	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	113,86	9,16	Provinsi Aceh, Kab. Pidie	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	948,03	42,74	Provinsi Aceh, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Tamiang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	1030,66	22,59	Provinsi Aceh, Kab. Simeule, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Barat Daya, Kota Sabang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Aceh, Kab. Aceh Singkil, Kab. Nagan Raya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Aceh, a.l: Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Aceh	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Aceh	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh					
Optimalisasi produksi minyak dan gas	jumlah produksi (Ton)				Program Pengelolaan MIGAS Aceh	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Aceh)				Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Aceh		KPBU
Pembangunan KA Trans Sumatera (Banda Aceh - Sigli - Bireuen - Lhokseumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (lanjutan)	458,50	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe (Provinsi Aceh)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan KA Trans Sumatera (Besitang - Sei liput - Langsa - Lhok seumawe)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	30 (lanjutan)	1.050	Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Bandara Maimun Saleh	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)		60	Kota Sabang, Provinsi Aceh	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh
Bandara Malikus Saleh Lhokseumawe	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	80	Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor I (Banda Aceh-Medan) yang dibangun (km)	45	75.318	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Lingkar Pulau Weh	Panjang jalan yang dibangun (km)		125	Kota Sabang, Provinsi Aceh	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	634	1.120,10	Provinsi Aceh	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		102,50	Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		112,50	Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		204,86	Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		6,28	Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		126,23	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun		97,70	Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	POLRI
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,52				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	14,26				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	61,69	74,64	Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	61,95	1.025,08	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	546	141,28	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	3,95	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparaturnya pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	67	1,25	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	546	278,21	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	2.134	596,07	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Aceh Tengah, Pidie, Aceh Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Aceh (kabupaten)	4	14,84	Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	4		Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	4		Kec. Masjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	4		Kec. Masjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat		Pemerintah Daerah
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi		6	Kec. Masjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		6,60	Kec. Masjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	1,44	Kec. Masjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	8	0,80	Kec. Masjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec. Langsa Barat	Pembangunan dan Permbudayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang	0,52	19,60	Kota Sabang		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang	5	11,28	Kota Sabang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi	1	2	Kota Sabang	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kota Sabang	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	50	0,13	Kota Sabang	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kota Sabang	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur	74	79,17	Kab. Aceh Timur	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian EDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kabupaten Aceh Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kabupaten Aceh Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kabupaten Aceh Timur	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Aceh Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Aceh Timur	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Aceh Timur	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	401.443	349,67	Aceh	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Aceh	61,69	96,24	Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	2	57,80	Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)	1.563,65	1,88	Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	3	10,83	Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	2,49	Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab. Simeulue	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	60	0,63	Kab. Aceh Tengah dan Kab. Simeulue	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)	1.563,65	1,00	Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	60		Kab. Aceh Tengah dan Kab. Simeulue	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,30				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,3				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di Provinsi Aceh	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.924				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	24	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,27			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	20	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,89			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	24	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	24	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	24	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	24	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	24	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	36	1,73			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	14	1,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	24	1,93			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	23	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	24	1,04	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	24	0,55			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	24	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	24	0,22	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	24	0,70			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	24	0,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Peningkatan penataan hubungan pusat daerah					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,04	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	2	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.		15,04			
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus		2,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	1	7,94	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus	4	5	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	401.443	349,67	Aceh	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	38.376	0,38	Aceh	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker) (satker)	22	32,10	Aceh	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						

Sumatera - 19

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Aceh	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR		2,00	Kec. Bener Meriah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	6	2,32	Aceh	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	6	5,21	Aceh	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	1	3,33	Aceh (KSN Kawasan Ekosistem Leuseur), KSN Bandar Aceh Darrusalam	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sumatera Utara						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	>1				
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	>1				
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Tebing tinggi - Kisaran yang dibangun (km)	35	8,69	Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung (lokasi)	1 (selesai)	25.000	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, BUMN (Pelindo I), Swasta
Jalan Akses KI Seimangke	Panjang jalan yang dibangun (km)	10	30	Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Sei Mangkei	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)		29,25	Kab. Simalungun	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumatera	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Sumatera (1 unit) (tahapan pembangunan)	operasi	1.000	Sumatera Utara (Kab. Batubara/Kab. Simalungun)		KPBU
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7,00	5,95	Kab. Simalungun	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Kuala Tanjung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	>1				
Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung (lokasi)	1 (selesai)	25.000	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh, BUMN (Pelindo I), Swasta
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Kuala Tanjung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Batu Bara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Danau Toba dan sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	>1				
Jalan Akses KSPN Danau Toba	Panjang jalan yang dibangun (km)	12,50	1.333	Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Jalan By Pass Balige	Panjang jalan yang dibangun		135	Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandara Sibisa	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		124,23	Sumatera Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pembangunan pelabuhan penyeberangan KSPN Danau Toba	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)		295,30	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (selesai)	305	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (selesai)	1.105	Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub (KPBU)
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Danau Toba dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		6,50	Kab. Toba Samosir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	3	10,64	Provinsi Sumatera Utara	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	554,48	25,03	Provinsi Sumatera Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	602,71	37,85	Provinsi Sumatera Utara, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,36	Provinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat, Kab. Labuhanbatu Selatan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	126,23	5,07	Provinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sumatera Utara, a.l: Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tanjung Balai, Kota Medan, Kab. Asahan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Medan (Mebidangro)	Persentase PDRB Metropolitan terhadap PDRB Pulau Sumatera	10.82		Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Peningkatan Diversifikasi Energi Perkotaan	Jumlah Pembangunan Pemanfaatan PV Rooftop (MW)		300	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		PLN
	Jumlah Pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum/SPLU (Unit)	200	43.513	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		PLN
Pengembangan jaringan listrik	Jumlah gardu induk yang dibangun	3		Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara		Dinas Pertambangan dan Energi, PLN
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Sumatera Utara		KPBU
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	3.000	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	670	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.330	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	125	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	500	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	500	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub, Pemda, KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
c. Pengembangan /Peningkatan Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-Besitang)	Panjang jalur KA yang dibangun/ditingkatkan (km)		244,30	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pengembangan Bandara Kualanamu	Jumlah bandara yang dikembangkan		200,0	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	Terselenggaranya standardisasi dan pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung	1	25.000	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh, BUMN (Pelindo I), Swasta
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor I (Banda Aceh-Medan) yang dibangun (km)	45	75.318	Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor II (Medan-Pekanbaru) yang dibangun (km)	55	65.659	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Lingkar Luar Selatan Medan	Panjang jalan yang dibangun (km)	9	300	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Kemenuh (KPBU)
Pembangunan Fly Over Gatot Subroto	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		148,80	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Kemenuh
Pembangunan Fly Over Pinang Baris	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		151,61	Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Kemenuh
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.736	3.069,25	Provinsi Sumatera Utara	Program Pengembangan Perumahan	Kemenuh PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	40	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemenuh PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		1.922	Kota Medan, Kab. Deli Serdang (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kemenuh PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 25

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		700	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		82,60	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		1.321,61	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		261,1	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		44,16	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Karo (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	0,58	870	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara		KPBU
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	6,28	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Utara)				Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli		
Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (selesai)	305	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15 (selesai)	1.105	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor V Tebing Tinggi-Sibolga yang dibangun (km)	13	10.000	Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Siantar By Pass	Panjang jalan yang dibangun (km)		96	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		169	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		49,90	Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		152,69	Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli (Provinsi Sumatera Utara)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		26,60	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		2	Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,18	54,28	Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	2 (terentaskan 2 kabupaten)		Prov. Sumatera Utara: Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias;		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	6,25				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal Utara	1. 19,6 - 20,1%; 2. 64,9 - 65,4	1898,10	Kab Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan	1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; 2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 3. Program Pembangunan Daerah Tertinggal; 4. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 5. Program Pemberdayaan Sosial; 6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 7. Program Penanganan Fakir Miskin; 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 9. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Kementerian Perdagangan; 2. Kementerian ESDM; 3. Kementerian Desa PDTT; 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian PUPR; 6. Pemerintah Daerah Kab. Nias Selatan
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya Pasar Rakyat (paket)		18,90	Kab. Nias Selatan (Kec. Telukdalam, Maniamolo, dan Gomo, Ulususua)	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia (paket)	40	43,75	Kab. Nias Selatan (Kec. Umbunasi, Susua, Ulunoyo, Huruna, Simuk, Hibala, Pulau-Pulau Batu Barat)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)	1	3	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)		4	Kab. Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisawatan ke desa wisata di daerah tertinggal (%)		4,50	Kab. Nias Selatan (KSPN Teluk Dalam dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)	57	2,27	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan Terluar (unit)		6,60	Kab. Nias Selatan (P. Simuk)	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)		1,76	Kab. Nias Selatan	Program Pemberdayaan Sosial	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	36.329	967,94	Kab. Nias Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	66.142	595,28	Kab. Nias Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0,40	238,81	Kab. Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Nias Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jalan Trans Nias (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	305,92	Provinsi Sumatera Utara, Kab. Nias Barat, Nias Utara	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pukesmas Baru yang Dibangun di DTPK	Jumlah puskesmas baru yang dibangun (unit)		DAK	Kab. Nias Selatan		Pemerintah Daerah Kab. Nias Selatan
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintah-nya tersedia di Prov Sumatera Utara (kecamatan)	2	6,04	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	2		Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	2	1,44	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun (paket)	10	4,40	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	63,33	886,94	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, DPP Danau Toba	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	24,91	DPP Danau Toba	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	662	119,34	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	3,95	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	67	1,25	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	662	234,73	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	1.784	498,13	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	5	0,76	Langkat, Padang Lawas, Nias Utara, Gunung Sitoli, Simalungun	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	75.00; 75.00	90,13	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Samosir	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	20	3,83	Kab. Toba Samosir	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	4	1,26	Kab. Toba Samosir	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 33

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	544.330	474,39	Sumatera Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,30				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,30				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sumatera Utara	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	2.694				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		36,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		13,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	34	0,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	34	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2	5,25			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 36

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	34	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	34	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	34	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	34	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	34	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	34	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	45	2,27			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 37

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	34	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,6	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	34	2,38			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	33	0,61	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 38

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	34	1,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	34	0,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	34	0,79			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	34	0,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	34	0,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	34	0,85			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	34	0,51	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 39

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,84	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	5	4,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	544.330	474,39	Sumatera Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	421.366	3,33	Sumatera Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	26	32,10	Sumatera Utara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Sumatera Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	11	3,57	Sumatera Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	4	Sumatera Utara (Nias Barat dan Nias Selatan)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	10	8,48	Sumatera Utara	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sumatera Barat						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	>1				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 41

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan DPP Baru Padang-Bukittinggi	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat	>1				
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Bukit Tinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang yang dibangun (km)		7,87	Sumatera Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Barat (Padang - Pariaman; Padang-Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	10	1.037	Sumatera Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Jalan Akses Terminal Tipe A Padang	Panjang jalan yang dibangun (km)		36	Sumatera Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Padang-Bukittinggi	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		3,25	Kota Padang dan Kota Bukittinggi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana tsunami			Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana tsunami tinggi : Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai (Kota Padang dan Bengkulu) , Pantai Selatan Jawa (Pangandaran, wilayah Selat Sunda), Pantai Selatan Bali - Lombok (Denpasar, Badung, Mandalika), Pantai Utara Sulawesi Utara (Manado) , Pantai Pulau Buru - Seram (Kota Ambon), Halmahera dan Papua	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	110,34	8,55	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Solok	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 42

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	89,85	5,49	Provinsi Sumater Barat, Kab. Solok	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	678,06	30,53	Provinsi Sumater Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	157,76	3,66	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikana tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sumatera Barat, a.l Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sumatera Barat	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Barat)				Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 43

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Akses Terminal Tipe A Padang	Panjang jalan yang dibangun (km)	1,50	36	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Peningkatan Jalur KA di Sumatera Barat (Padang - Pariaman; Padang-Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	10	1.037	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuhub
Pembangunan KA Kota Padang - Bengkulu (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	6 (lanjutan)	207,80	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuhub, KPBU
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor VI (Pekanbaru-Padang) yang dibangun (km)		36.594	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	651	1.150,97	Provinsi Sumatera Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		961	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		281	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		19,70	Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi (Provinsi Sumatera Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		553,04	Kota Padang, Kota Solok (Provinsi Sumatera Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		68,60	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		14,30	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,26	78,50	Kota Padang, Kota Bukittinggi (Provinsi Sumatera Barat)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 44

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun		97,70	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	POLRI
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)		Prov. Sumatera Barat : Kab. Kepulauan Mentawai;		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5,00				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	76,10	26,38	Kab. Pesisir Selatan	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 11 - 11,5%; 2. 63,2 - 63,7	902,02	Kab. Kepulauan Mentawai	1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; 3. Program Penyelenggaraan Jalan 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 5. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi; 6. Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika; 7. Program Pembangunan Daerah Tertinggal; 8. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 10. Program Penanganan Fakir Miskin; 11. Program Pengelolaan Ruang Laut;	1. Kementerian Perhubungan; 2. Kementerian PUR; 3. Kementerian ESDM; 3. Kementerian Kominfo; 4. Kementerian Desa PDTT; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 45

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Bandara Rokot	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		465	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kep. Mentawai	kapal penyeberangan yang dibangun (unit)		30	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kementerian Perhubungan
Jalan Trans Mentawai (DAK/APBN)	Panjang jalan yang dibangun (km)	11	716,51	Provinsi Sumatera Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR/Pemda
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0,37	112,14	Kab. Kepulauan Mentawai*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Penyediaan Akses Listrik	Jumlah akses listrik yang tersedia (paket)	2	2,19	Kepulauan Mentawai (Desa Sinaka, Desa Bulasat, Desa Silabu, Desa Matotonan, Desa Paskiat Taileleu, Desa Kature)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (unit)	14	35	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika	Kementerian Kominfo
Literasi Digital Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal	Persentase kenaikan volume penjualan produk unggulan daerah tertinggal yang dipasarkan melalui platform digital (%)		1	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal	Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal (paket)		1	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)	15	0,59	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam mendukung 14 KSPN	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata di daerah tertinggal (%)		4,42	Kab. Kepulauan Mentawai (KSPN Siberut dskt)	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi di Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi yang Dibangun dan Fungsional di daerah tertinggal (unit)		1,30	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 46

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya yang dibangun dan fungsional di daerah tertentu rawan pangan (unit)		2,40	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood) (orang)	96	2,45	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	5.122	94,50	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	9.273	83,46	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai yang Mandiri	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai (tingkat kemandirian (skala 1 - 5))	4	11,08	Kab. Kepulauan Mentawai	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	1	7,50	Pulau Pagai Utara	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	69,99	164,54	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, DPP Baru Bukittinggi-Padang	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	8,91	DPP Baru Bukittinggi-Padang	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		17,16	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



Sumatera - 47

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,02	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	67	1,25	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		33,15	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	343	95,74	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 48

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	3	0,45	Pasaman, Pasaman Barat, Solok	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (pulau)	1	7,50	Pulau Pagai Utara	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Agam	57.00	45,37	Kab. Agam	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	11	3,19	Kab. Agam	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	2	1,17	Kab. Agam	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Agam	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Agam	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Agam	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	306.642	277,6	Sumatera Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 49

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	76,10	26,38	Kab. Pesisir Selatan	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	12,45	Kab. Pesisir Selatan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,16	Kab. Pesisir Selatan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Pesisir Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	0,96	Kab. Pesisir Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)	639	0,46	Kab. Pesisir Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,01	Kab. Pesisir Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)	639		Kab. Pesisir Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,30				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,3				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 50

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sumatera Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	2.228				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		36,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		13,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 51

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	20	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	20	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	3,13			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 52

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	6	0,86	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	20	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	20	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	20	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	20	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 53

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	20	0,27		Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	20	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	93	1,21			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	20	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,60	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	20	1,12			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 54

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	19	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	20	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	20	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	20	0,51			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	20	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	20	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	20	0,64			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 55

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	20	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,89	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 56

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	306.642	277,59	Sumatera Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	71.045	0,69	Sumatera Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	20	32,10	Sumatera Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Sumatera Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	2,00	Sumatera Barat (Kep Mentawai)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	9	3,25	Sumatera Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	8,24	Sumatera Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	3,16	Sumatera Barat (KSN TN Kerinci Seblat, KSN Danau Maninjau)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 57

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Provinsi Riau						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	>1				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tenayan	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Riau	>1				
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanjung Buton	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Riau	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Tanjung Buton	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13,00		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	540	3,66	Provinsi Riau, Kab. Pelalawan, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 58

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	918,61	41,51	Provinsi Riau, Kab. Kuantang Singingi, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kepulauan Meranti	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	466,72	10,38	Kab. Indragiri Hilir	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	425,08	26,86	Kab. Kepulauan Meranti	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,6		Provinsi Riau	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau					
Optimalisasi produksi minyak dan gas	jumlah produksi			Kab. Rokan Hilir	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Riau)				Kota Dumai, Kota Pekanbaru (PKN)		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Riau		KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 59

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan KA Trans Sumatera (Rantau Prapat - Pondok S2 - Kota Pinang - Batas Sumut - Duri - Pekan baru)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	20	1.215	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor II (Medan-Pekanbaru) yang dibangun (km)	55	65.659	Kota Dumai, Kota Pekanbaru (Provinsi Riau)	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor VI (Pekanbaru-Padang) yang dibangun (km)		36.594	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor III (Pekanbaru-Palembang) yang dibangun (km)	36	84.803	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	844	1.491,31	Provinsi Riau	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		476	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		136	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		20,40	Kota Dumai, Kota Pekanbaru (Provinsi Riau)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		97,41	Kota Dumai, Provinsi Riau	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,59				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	3,81				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 60

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Bengkalis	0,59	12,61	Kab. Bengkalis		
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		4	Kab. Bengkalis	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Bengkalis	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan		2,20	Kab. Bengkalis	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	50	0,10	Kab. Bengkalis	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kab. Bengkalis	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kab. Bengkalis	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kab. Bengkalis	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Riau (kecamatan)	15	105,04	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupert, Kec. Rupert Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		



Sumatera - 61

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 62

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	15		Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	7	1,01	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: PPKT Provinsi Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)	0,13	86,23	Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun		17,60	Kec. Bengkalis, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 63

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kec. Bengkulu, Kec. Bantan, Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Bangko, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Medang Kampai, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang, Kec. Merbau, Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDPT
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	3	22,50	Pulau Rupal, Pulau Rangsang, Pulau Bengkulu	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian KKP
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	65,68	245,32	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDPT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		31,22	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDPT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDPT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,02	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDPT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	67	1,25	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		57,43	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 64

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	527	147,23	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Rokan Hulu, Kampar	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,30				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,30				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 65

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Riau	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.964				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	13	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 66

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	13	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,27			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 67

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	13	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	13	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	13	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	13	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	13	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 68

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	13	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	51	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Sistem penilaian terpadu antar K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	13	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	13	0,97			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 69

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	12	0,15	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	13	0,38	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	13	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	13	0,37			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	13	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	13	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	13	0,53			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	13	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 70

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,04	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 71

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	201.964	92,87	Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	282.519	2,76	Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	32,10	Riau	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	6	2,23	Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	6	5,23	Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 72

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Provinsi Jambi						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	>1				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Kemingking	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jambi	>1				
Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	80	Jambi	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Jembatan Akses Pelabuhan Ujung Jabung	Panjang jembatan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	600	Jambi	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Akses KI Kemingking	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	50	Jambi	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	100	Jambi	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Kemingking	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Muaro Jambi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	179,57	7,33	Provinsi Jambi, Kab, Kerinci	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 73

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	1846,14	83,64	Provinsi Jambi, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	429,54	2,44	Provinsi Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	585,76	37,24	Provinsi Jambi, Kab. Kerinci, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kota Sungai Penuh	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (Ton)			Kab. Muaro Jambi	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Jambi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jambi)				Kota Jambi		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Jambi		KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 74

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	100	Kota Jambi, Provinsi Jambi		BUMN
Pembangunan KA Trans Sumatera (Palembang - Betung - Jambi)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	20 (lanjutan)	550	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor III (Pekanbaru-Palembang) yang dibangun (km)	36	84.803	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	465,5	823,00	Provinsi Jambi	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		126	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		206	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		25	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		265	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		36	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		9	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 75

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	3,06				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	37,47	40,58	Kab. Bungo	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	65,39	222,74	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	65	27,79	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,02	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	65	57,33	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 76

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	459	128,18	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,46	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Kerinci, Tanjung Jabung Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi	54.00	124,65	Kab. Muaro Jambi	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Muaro Jambi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Muaro Jambi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Muaro Jambi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Muaro Jambi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 77

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Muaro Jambi	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	442.371	280,2	Jambi	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Jambi	37,47	40,58	Kab. Bungo	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	24,42	Kab. Bungo	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)		3,19	Kab. Bungo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	1	12,33	Kab. Bungo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,64	Kab. Bungo	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bungo	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,30				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,3				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 78

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jambi	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.335				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	3	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32		Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 79

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	12	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,27			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 80

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	12	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	12	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	12	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 81

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	12	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	0,78	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (Alokasi Kemendagri)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	13	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	12	0,85			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	11	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 82

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	12	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	12	0,33			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	12	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	12	0,15	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	12	0,13			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	12	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 83

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,82	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 84

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	442.371	280,21	Jambi	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	353.625	3,46	Jambi	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	12	32,10	Jambi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Jambi	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	1	2	Jambi (Kab Sarolangun)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	2,33	Jambi	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota	7	6,38	Jambi	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1,57	Jambi (KSN Cagar Budaya Muaro Jambi)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 85

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Provinsi Sumatera Selatan						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	>1				
Percepatan Operasionalisasi KEK Tanjung Api-api	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Selatan	>1				
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Indralaya - Muara Enim yang dibangun (km)		10,29	Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang jalan tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau yang dibangun (km)		14,59	Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	1.000	Sumatera Selatan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenuh (KPBU)
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api	Panjang jalan yang dibangun (km)	8	80	Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	8 (selesai)	700	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Tanjung Api-Api	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kab. Banyuasin	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanjung Enim	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Selatan	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Tanjung Enim	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Muara Enim	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 86

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Jalan akses KI Tanjung Enim	Panjang jalan yang dibangun (km)		85	Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan KA Tanjung Enim - Tanjung Api Api (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	8 (selesai)	700	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuhub
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	836,21	53,11	Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Lahat, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	3943,80	178,27	Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Ilir, Kab. Penulak Abab Lematang Ilir, Kab. Musi Rawas Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	514,02	20,76	Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan					

Sumatera - 87

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	491	3,05	Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	1018,46	21,98	Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Lahat, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Empat Lawang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan					
Optimalisasi produksi batubara	jumlah produksi (ton)			Kab. Muara Enim	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
Optimalisasi minyak dan gas	jumlah produksi (barell)			Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang (Patungraya Agung)	Persentase PDRB Metropolitan terhadap PDRB Pulau Sumatera	10,82		Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik		0,72	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 88

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM
Peningkatan Diversifikasi Energi Perkotaan	Jumlah Pembangunan Pemanfaatan PV Rooftop (MW)		300	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		PLN
	Jumlah Pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum/SPLU (Unit)	200	43.513	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		PLN
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Sumatera Selatan		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		Pemda (DAK)
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Palembang berbasis jalan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenuh
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor III Pekanbaru-Palembang yang dibangun (km)	36	84.803	Kota Palembang, Kab. Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor VII Palembang-Bengkulu yang dibangun (km)	0	36.176	Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.054	1.862,60	Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	40	Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)		5	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		961	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 89

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		251	Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		57	Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		694,10	Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		136,10	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		22,10	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		590,87	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		0,80	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan		KPBU
Pengembangan kabupaten/kota/kawasan kreatif	Jumlah kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan		2,50	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kememparekraf
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	17,81	WM Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Selatan)				Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau		
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		69	Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 90

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		137,20	Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau (Provinsi Sumatera Selatan)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		5,30	Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,17	51,34	Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)		Prov. Sumatera Selatan : Musi Rawas Utara		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	9,35				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	64,97	73,37	Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	62,41	448,74	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukul Abab Lematang Ilir, Prabumulih	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	12	60,94	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukul Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 91

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penulak Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penulak Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penulak Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penulak Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	12	114,75	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penulak Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	943	263,50	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penulak Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 92

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,49	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penulak Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penulak Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penulak Abab Lematang Ilir, Prabumulih	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Ogankomering Ilir, Muara Enim	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	64,97	73,37	Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	41	14,97	Kab. Banyuasin	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	2	1,59	Kab. Banyuasin	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Banyuasin	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 93

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Banyuasin	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	1	8,62	Kab. Banyuasin	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Banyuasin	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	842.774	501,3	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	Peningkatan Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	64,97	73,37	Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	38,58	Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,47	Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	3	30,82	Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)	2	2,88	Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,58	Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 94

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,04	Kab. Ogan Ilir dan Kab. Banyuasin	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, dan Kab. Lahat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,30				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,3				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Sumatera Selatan	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	2.459				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 95

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km ²)	2.800	103,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km ²)	2.800	39,64	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	18	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	12	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 96

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2				
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 97

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	18	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	18	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	58	565,39			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 98

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	18	1,47			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	17	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	18	0,73	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 99

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	18	0,45			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	18	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	18	0,61			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	18	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 100

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	16,81	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	3	1,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 101

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	842.774	501,25	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	551.837	5,39	Sumatera Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	16	32,10	Sumatera Selatan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Sumatera Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	9	3,35	Sumatera Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	9	8,48	Sumatera Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,66	Sumatera Selatan	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 102

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Provinsi Bengkulu						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	267,61	16,91	Provinsi Bengkulu, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	595,89	26,98	Kab. Bengkulu Utara	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Bengkulu	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,05	Provinsi Lampung, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Bengkulu)				Kota Bengkulu		
Pembangunan KA Kota Padang - Bengkulu (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	6 (lanjutan)	207,80	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 103

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Jalan Tol Trans Sumatera	Panjang Jalan Tol Koridor VII Palembang-Bengkulu yang dibangun (km)		36.176	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Penyelenggaraan Jalan	KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	263	464,10	Provinsi Bengkulu	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		43,60	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		107	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		149,56	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		9,70	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		8,06	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	11,54				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	76,46	42,10	Kab. Bengkulu Utara	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 104

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	61,93	216,62	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	324	27,90	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	324	56,30	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	440	122,86	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,49	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

Sumatera - 105

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko Rejang Lebong, Seluma	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Kaur, Bengkulu Utara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (pulau)	1	7,50	Pulau Enggano	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Bengkulu Tengah	58.00	124,07	Kab. Bengkulu Tengah	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Bengkulu Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	2	1,17	Kab. Bengkulu Tengah	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Bengkulu Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Bengkulu Tengah	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40	Kab. Bengkulu Tengah	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	149.861	109,33	Bengkulu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 106

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu	76,46	42,10	Kab. Bengkulu Utara	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	24,45	Kab. Bengkulu Utara	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,18	Kab. Bengkulu Utara	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	16,69	Kab. Bengkulu Utara	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		0,48	Kab. Bengkulu Utara	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,22	Kab. Bengkulu Utara	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,10	Kab. Bengkulu Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bengkulu Utara	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,30				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,3				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 107

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Bengkulu	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	2.625				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,87	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 108

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1				
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 109

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,65			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	11	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	11	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	11	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 110

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	11	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	11	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	54	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Kab. Seluma	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	11	0,90			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 111

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	10	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	11	0,31	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	11	0,28			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	11	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	11	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	11	0,50			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	11	0,16	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 112

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,67	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 113

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	149.861	109,33	Bengkulu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	122.738	1,06	Bengkulu	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	11	32,10	Bengkulu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Bengkulu	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	2,63	Bengkulu	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	7	7,66	Bengkulu	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,66	Bengkulu (KSN TN Bukit Barisan Selatan)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 114

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Provinsi Lampung						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	>1				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Tanggamus	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	>1				
Jalan Akses KI Tanggamus	Panjang jalan yang dibangun (km)	2	20	Lampung	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Pesawaran	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Pesawaran	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Way Pisang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Way Pisang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 115

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Katibung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Lampung	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Katibung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	799,25	50,67	Provinsi Lampung, Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Way Kanan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	767,53	34,80	Provinsi Lampung, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	1.933,67	42,13	Provinsi Lampung, Provinsi Lampung Utara, Provinsi Lampung Timur, Kab. Tanggamus, Kab. Way Kanan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 116

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung					
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (pekebun)	539,97	3,36	Provinsi Lampung, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	1448,81	58,36	Provinsi Lampung, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, Kab. Tulang Bawang Barat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Lampung	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	Jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Lampung, a.l: Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kota Bandar Lampung	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Lampung)				Kota Bandar Lampung		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Lampung		KPBU
Pembangunan KA akses Bandara Raden Intan	Terbangunnya KA akses Bandara (km)		74,70	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.110	1.961,60	Provinsi Lampung	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 117

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional (lpd)		43,50	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		961	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		253	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		13,70	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		465,35	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		87,80	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		18,40	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		170,82	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center	Jumlah Command Center yang dibangun		97,70	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Poli	POLRI
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)		Prov. Lampung : Kab. Pesisir Barat		
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	11,14648				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 118

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	59,63	53,84	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal 2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	1. 13,2 - 13,7%; 2. 67,6 - 68,1	425,08	Kab. Pesisir Barat	1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; 4. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); 5. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 6. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 8. Program Penanganan Fakir Miskin;	1. Kementerian PUPR; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Kesehatan; 4. Kementerian Desa PDTT; 5. Kementerian Sosial 6. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang Difasilitasi Pembangunannya (unit)	154		Kab. Pesisir Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *indikatif pendanaan masih bersifat total seluruh daerah 3T di setiap provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0,19	56,92	Kab. Pesisir Barat*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	Terbangunnya Pasar Rakyat (unit)		25,20	Kab. Pesisir Barat	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kementerian Perdagangan
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu		3	0,37	Kab. Pesisir Barat	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Kementerian Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)	15	0,59	Kab. Pesisir Barat	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana Di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (livelihood) (orang)	96	2,45	Kab. Pesisir Barat	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 119

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	11.687	105,18	Kab. Pesisir Barat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan melalui Kartu Sembako Murah (KPM)	9.344	159,36	Kab. Pesisir Barat	Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
Penyediaan Moda Transportasi Darat	Jumlah Moda Transportasi Darat yang Disediakan (unit)			Kab. Pesisir Barat		Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Penyediaan Moda Transportasi Air	Jumlah Moda Transportasi Air yang Disediakan (unit)			Kab. Pesisir Barat		Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	65,81	392,34	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	408	53,88	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

Sumatera - 120

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	408	104,46	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	803	224,10	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,49	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	4	0,60	Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	75.00; 75.00	208,93	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 121

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	334	120,52	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	4	6,37	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,36	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab Mesuji dan Kab. Tulang Bawang	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	347.311	262,2	Lampung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung	59,63	53,84	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	30,52	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya Dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	2	21,54	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		1,52	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,25	Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 122

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Tulang Bawang dan Kab. Mesuji	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,30				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,30				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Lampung	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.076				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		4,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 123

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32		Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	16	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	16	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 124

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1				
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	16	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 125

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	16	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	16	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	16	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	49	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	16	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

Sumatera - 126

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	16	1,40			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	15	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	16	0,71	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	16	0,42			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	16	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	16	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 127

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	16	0,58			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	16	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,63	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	5	2,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 128

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	347.311	262,17	Lampung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	104.044	1,02	Lampung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	13	32,10	Lampung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Lampung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	2,74	Lampung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 129

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	6,85	Lampung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	>1				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Tanjung Kelayang/KEK Tanjung Kelayang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	>1				
Pembangunan pelabuhan penyeberangan Tj. Kelayang (Tj. Nyato)	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)		85	Bangka Belitung	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenuh
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	0,01	3,25	Kab. Belitung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)	1 (selesai)	120	Bangka Belitung	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh, BUMN
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sadai	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	>1				
Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)	1		Sumatera Selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 130

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Jalan akses KI Sadai	Panjang jalan yang dibangun (km)		50	Bangka Belitung	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan str	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Bangka Selatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	8.405,42	182,54	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bangka, Kab. Belitung, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
Kawasan Karet	Kawasan Karet (ha)	288,95	11,83	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bangka	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	283,26	17,89	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bangka, Kab. Belitung Timur	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan timah	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
Optimalisasi produksi timah	jumlah produksi (Ton)	61.486	11,83	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 131

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, a.l Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pangkal Pinang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Bangka Belitung)				Kota Pangkal Pinang		
Jalan Trans Bangka	Panjang jalan yang dibangun (km)	12	350	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	193	340,34	Provinsi Bangka Belitung	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		18,70	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		112,05	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		20,95	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		2,70	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		82,79	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	-				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	3,51				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 132

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	76,49	31,98	Kab. Bangka Selatan	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	67,61	58,59	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, DPP Tanjung Kelayang	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	8,90	DPP Tanjung Kelayang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	50	3,76	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	50	8,02	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	101	28,31	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa (kab/kota)	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 133

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Bangka Barat, Bangka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	75.00; 65.00; 75.00	282,42	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Bangka Selatan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	2	1,17	Kab. Bangka Selatan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	3	2,52	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 134

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,54	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	3	120	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, dan Kab. Bangka Selatan	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	168.528	66,38	Kep. Bangka Belitung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung	76,49	31,98	Kab. Bangka Selatan	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas (SP)	1	18,43	Kab. Bangka Selatan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Jumlah luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL (Ha)		0,06	Kab. Bangka Selatan	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Sarana dan Prasarananya dikembangkan dan fungsional	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang prasarana, sarana, dan utilitasnya berkembang dan fungsional (Kawasan)	1	12,33	Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)		1,02	Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 135

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (Bidang)		0,11	Kab. Bangka Selatan	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan Transmigrasi	Luas tanah yang memiliki sertipikat hak pengelolaan transmigrasi (Ha)		0,04	Kab. Bangka Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Bidang)			Kab. Bangka Selatan	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,3				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,30				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 136

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	720				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	800	5,62	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	8	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	8	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 137

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,60			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 138

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	8	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	8	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	8	0,20			
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	49	1,73			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 139

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	8	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	12	1,06	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	8	0,47			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	7	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 140

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	8	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	8	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	8	0,09			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	8	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	8	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	8	0,09			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	8	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 141

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	50,39	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 142

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	168.528	66,38	Kep. Bangka Belitung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	111.928	1,09	Kep. Bangka Belitung	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	32,10	Kep. Bangka Belitung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Kep. Bangka Belitung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	8	2,74	Kep. Bangka Belitung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sekitar KI/KEK/KSPN		1,70	Sekitar KI Sadai	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	8	6,85	Kep. Bangka Belitung	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kepulauan Riau						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	>1				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 143

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	>1				
Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Tahun)	650.000	909,79	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Tahun)	650.000	1.300	Kota Batam	KPBU	BP Batam
Pengembangan fasilitas pelabuhan penumpang domestik dan internasional	Jumlah penumpang pelabuhan domestik (Orang/Tahun)		565,79	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pengembangan fasilitas Pelabuhan bongkar muat Batu Ampar	Jumlah kapasitas bongkar muat pelabuhan (TEU'S)	1.000.000	4.138	Kota Batam	Kerjasama Pemanfaatan (KSP)	BP Batam
Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil	Jumlah kapasitas bongkar muat barang (ton/jam)		250,85	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Penyediaan air baku untuk kawasan Barelang	Tambahan volume air baku yang tersedia (L/detik)	1.000	1.644,93	Kota Batam, Barelang	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pembangunan infrastruktur energi listrik	Jumlah peningkatan daya terpasang (MW)		4.200	Kota Batam	Badan Usaha/Swasta	BP Batam
Pembangunan infrastruktur energi gas	Jumlah peningkatan daya terpasang (mbtu)		2.200	Kota Batam	Badan Usaha/Swasta	BP Batam
Fasilitas Air Limbah (Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3)	Luas kawasan pengelolaan limbah B3 (Ha)	20	427,25	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah fisik bangunan (unit)		84	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional	Jumlah peralatan kesehatan (Lot)		200	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase	Jumlah sarana prasarana jalan dan jembatan kawasan yang dibangun (km)	4	1.572,08	Kota Batam	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan KPBPB Batam	BP Batam
Jalan lintas Bintan	Panjang jalan yang dibangun (Jalan Bintan) (km)		250	Kab. Bintan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi - Tg Berikat)	Panjang jalan yang dibangun (Jalan Batam) (km)	12	80	Kota Batam	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 144

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		90	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		379	Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)			Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Malarko	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	90	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub
Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		85	Kepulauan Riau	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	>1				
Pengembangan KEK Galang Batang			1.800	Kab. Bintan		Swasta
Jalan Akses KEK Galang Batang I	Panjang jalan yang dibangun (km)		11,78	Kab. Bintan	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Galang Batang	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		29,25	Kab. Bintan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Jembatan Batam-Bintan (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)			Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitas dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)	27	41,50		Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional	Kemenperin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 145

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan KI (unit)	13	460		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kemenperin
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintang Aerospace	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	>1				
Pengembangan KI Bintang Aerospace			5.374	Kab. Bintang		Swasta (PT Bintang Aviation Investmens)
Jembatan Batam-Bintang (Potensi)	Jembatan yang dibangun (lokasi)			Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Bintang Aerospace	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Bintang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan PLTG MPP (Mobile Power Plant) Tanjung Pinang	Jumlah kapasitas pembangkit (MW)			Tanjung Pinang		PLN
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,2	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)	27	41,50		Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional	Kemenperin
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan KI (unit)	13	460		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kemenperin
Pembangunan DPP Baru Batam-Bintang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	>1				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 146

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Jalan lintas Bintang	Panjang jalan yang dibangun (km)		250	Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan kawasan Bintang Resort			36.250	Kab. Bintang		Swasta (PT Bintang Resort Cakrawala)
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)		49	Kepulauan Riau	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Jalan Akses pusat pertahanan Natuna	Panjang jalan yang dibangun (km)	8	1.098,99	Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Percepatan pengembangan Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark	Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark		1	Kabupaten Natuna		Kemenko Kemaritiman dan Investasi
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	85	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP)	1	7,75	Kepulauan Riau	Program Pengembangan Kepariwisata	Kemendikbud
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	335,22	7,27	Provinsi Kepulauan Riau, Kab. Natuna, Kab. Kepulauan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 147

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Kepulauan Riau	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Sumatera					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Kepulauan Riau)				Kota Tanjungpinang, Kota Batam (PKN)		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Kepulauan Riau		KPBU
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		379	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		145,23	Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		241	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		253	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		62,50	Kota Tanjungpinang, Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	291	513,60	Provinsi Kepulauan Riau	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	3097 desa berkembang; 1156 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 148

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN	0,52				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	7				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	62,41	50,65	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		5,32	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		10,48	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	90	25,20	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 149

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	1,28	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Natuna, Lingga	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan	75	44,02	Kab. Bintan	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Bintan	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Bintan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Bintan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industry (unit)	1	40	Kab. Bintan	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	27.450	44,01	Kep. Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai	0,52	181,44	Kab. Natuna		
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri	(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna	5	11,03	Kab. Natuna	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 150

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana	Jumlah (unit) pasar rakyat yang direvitalisasi		6	Kab. Natuna	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan
Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)		49	Kepulauan Riau	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan
Fasilitasi Legislati RDTR Ranai Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah dokumen Harmonisasi Peraturan Presiden		0,50	Kab. Natuna	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	1,44	Kab. Natuna	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang terbangun	Jumlah Kapal perikanan bantuan yang terbangun			Kab. Natuna	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang dibangun sarana prasarannya (pulau)	3	22,5	Pulau Sub, Pulau Pelampon, Pulau Malang Berdaun	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	85	Kepulauan Riau	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Kemeterian Perhubungan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi	50	0,10	Kab. Natuna	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE	Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi)	1	4	Kab. Natuna	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Kementerian Kominfo
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	2	0,20	Kab. Natuna	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	2	0,67	Kab. Natuna	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Percepatan pembangunan Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark	Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark		1	Kab. Natuna		Kemenko Kemaritiman dan Investasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 151

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kecamatan prioritas yang sarana prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan pemerintahannya tersedia di Prov Kepulauan Riau (kecamatan)	35	203,71	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		
Pembangunan dan peningkatan SPAM	Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 152

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Rehabilitasi Kantor Camat dan Kantor Desa	Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor Camat dan Kantor Desa nya dibangun (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan sarpras kesehatan (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 153

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan alat-alat kesehatan	jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat kesehatan (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi prasarana belajar	jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya dibangun/direhabilitasi (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 154

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar: Provinsi Kepulauan Riau (Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kota Batam)	Tambahan debit air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)	0,06	39,11	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Kementerian PUPR
Pengadaan sarana belajar	Jumlah kecamatan yang difasilitasi pengadaan sarana belajar (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 155

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan dan pengembangan prasarana SMK	Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)	35		Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintang Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintang Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota		Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	25	3,60	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintang Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintang Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kementerian ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 156

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan PLTS Rooftop	Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun (paket)	80	70,40	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintang Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintang Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	6	0,60	Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintang Utara, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintang Pesisir, Kec. Moro, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Meral Barat, Kec. Belat, Kec. Bungurang Barat, Kec. Serasan, Kec. Bunguran Utara, Kec. Subi, Kec. Pulau Laut, Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Serasan Timur, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Raja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)		90	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Malarko	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	90	Kepulauan Riau	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kementerian Perhubungan
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,3				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	56,3				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 157

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	164				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	164				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	17.743				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	164				
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepatakan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah					
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Kepulauan Riau	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	718				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		18,94	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		42,36	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 158

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	8	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	8	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 159

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,27			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	10	3,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	3,15			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	8	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 160

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	8	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	8	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	8	0,20			
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	50	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Sistem penilaian terpadu antar K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	8	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri

Sumatera - 161

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat manajemen strategi pemerintahan daerah (strategi inovasi daerah dan manajemen pembangunan daerah perbatasan)	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	14	1,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	8	0,30			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,18	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	7	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	8	0,28	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	8	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	8	0,09			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	8	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	8	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 162

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	8	0,09			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	8	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,74	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	1	0,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

Sumatera - 163

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	27.450	44,01	Kep. Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	16.489	0,16	Kep. Riau	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	32,10	Kep. Riau	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Kep. Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	0	2	Kep. Riau (Bintan)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumatera - 164

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	7	2,53	Kep. Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	7	6,61	Kep. Riau	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan	0	2,10	Serasan (Kep. Riau)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

7. PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI

7.1 Target Pembangunan Wilayah Jawa-Bali Tahun 2024

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan sebagai berikut.

Tabel 7.1.
Target Pembangunan Wilayah Jawa-Bali 2020-2024

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	3,57	3,47	3,18	3,05	3,00	2,95	2,90
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24	6,22	5,90	5,70	5,50	5,10	4,80
Jawa Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,64	5,40	5,40	5,50	5,70	5,90	6,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,45	6,91	6,31	6,07	5,70	5,24	4,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,17	7,99	7,70	7,50	7,40	7,00	6,70
Jawa Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,32	5,40	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,32	10,8	9,81	9,43	9,00	8,55	8,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,51	4,49	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10
DI Yogyakarta	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,20	6,10	6,30	6,40	6,50	6,80	6,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,13	11,7	9,11	8,86	8,25	7,81	7,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	3,14	3,00	2,80	2,60	2,20	1,90
Jawa Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,50	5,60	5,80	6,00	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	10,98	10,37	10,08	9,71	9,29	8,70	8,51
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,99	3,92	3,60	3,40	3,20	2,80	2,50

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Banten	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24	5,09	4,80	4,50	4,00	3,65	3,48
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,52	8,11	8,00	7,80	7,70	7,30	7,00
Bali	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35	5,60	6,00	6,50	6,60	6,60	6,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,01	3,79	3,52	3,33	3,05	2,75	2,45
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,37	1,52	1,50	1,30	1,30	1,20	1,00

Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.

Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Jawa dan Bali, rencana kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 7.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Jawa-Bali 2020-2024

Provinsi	Keburuhan Investasi	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	Rp triliun	1.085,47	1.179,27	1.311,96	1.437,12	1.579,67	1.735,42	1.910,97
Jawa Barat	Rp triliun	497,02	527,29	588,95	642,36	701,87	786,74	869,23
Jawa Tengah	Rp triliun	378,96	414,67	451,02	493,69	545,82	607,49	672,30
DI Yogyakarta	Rp triliun	40,50	43,86	44,51	49,01	54,48	61,18	68,01
Jawa Timur	Rp triliun	586,22	637,08	697,12	760,78	839,91	935,73	1.035,87
Banten	Rp triliun	180,90	186,89	220,62	240,35	264,07	293,03	323,15
Bali	Rp triliun	74,68	75,85	90,62	99,58	110,54	123,33	137,32

Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020

Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.

7.2 Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, sebagaimana diuraikan di dalam Bab 3 RPJMN 2020-2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa-Bali dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

Tabel 7.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa-Bali

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan					
Banten	1	Kota Cilegon*	Jawa Tengah	1	Kabupaten Brebes
	2	Kabupaten Serang		2	Kota Tegal*
	3	Kota Serang*		3	Kabupaten Tegal
	4	Kabupaten Lebak		4	Kabupaten Pemalang
	5	Kabupaten Tangerang		5	Kabupaten Pekalongan
	6	Kota Tangerang		6	Kota Pekalongan*
	7	Kota Tangerang Selatan		7	Kabupaten Batang
DKI Jakarta	1	Kabupaten Kepulauan Seribu		8	Kabupaten Kendal
	2	Kota Jakarta Barat		9	Kota Semarang
	3	Kota Jakarta Pusat		10	Kabupaten Demak
	4	Kota Jakarta Selatan		11	Kabupaten Kudus
	5	Kota Jakarta Timur		12	Kabupaten Pati
	6	Kota Jakarta Utara		13	Kabupaten Rembang
Jawa Barat	1	Kota Depok		14	Kabupaten Semarang
	2	Kabupaten Bogor		15	Kabupaten Grobogan
	3	Kota Bogor		16	Kota Salatiga
	4	Kota Bekasi		17	Kabupaten Boyolali
	5	Kabupaten Bekasi		18	Kabupaten Sukoharjo
	6	Kabupaten Karawang		19	Kota Surakarta*
	7	Kabupaten Purwakarta	1	Kabupaten Tuban	
	8	Kabupaten Bandung Barat	2	Kabupaten Lamongan	
	9	Kota Cimahi	3	Kabupaten Gresik	
	10	Kota Bandung	4	Kota Surabaya	
	11	Kabupaten Sumedang	5	Kabupaten Sidoarjo	
	12	Kabupaten Majalengka	6	Kabupaten Mojokerto	
	13	Kabupaten Cirebon	7	Kota Mojokerto	
	14	Kota Cirebon*	8	Kabupaten Bangkalan	
Bali	1	Kabupaten Tabanan	9	Kabupaten Pasuruan	
	2	Kabupaten Badung	10	Kota Pasuruan*	
	3	Kota Denpasar	11	Kabupaten Probolinggo	
	4	Kabupaten Gianyar	12	Kota Probolinggo*	
	5	Kabupaten Klungkung	13	Kabupaten Situbondo	
			14	Kabupaten Banyuwangi	
			15	Kabupaten Malang	
			16	Kota Malang*	
			17	Kota Batu*	

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pemerataan					
Banten	1	Kabupaten Pandeglang	DI Yogyakarta	1	Kabupaten Sleman
Jawa Barat	1	Kabupaten Bandung		2	Kota Yogyakarta*
	2	Kabupaten Garut		3	Kabupaten Bantul
	3	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Timur	1	Kabupaten Kediri
	4	Kota Tasikmalaya		2	Kota Kediri*
	5	Kabupaten Ciamis		3	Kabupaten Bondowoso
	6	Kota Banjar		4	Kabupaten Lumajang
	7	Kabupaten Kuningan		5	Kabupaten Jember
	8	Kabupaten Sukabumi		6	Kabupaten Pamekasan
	9	Kota Sukabumi*		7	Kabupaten Sumenep
	10	Kabupaten Pangandaran	Bali	1	Kabupaten Buleleng
Jawa Tengah	1	Kabupaten Cilacap			
	2	Kabupaten Banyumas			
	3	Kabupaten Kebumen			
	4	Kabupaten Magelang			
	5	Kota Magelang*			
	6	Kabupaten Klaten			

Keterangan:

* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

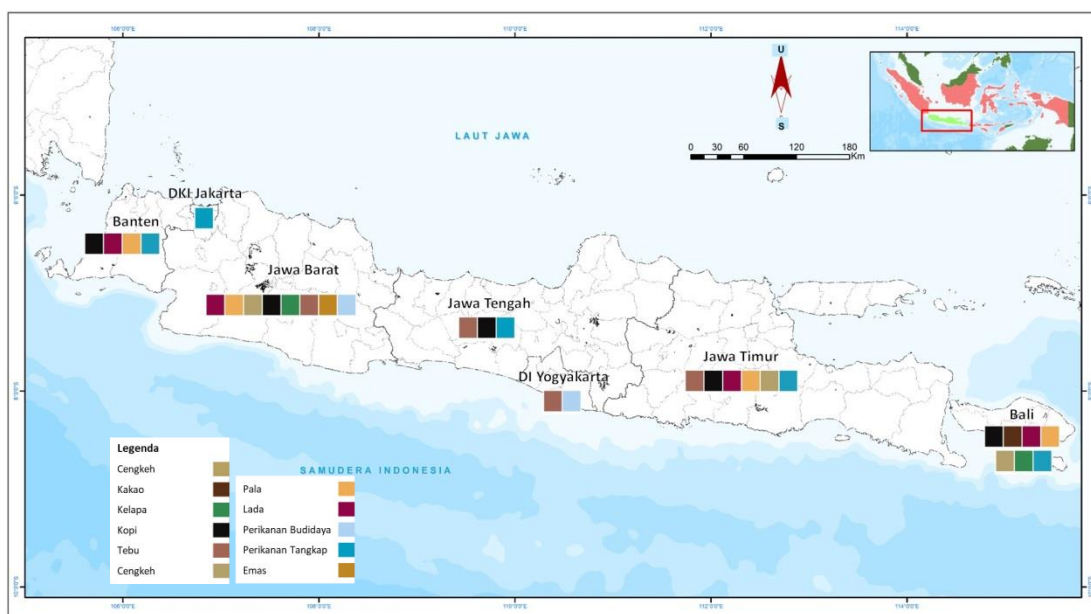
7.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa-Bali, antara lain cengkeh, lada, pala, kelapa, kopi, tebu, kakao, emas, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya, yang difokuskan pada:
 - a. Provinsi DKI Jakarta: perikanan tangkap;
 - b. Provinsi Jawa Barat: lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, emas, garam, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - c. Provinsi Jawa Tengah: tebu, kopi, garam, dan perikanan tangkap dan budidaya;
 - d. Provinsi DI Yogyakarta: tebu dan perikanan budidaya;
 - e. Provinsi Jawa Timur: tebu, kopi, lada, pala, cengkeh, garam, perikanan tangkap dan budidaya;
 - f. Provinsi Banten: kopi, lada, pala, dan perikanan budidaya; dan

- g. Provinsi Bali: kopi, kelapa, kakao, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap;
- 2) Pengembangan sektor perikanan melalui WPP antara lain WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa) dan WPP 573 (berlokasi di Samudera Hindia/Selatan Jawa);
 - 3) Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
 - 4) Pengembangan kawasan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis; dan
 - 5) Pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.

Gambar 7.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Jawa-Bali



7.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung, di beberapa Kawasan Industri (KI) antara lain KI Brebes dan KI Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;



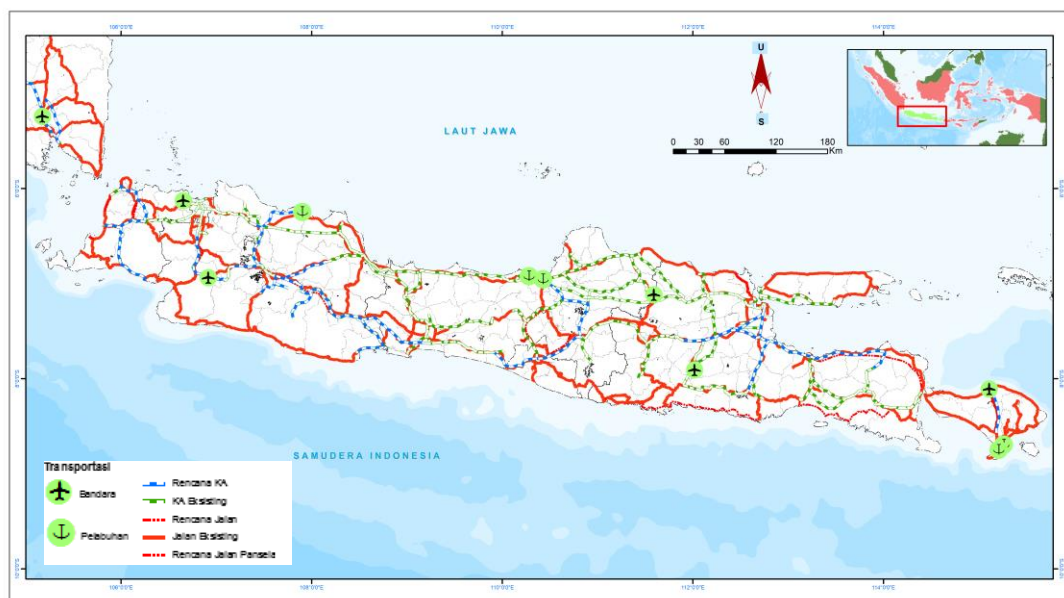
- 6 -

- 2) Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh, DPP Borobudur dskt, DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi dskt, dan DPP Revitalisasi Bali;
- 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap- Yogyakarta, Pembangunan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan Lintas Pansela, Jalan Lintas Penghubung Utara – Selatan Bali, Jalur Ganda KA Rangkasbitung – Merak, Reaktivasi KA Rangkasbitung-Labuan/Bayah, Reaktivasi KA Jalur Jawa Barat, KA Akses NYIA, Pembangunan KA Cepat Jakarta – Bandung, Pembangunan KA Ekspres Jakarta – Semarang, Pembangunan Bandara Ngloram Cepu, dan Pembangunan Bandara Bali Baru;
- 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 5) Pembangunan pusat perdagangan untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Pelabuhan Hub Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak;
- 6) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi:
 - a. Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.713 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
 - b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 275 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur and Bali, tekstil di Jawa Barat, Jawa Tengah, kimia di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, manufaktur di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, otomotif di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, minyak di Jawa Barat, tambang di Jawa Barat, dan Jawa Timur, perkapalan di Jawa Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian;
 - c. Pengembangan BLK di wilayah Jawa- Bali berjumlah 104 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung);
 - d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Jawa-Bali.

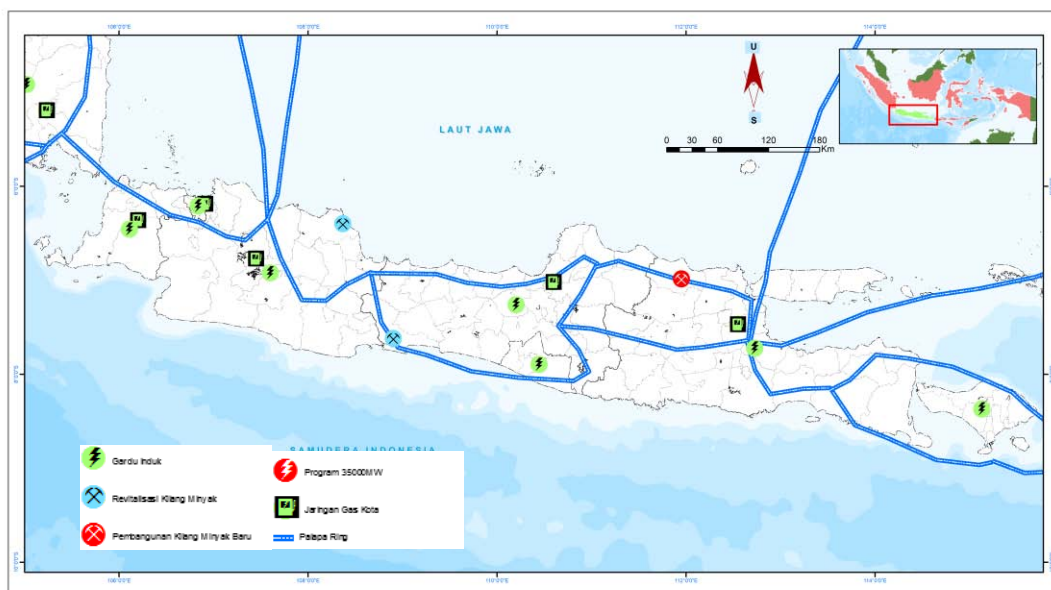
Gambar 7.2.
Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Jawa-Bali



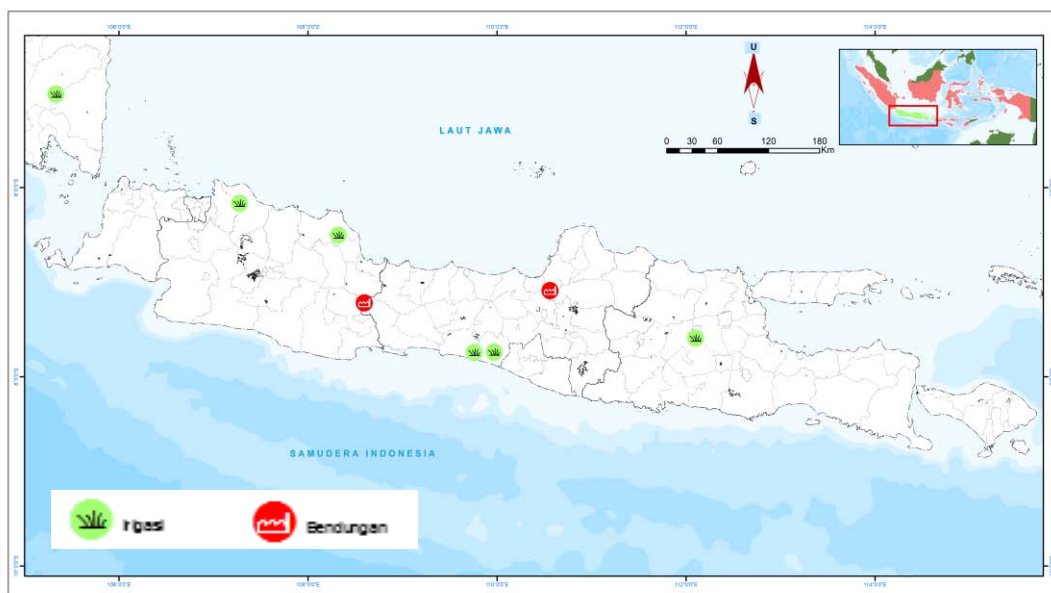
Gambar 7.3.
Peta Jaringan Infrastruktur Perhubungan di Wilayah Jawa-Bali



Gambar 7.4.
Jaringan Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi di Wilayah Jawa-Bali



Gambar 7.5.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Pengairan di Wilayah Jawa-Bali





- 9 -

7.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas WM Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, dan WM Denpasar; pembangunan Kota Baru Maja; serta pengembangan Kota Sukabumi, Cirebon, Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Kediri, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Batu, Cilegon dan Serang (Tabel 7.3); dan
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di WM Jakarta (Jabodetabekpunjur), WM Bandung (Cekungan Bandung), WM Semarang (Kedungsepur) dan WM Surabaya (Gerbangkertosusila) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.

7.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Tertinggal

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Jawa berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Lebak dan Pandeglang di Provinsi Banten; serta Bangkalan, Bondowoso, Sampang, dan Situbondo di Provinsi Jawa Timur;
- 2) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 3) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Pandeglang, KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi, KPPN Klungkung dan KPPN Buleleng;
- 4) Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 3 kabupaten di Bali, 2 wilayah administratif di DKI Jakarta, 3



- 10 -

kabupaten di DI Yogyakarta, 16 kabupaten di Jawa Tengah, 20 kabupaten di Jawa Barat, 16 kabupaten di Jawa Timur dan 4 kabupaten di Banten yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023;

- 5) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 3,6 persen di Banten, 4,85 persen di Jawa Barat, 2,25 persen di DKI Jakarta, 8,48 persen di Jawa Tengah, 7,75 persen di DI Yogyakarta, 8,30 persen di Jawa Timur dan 2,65 persen di Bali; dan
- 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa-Bali;
 - b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
 - c. Peningkatan konservasi hutan; dan
 - d. Pemantapan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.

7.2.5 Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak.
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kotan Tangerang

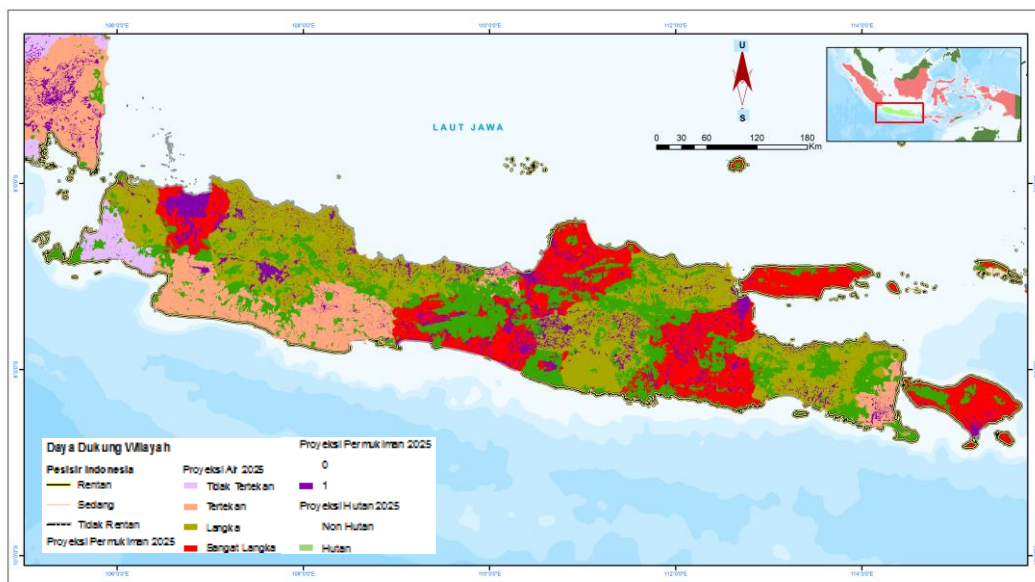


- 11 -

- Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor) dan Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Jember);
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor) dan Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Jember).
 - 13) Penataan Ruang dan Lahan
 - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - h. Pembentukan bank tanah;
 - i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
 - 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
 - 15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi:
 - a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi;
 - d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
 - e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;

- f. Pengembangan energi baru terbarukan;
- g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan
- h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Gambar 7.6.
Peta Daya Dukung Wilayah Jawa-Bali Tahun 2025



7.3 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Jawa-Bali

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Jawa-Bali tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Borobudur Dskt, (b) Bromo-Tengger-Semeru, dan (c) Revitalisasi Bali;
- 2) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
- 3) Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas);
- 4) Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar;
- 5) Pembangunan Kota Baru Maja;
- 6) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
- 7) Penanganan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa;

- 8) Pembangunan KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung);
- 9) Revitalisasi Kilang Minyak: (a) Balongan, (b) Cilacap; dan (c) Pembangunan Kilang Baru Tuban;
- 10) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Tanjung Priok dan (b) Tanjung Perak;
- 11) Pembangunan Waduk Multiguna Purworejo;
- 12) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan: Metropolitan (a) Jakarta, (b) Bandung, (c) Semarang, dan (d) Surabaya;
- 13) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta): (a) Provinsi DKI Jakarta, (b) Provinsi Jawa Barat, (c) Provinsi Jawa Tengah, dan (d) Provinsi Jawa Timur;
- 14) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis: Citarum; dan
- 15) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Jawa Timur.

Gambar 7.7.
Peta Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Jawa Bali





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 1

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PULAU JAWA-BALI

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
PP 2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	Laju pertumbuhan PDRB Jawa-Bali (persen/tahun)	6,27	669.943,25			
	Share PDRB Wilayah Jawa-Bali (persen)	59,81				
	IPM Wilayah Jawa-Bali (min-maks)	74,60-84,23				
	Persentase penduduk miskin wilayah Jawa-Bali (persen)	5,93				
Provinsi DKI Jakarta						
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DKI Jakarta					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi DKI Jakarta, a.1 Kota Administasi Jakarta Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)				DKI Jakarta		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi DKI Jakarta		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Provinsi DKI Jakarta		Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:						



Jawa-Bali - 2

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.670	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	26.150	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Rel (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	29.800	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	350	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Jakarta Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	4.050	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub, Pemda, KPBU
c. Perkeretaapian Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	33 (selesai)	2.040	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi perkeretaapian	Kemhub
d. Elevated Loopline (Dukungan KPBU)	Panjang jalur yang dibangun (km)	8 (selesai)	4.140	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
d. Elevated Loopline (Dukungan APBD)	Panjang jalur yang dibangun (km)	8 (selesai)	23.460	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
e. KA Outer Jabodetabek	Panjang jalur yang dibangun (km)	10 (selesai)	500	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok	1	5.000	Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemhub, BUMN (Pelindo II), Swasta
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	432 (lanjutan)	16.280	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub
Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)		42.000	Jakarta, Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub (KPBU)
Jalan Tol Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	57,90	110.823	Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Jalan	Badan Usaha
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.435	2.537,08	Provinsi DKI Jakarta	Program Pengembangan Perumahan	
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta		BUMN



Jawa-Bali - 3

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	6	300	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jumlah kawasan TOD (termasuk fasilitas pejalan kaki, sepeda, serta zona selamat sekolah) yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	8.000	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemehub, Pemda, KPBU
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	400	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemehub
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)	2 (selesai)	70	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemehub
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		3.702	Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		3.082	Provinsi DKI Jakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		227,80	Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		4.128,95	Provinsi DKI Jakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		1.297,24	Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, Swasta
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		125,06	Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)		122,60	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta		KPBU
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengaman pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta		BIG
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	39,68	WM Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 4

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,60				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	77,43				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	129				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	129				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	11.658				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	129				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	12				
	Persentase capaian SPM di daerah(%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi DKI Jakarta	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	377				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik		0,15	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		11,85	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		3,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 5

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	1	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 6

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,92			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	1	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	1	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	1	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	1	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	100	1,66			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 7

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	1	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	0,07	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	1	0,29			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	1	0,01			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 8

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	1	0,01			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	1	0,01	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	2,56	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	5	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 9

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.					
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	1	6,63	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	2		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus					
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)			DKI Jakarta	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)			DKI Jakarta	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	32,10	DKI Jakarta	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	5.000	539,78	DKI Jakarta	Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	Kementerian ATR/BPN
Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah	1	212,51	DKI Jakarta	Pemanfaatan Tanah Pemerintah	Kementerian ATR/BPN
Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait Tanah Adat/Ulayat	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat	34	49	DKI Jakarta	Pengembangan dan pengelolaan administrasi Hukum dan Bantuan Hukum Kementetian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 10

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	DKI Jakarta	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR		0,09	DKI Jakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota		0,10	DKI Jakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Jawa Barat						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Pembangunan DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kab. Bandung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan		209,60	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	90 (lanjutan)	3.007,30	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	406,94	6,50	Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Purwakarta, Kab. Kuningan, Kab. Pangandaran	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	681,40	43,35	Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 11

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	84,49	1,95	Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	458,79	18,50	Provinsi Jawa Barat, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Subang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat					
Optimalisasi produksi emas	jumlah produksi (Ton)				Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Jawa Barat, a.l: Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Garut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)				Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Jawa Barat		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat		Pemda (DAK)
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker



Jawa-Bali - 12

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jumlah kawasan TOD (termasuk fasilitas pejalan kaki, sepeda, serta zona selamat sekolah) yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	8.000	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	400	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemhub
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)	2 (selesai)	70	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemhub
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	90 (lanjutan)	3.007,30	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub
Pembangunan Underpass Bulak Kapal	Panjang Underpass terbangun (lokasi)		122,85	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	1	15	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Jatiluhur (lpd)		43,50	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		4	Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Kab. Bekasi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Badan Usaha
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		3,20	Kab. Bogor, Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok (Provinsi Jawa Barat)		Badan Usaha
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		1.282	Kota Bekasi, Kota Depok (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		7.819	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		82,20	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		3.333	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		974,47	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR



Jawa-Bali - 13

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		86,33	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengaman pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat		BIG
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Bandung (Cekungan Bandung)				Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat		Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel	1 (selesai)	3.390	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel	1 (selesai)	669	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel	1 (selesai)	1.329	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan	1	60	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan	1 (selesai)	720	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan (APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan	1 (selesai)	80	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub, Pemda, KPBU



Jawa-Bali - 14

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
c. Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka	Panjang jalur yang dibangun	27 (selesai)	1.000	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	90 (lanjutan)	3.007,30	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	24 (selesai)	1.010	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	24 (selesai)	910	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)		KPBU
Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)		209,60	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Jalan Akses Stasiun Gede Bage	Panjang jalan yang dibangun (km)		193,60	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	432 (lanjutan)	16.280	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)		42.000	Jakarta, Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	2	25	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Gedebage - Garut - Tasikmalaya yang dibangun		1.170	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)		KPBU
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang dibangun		340	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang dibangun		1.300	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Pembangunan Fly Over Kopo	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		381,19	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR



Jawa-Bali - 15

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	6.717	11.874,78	Provinsi Jawa Barat	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	5	50	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Jatigede (lpd)		43,50	WM Bandung (lingkup pelayanan), Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		2,40	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		1.610	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		4.670	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		86,60	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		2.382,15	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		652,05	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		59,06	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)			WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	1,26	1.890	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat		KPBU



Jawa-Bali - 16

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	13,37	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Barat)				Kota Sukabumi, Kota Cirebon		
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang dibangun		1.300	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)		KPBU
Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	90 (lanjutan)	3.007,30	Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pembangunan Bandara Sukabumi	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	400	Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		930	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		14,60	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		381,20	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		71,93	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		22	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		36	Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	197 desa berkembang; 2893 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	8,12				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					



Jawa-Bali - 17

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	71,81	828,59	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	7,12	DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital		109,24	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat		0,27	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		214,05	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 18

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	1.743	486,68	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		1,28	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	14	2,12	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Sukabumi	51	127,65	Kab. Sukabumi	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3,0	Kab. Sukabumi	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)		0,18	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40,0	Kab. Sukabumi	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	486.958	418,70	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,60				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	77				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	129				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	129				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	11.658				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	129				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	12				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	3.036				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	8	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		36,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG



Jawa-Bali - 20

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		13,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,93	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Layanan Data Center (Hari)	362	327,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Pembangunan Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia (TerraByte)	1.200	110	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	28	0,27	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	32	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakorтек, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2	5,47			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 21

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	5	2,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	1	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27			
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,91			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	28	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	28	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	32	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	28	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	28	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	28	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 22

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	28	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	65	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	28	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	28	0,86			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	27	0,57	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	28	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	28	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 23

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	28	0,32			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	28	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	28	0,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	28	0,32			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	28	0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,82	Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 24

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan pemekaran	2	1,00	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah					
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	486.958	418,70	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	125.961	1,14	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	28	32,10	Jawa Barat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	12	4,46	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	11	11,25	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1,66	Jawa Barat (KSN Kawasan Teropong Bintang Boscha)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Provinsi Jawa Tengah						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Borobudur dan sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	>1				
Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo	Bandara dikembangkan		300	Boyolali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemhub, BUMN
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	Panjang jalur kereta api yang terbangun		240	Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	53	699	Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Borobudur dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		52	Kab. Magelang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	3	10,64	Prov. Jawa Tengah	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Brebes	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	>1				
Jalan Akses KI Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)	3	30	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Lingkar Industri Brebes - Tegal (Kecipir-Blangko -Kelampok), Kab. Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)		95	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Peningkatan jalan kabupaten akses kawasan industri, Kab. Brebes	Panjang jalan yang dibangun (km)		80	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Tegal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	140	Jawa Tengah		
Pembangunan perlintasan tidak sebidang KA pada Ruas Pejagan - Ketanggungan, Kab. Brebes	Panjang Fly Over terbangun (m)	1 (selesai)	100	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 26

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	>1				
Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon	Panjang Jalan yang dibangun		95	Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Kendal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		90	Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	10.000	Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh, BUMN (Pelindo III), Swasta
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Kendal	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	0,09	29,25	Kab. Kendal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Peningkatan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	542,10	21,86	Provinsi Jawa Tengah, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Kudus, Kab. Semarang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	1237,57	78,15	Provinsi Jawa Tengah, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Jepara, Kab. Temanggung	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Jawa Tengah, a.l Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Batang, Kab. Pemalang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 27

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang (Kedungsepur)				Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Grobogan		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik		0,70	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah		Pemda (DAK)
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.500	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.500	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Rel (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	310	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	150	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	510	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub, Pemda, KPBU
Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas	Terbangunnya KA akses Pelabuhan (km)		7,50	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	53	699	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub



Jawa-Bali - 28

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	432 (lanjutan)	16.280	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	10.000	Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenuh, BUMN (Pelindo III), Swasta
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya yang dibangun		30.000	Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Semarang - Demak yang dibangun		8.000	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Semarang - Demak yang dibangun		5.300	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	4.722	8.347,62	Provinsi Jawa Tengah	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	6	60	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Grobogan (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Semarang Barat (lpd)		43,50	WM Semarang (lingkup pelayanan), Provinsi Jawa Tengah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		3,20	Kota Semarang, Kendal, Demak, Kota Salatiga (Provinsi Jawa Tengah)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		450,01	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Grobogan (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		92	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kab. Grobogan (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		689,09	Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Grobogan (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		12,86	Kab. Kendal, Kab. Semarang (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	0,88	1.320	WM Semarang (Kedungsepur), Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah		Badan Informasi Geospasial
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	5,19	WM Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Tengah)				Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal		
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah		Pemda (DAK)
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	Terbangunnya KA akses Bandara (km)		240	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan (lokasi)		300	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh, BUMN
Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	53	699	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (Km)		600	Kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pengembangan Pelabuhan Tegal	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	140	Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenuh
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Solo-Yogya yang dibangun		26.400	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah		KPBU
Pembangunan Fly Over Cangkuk	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)	1 (selesai)	53,88	Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Wasosukas (lpd)		43,50	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR



Jawa-Bali - 30

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		957,03	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		53,70	Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		621,52	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		62,77	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		53,70	Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,10	52	Kota Pekalongan, Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	197 desa berkembang; 2893 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	9,59				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	69,02	1.174,89	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, DPP Borobudur	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kemendesa PDTT 2. Kemendagri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	3	21,35	DPP Borobudur	Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 31

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital		143,51	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat		0,27	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 32

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		283,39	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	2.562	715,45	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,56	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		1,28	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karangayar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	12	1,81	Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Grobogan, Blora, Demak, Pemalang, Brebes, Pekalongan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Magelang dan Kendal	68.00; 67.00	168,67	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	172	81,88	Kab. Kendal	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,75	Kab. Kendal	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Magelang	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan		0,36	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80	Kab. Magelang dan Kab. Kendal	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	122.073	244,20	Jawa Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,60				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	77,43				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	129				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	129				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	11.658				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 34

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	129				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	12				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Tengah	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.952,67				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	5	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km ²)	2.800	103,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km ²)	2.800	39,64	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,72	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	36	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	32	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 35

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2	2.263,70			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	6	1,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,91			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	36	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	36	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	32	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	36	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	36	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	36	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	36	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	75	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	36	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	0,07	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	36	1,03			



Jawa-Bali - 37

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	35	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	36	0,60	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	36	0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	36	0,41			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	36	0,41	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	36	0,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	36	0,41			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	36	0,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 38

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	19,54	Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah					
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	122073	244,20	Jawa Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	3403	0,05	Jawa Tengah	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	36	32,10	Jawa Tengah	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	2	1,72	Jawa Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	10	3,75	Jawa Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	9	9,51	Jawa Tengah	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan	0	1,74	Jawa Tengah (KSN Kawasan Sangiran)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi DI Yogyakarta						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Borobudur dan sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta	>1				
Jalan Akses KSPN Borobudur	Panjang jalan yang dibangun (km)		175	Yogyakarta	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Kulon Progo	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		200	Yogyakarta	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemhub, BUMN
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Bruas Bawen - Yogya yang dibangun		30.000	Jawa Tengah		KPBU
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Borobudur dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		52	Kab. Magelang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Perekonomian Terpadu (KAPET) Kab. Kulon Progo Tahap 2 (Konstruksi dan Supervisi)	Air baku untuk kawasan pariwisata dan industri (m3/detik)			Kab. Kulonprogo	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas	jumlah fasilitasi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas		1,40	Prov. DIY	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM



Jawa-Bali - 40

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	103,39	4,15	Provinsi DI Yogyakarta, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi DI Yogyakarta, a.l: Kab. Sleman, Kab. Bantul	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali					
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (DI Yogyakarta)				Kota Yogyakarta		
Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	KA akses Bandara yang dibangun (km)		800	Kota Yogyakarta (lingkup pelayanan), Provinsi DI Yogyakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pengembangan Bandara Kulon Progo	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		200	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh, BUMN
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	Panjang jalur Elektrifikasi KA yang dibangun (Km)		600	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Bawen-Yogya yang dibangun		30.000	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta		KPBU
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Solo-Yogya yang dibangun		26.400	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta		KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	571	1.008,64	Provinsi DI Yogyakarta	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		92,44	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		313,01	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		10,90	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		223,52	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		68,54	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		3,87	Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	197 desa berkembang; 2893 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	11,88				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	75,17	64,89	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)		6,43	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)		12,86	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	129	35,91	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 42

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Kulon Progo, Bantul	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,60				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	77,43				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	129				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	129				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	11.658				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	129				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	12				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi DI Yogyakarta	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	752				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	1	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		11,85	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		3,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 43

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Database dan pengumpulan data Peraturan Daerah yang dibentuk	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	11	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	11	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	1	2,26			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 44

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya(%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,91			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	6	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	6	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	32	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	6	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	6	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	6	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	6	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	86	0,61			



Jawa-Bali - 45

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	6	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	0,07	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	6	0,41			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	5	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	6	0,06			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	6	0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 46

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	6	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	6	0,06			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	6	0,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	13,32	Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah					
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
	(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.			Pusat (alokasi Kementerian)		
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut dan peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus	1	6,63	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	3		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.	Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi) daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada daerah otonomi khusus					
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	43.836,25	69,75	Yogyakarta	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	8	0,76	Yogyakarta	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	6	32,10	Yogyakarta	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Yogyakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 48

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	9	3,25	Yogyakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	9	8,25	Yogyakarta	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Jawa Timur						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Fasilitasi Koordinasi dan Perizinan KI Madura	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	>1		Kab Madura		
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Madura	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Jawa Timur	Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu untuk wilayah Jawa Timur (1 unit)		1.002	Jawa Timur (Kab. Lamongan)		SWASTA
Jalan Akses KI Madura	Panjang jalan yang dibangun (km)	5	50	Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan akses menuju KKJSM yang terintegrasi dari Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan	Panjang jalan yang dibangun (km)	20	180	Jawa Timur	Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	BPWS
Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh Pangarengan)	Panjang jalan yang dibangun		80	Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan (KPBU)	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	600	Jawa Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Kemenhub, BPWS, KPBU
Penyiapan kawasan siap bangun (Mendukung KI Madura)	Luas lahan kawasan (ha)	25	384,82	Jawa Timur	Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	BPWS
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI Madura	Panjang jalan dibangun/dipelihara (km)	29,40	308,56	Jawa Timur	Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	BPWS
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Bromo-Tengger-Semeru	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	>1				



Jawa-Bali - 49

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger Semeru	Panjang jalan yang dibangun (km)	20	223	Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Juanda	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		250	Jawa Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenuh, BUMN
Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	25 (selesai)	1.210	Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Bromo-Tengger-Semeru	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		13	Kab. Malang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pembangunan DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	>1				
Jalan Pansela Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun	36	2.496,58	Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	60	908,20	Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kab. Banyuwangi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	>1				
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Singhasari	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		9,75	Kab Malang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	5,95	Prov. Banten	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 50

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Peningkatan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur					
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ha)	2640,92	106,35	Provinsi Jawa Timur, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	718,78	45,18	Provinsi Jawa Timur, Kab. Malang, Kab. Ponorogo, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Pasuruan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	109,02	2,38	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi garam	jumlah produksi garam nasional (juta ton)	3,40		Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya (Gerbangkertosusila)				Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan		

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur		Pemda (DAK)
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan						
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	1.710	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Rel (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)	1 (selesai)	336	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBN)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1	100	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan KPBU)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	670	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Surabaya Berbasis Jalan (Dukungan APBD)	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan (perkotaan)	1 (selesai)	500	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemhub, Pemda, KPBU
c. Pengembangan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila	Panjang jalur KA yang dibangun (km)	20 (selesai)	1.000	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub
Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-Mojokerto-Jombang)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	25 (selesai)	1.210	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	60	908,20	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak	Terseleenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak (lokasi)	1 (selesai)	5.500	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemhub, BUMN (Pelindo III), Swasta



Jawa-Bali - 52

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan Bandara Juanda	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		250	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub, BUMN
Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda	KA akses Bandara yang dibangun (km)	10 (selesai)	300	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan Gresik	Panjang jalan yang dibangun (km)		60	Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan lingkaran Utara Lamongan (DAK/APBN)	Panjang jalan yang terbangun (km)		91	Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder (Potensi)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	10		Kab. Lamongan, Kab. Gresik (Provinsi Jawa Timur)	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Jalan Tol Bandara Juanda -Tanjung Perak (SERR) (Potensi)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	25		Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Jalan Tol Waru (Aloha) Wonokromo - Tanjung Perak (Potensi)	Panjang jalan tol yang dibangun (km)	8		Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR (KPBU)
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	5.569	9.845,12	Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya (unit)		175	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)		4.666,60	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur		BUMN
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	7	70	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Pengembangan SPAM Regional Umbulan (lpd)		43,50	Kab Pasuruan dan sekitarnya, Provinsi Jawa Timur	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		4	Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan (Provinsi Jawa Timur)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		960,61	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		1.842,19	Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 53

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		331,70	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		2.363,85	Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Lamongan, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		463,37	Kab. Gresik, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		67,23	Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	Tambahan debit air baku di 5 wilayah metropolitan (m3/detik)	2	3.645	WM Surabaya (Gerbangkertasusila), Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengaman pantai	Panjang tanggul laut dan bangunan pengaman pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur		Badan Informasi Geospasial
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	19,69	WM Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Timur)				Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.735,29	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pembangunan Bandara Kediri-Jatim	Bandara baru yang dibangun (lokasi)		600,00	Kota Kediri (lingkup pelayanan), Provinsi Jawa Timur	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan (km)	60	908,20	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub
Jalan Tol Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi yang dibangun (km)	38	23.402,17	Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR, Badan Usaha
Jalan Tol Trans Jawa	Panjang Jalan Tol Kertosono - Kediri yang dibangun			Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur		KPBU
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)		5	Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 54

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		1.165,52	Kota Malang, Kota Probolinggo (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		62,60	Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		469,37	Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		33,09	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		41,46	Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Kediri (Provinsi Jawa Timur)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,19	57,43	Kota Batu, Kota Kediri (Provinsi Jawa Timur)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pengembangan kabupaten/kota/kawasan kreatif	Jumlah kabupaten/kota/kawasan kreatif yang dikembangkan		2,50	Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kememparekraf
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	197 desa berkembang; 2893 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa	12,06%				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	68,53	1.188,78	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	5	23,14	DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 55

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	281	156,28	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat		0,27	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 56

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	281	290,77	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	2.533	707,39	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Peremberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,56	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 57

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		1,28	Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	12	1,81	Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kediri	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	NA; 95.00	171,85	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pertanian 3. Kemendesa PDTT 4. Kementerian ESDM
Sarana Pemasaran Peternakan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pemasaran peternakan (unit)	2	3	Kab. Pamekasan	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan	Jumlah pakan olahan dan bahan pakan yang didistribusikan (ton)	2.000	58,80	Kab. Pamekasan	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Jumlah dosis yang didistribusikan untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan (dosis)	1688	0,22	Kab. Pamekasan	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Banyuwangi	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 58

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya (kawasan)	1	15,86	Kab. Pamekasan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan		0,36	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan	Jumlah kawasan yang memiliki potensi SDA Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan (kawasan)	1	8,62	Kab. Pamekasan	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	2	80,0	Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	240.076	315,60	Jawa Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,60				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	77,43				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	129				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	129				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	11.658				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	129				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	12				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 59

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Timur	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	3.495				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	5	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		62,67	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		23,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,93	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	39	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	39	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB



Jawa-Bali - 60

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangda)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2	5,52			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	39	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	39	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 61

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	39	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	39	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	39	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	39	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Pusat (alokasi Kementerian)	
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	92	1,21			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	39	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,60	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	39	0,97			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 62

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	38	0,55	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	39	1,54	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	39	0,45	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	39	0,45			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	39	0,45	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	39	0,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	39	0,45			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	39	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					



Jawa-Bali - 63

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	13,58	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan				Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	240.076	315,60	Jawa Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	521.860	4,30	Jawa Timur	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	40	32,10	Jawa Timur	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 64

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR		2,00	Jawa Timur (Lamongan)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	9	3,25	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	9	8,36	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan		1,74	Jawa Timur	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Banten						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	>1				
Reaktivasi Jalur KA Banten (Rangkasbitung - Pandeglang- Saketi-Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	20	1.100	Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Jalan akses KEK Tanjung Lesung	Panjang jalan yang terbangun		165	Banten	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KEK Tanjung Lesung	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)	0,03	9,75	Kab. Pandeglang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Fasilitasi koordinasi masalah strategis di KEK	Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK	7	6	Prov. Banten	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	153,51	9,77	Provinsi Banten, Kab. Lebak	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



Jawa-Bali - 65

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	53	1,16	Provinsi Banten, Kab. Lebak	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	jumlah produksi perikanan budidaya nasional (juta ton)	22,60		Provinsi Banten	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali					
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)				Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang		
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (KPBU)		2.120,20	Provinsi Banten		KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	2	234,60	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten)		Pemda (DAK)
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Badan Usaha)		2.214,64	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten)		BU
Pembangunan Fly Over Bitung	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		175	Kota Tangerang, Provinsi Banten	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta	Panjang Fly Over terbangun (lokasi)		175	Kota Tangerang, Provinsi Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jumlah kawasan TOD (termasuk fasilitas pejalan kaki, sepeda, serta zona selamat sekolah) yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	8.000	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Transit Oriented Development(TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jumlah kawasan TOD yang dikembangkan (kawasan)	4 (selesai)	400	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub
Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jumlah prasarana transportasi jabodetabek yang dikembangkan (paket)	2 (selesai)	70	Jawa Barat, DKI, Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Kemenhub
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		1.434,38	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)



Jawa-Bali - 66

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		41	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		2.504,15	Kota Tangerang, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		310	Kota Tangerang, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		162,19	Kota Tangerang, Kab. Tangerang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		0,80	Kota Tangerang, Provinsi Banten	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)	Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai yang dibangun atau ditingkatkan di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (km)		1.800	WM Jakarta di Provinsi Banten, Provinsi Banten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		131,37	WM Jakarta di Provinsi Banten, Provinsi Banten		BIG
ProP : Pembangunan Kota Baru Maja				Kota Baru Maja/ Kab Lebak		
Jalan Tol Jabodetabek	Panjang jalan tol Serpong-Balaraja yang dibangun		6.000	Kota Baru Maja/ Kab Lebak (lingkup pelayanan), Provinsi Banten		Swasta
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		0,80	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		506,25	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		13,70	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		87,56	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		8,43	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)		86,81	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Be Creative District (Maja-Rangkasbitung)	Jumlah BCD yang dikembangkan (unit)		66.666	Kota Baru Maja/ Kab Lebak, Provinsi Banten	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	BUMN dan Swasta, Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Banten)				Kota Cilegon, Kota Serang		
Peningkatan Jalur KA di Banten (Rangkasbitung-Merak)	Panjang Jalur Kereta Api yang Ditingkatkan	9	676	Kota Cilegon, Provinsi Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 67

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	15	800	Kota Cilegon, Provinsi Banten	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuh
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Jumlah pusat pengembangan keahlian	1	12,50	Kota Serang, Provinsi Banten	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kemennaker
Jalan Tol Non Trans Jawa	Panjang jalan tol Serang-Panimbang yang dibangun		5.300	Kota Serang, Provinsi Banten		KPBU
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	1.572	2.778,40	Provinsi Banten	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		253,13	Kota Cilegon, Kota Serang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		25,70	Kota Cilegon, Kota Serang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		480,79	Kota Cilegon, Kota Serang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		26,28	Kota Serang, Provinsi Banten	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		29,99	Kota Cilegon, Kota Serang (Provinsi Banten)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	197 desa berkembang; 2893 desa mandiri				
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa(%)	4,45				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	67,11	202,01	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, DPP Tanjung Lesung	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarananya untuk mendukung destinasi wisata (desa)	2	8,90	DPP Tanjung Lesung	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	246	24,10	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



Jawa-Bali - 68

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	246	45,90	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (desa)	406	113,42	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		1,28	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Pandeglang, Lebak	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Pandeglang	70	103,46	Kab. Pandeglang	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengembangan Pariwisata 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 6. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pertanian 4. Kemendesa PDTT 5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun (unit)	30		Kab. Pandeglang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan



Jawa-Bali - 69

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya	Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya yang didistribusikan (paket)	5		Kab. Pandeglang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner	Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner yang terbangun (unit)	1		Kab. Pandeglang	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3,00	Kab. Pandeglang	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	54	19,70	Kab. Pandeglang	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah unit yang didistribusikan untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)	3	1,59	Kab. Pandeglang	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	1	0,84	Kab. Pandeglang	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan		0,18	Kab. Pandeglang	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industri (unit)	1	40,00	Kab. Pandeglang	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	46.862	58,6	Banten	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)					
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin <small>*indikasi pendanaan masih merupakan total di 34 provinsi</small>	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10.000.000		Kab. Lebak dan Pandeglang*	Jaminan Sosial Keluarga	Kementerian Sosial
Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	2	6,00	Kab. Lebak dan Pandeglang	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	1	2,50	Prov. Banten	Program Penanggulangan Bencana	BNPB
Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus; Jumlah sekolah terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau sekolah darurat	4	3,20	Kab. Lebak dan Pandeglang	Kegiatan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 70

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kabupaten Pandeglang	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		4,64	Kab. Pandeglang		Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Pemulihan 5 Sektor Akibat Bencana di Kota Serang	Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana		2,10	Kab. Serang		Pemerintah Kabupaten Serang
Pemulihan pascabencana di Provinsi Banten	Terpulihkannya 5 sektor di 2 Kab/Kota pascabencana		39,91	Kab. Pandeglang dan Kab. Serang		Pemerintah Provinsi Banten
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,60				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	77,43				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	129				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	129				
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	11.658				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	129				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	12				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Banten	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	1.073				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		11,85	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		3,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		3,52	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 71

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyederhanaan perizinan yang menghambat investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat / KL dan daerah	Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/KL dan daerah yang di simplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,33	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,33	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	9	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	9	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2	2,26			



Jawa-Bali - 72

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,66	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah		0,59	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,92			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	9	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	9	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	9	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	9	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	9	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pusat (alokasi Kementerian)
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 73

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	9	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	58	0,67			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	9	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)		0,06	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Pusat (alokasi Kementerian)
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	5	0,07	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Pusat (alokasi Kementerian)
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	9	0,38			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,24	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	8	0,15	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	9	0,19	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	9	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	9	0,10			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	9	0,10	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	9	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	9	0,10			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	9	0,13	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	15,58	Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 75

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	2	1,40	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah regulasi terkait penataan daerah					
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	46.862	58,60	Banten	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	10.799	0,58	Banten	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	8	32,10	Banten	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Banten	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	2,01	Banten	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	4	4,62	Banten	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Provinsi Bali						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 76

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	>1				
Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali	>1				
Pengembangan Pelabuhan Benoa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	184,6	Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemhub, Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	90	Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemhub
Pengembangan Bandara Ngurah Rai	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		900	Bali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	BUMN
Pembangunan Bandara Bali Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.500	Bali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemhub
Jalan Lintas Utara Bali	Panjang jalan yang dibangun (km)		1.050	Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)	Panjang jalan yang dibangun (km)		215	Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	14 (selesai)	325	Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub (KPBU)
Pembangunan jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	14 (berlanjut)	2.770	Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemhub (KPBU)
Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Revitalisasi Bali	Tambahan debit air baku di kawasan strategis (m3/detik)		65	Kab. Buleleng	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		0,20	Pusat	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun					
Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali					
Kawasan Kopi	Kawasan Kopi (ha)	697,92	43,96	Provinsi Bali, Kab. Tabanan, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Buleleng	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	374,64	8,55	Provinsi Bali, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Karangasem	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 77

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali					
Kawasan Kakao	Kawasan Kakao (ha)	109,27	8,55	Provinsi Bali, Kab. Jembrana	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali					
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha)	264,08	5,74	Provinsi Bali, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi					
Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap nasional (juta ton)	10,10		Provinsi Bali	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali					
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar (Sarbagita)				Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan		
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	1	0,70	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kemendagri
Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Jumlah instalasi PSEL (lokasi)	1	117,30	Kota Denpasar, Provinsi Bali		Pemda (DAK)
PLTS Rooftop	Pembangunan PLTS Rooftop (MW)		87,50	Kota Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	KESDM
Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Denpasar berbasis jalan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)		50	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Kemenhub
Pembangunan Bandara Bali Baru	Bandara baru yang dibangun (lokasi)	1 (selesai)	1.500	WM Denpasar (lingkup pelayanan), Provinsi Bali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Bandara Ngurah Rai	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan (lokasi)		900	WM Denpasar, Provinsi Bali	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Benoa	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	1 (selesai)	184	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Sanur, Bali	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)		150	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Kemenhub, Badan Usaha
Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan APBN)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	14 (selesai)	325	Kab. Badung, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU



Jawa-Bali - 78

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembangunan jalur KA Mengwitani - Singaraja (Dukungan KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	14 (berlanjut)	2,770	Kab. Badung, Provinsi Bali	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenhub, KPBU
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut)	Panjang jalan yang dibangun (km)		215	Kab. Badung, Provinsi Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)	Jembatan yang dibangun (lokasi)		80	Kota Denpasar, Provinsi Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Jumlah rumah susun yang terbangun (unit)	578	1,021	Provinsi Bali	Program Pengembangan Perumahan	Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota)	4	40	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management		2,10	Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)		1,60	Kota Denpasar, Kab. Gianyar (Provinsi Bali)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)		470,62	Kab. Badung, Kota Denpasar (Provinsi Bali)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		379,69	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)		56,90	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		629,57	Kab Tabanan, Kab Badung, Kab Gianyar (Provinsi Bali)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun (unit)		41,27	Kab Badung, Provinsi Bali	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Jumlah TPS3R yang terbangun (unit)		44,49	Kab. Tabanan, Kab. Gianyar, Kab. Badung (Provinsi Bali)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	DAK, Kementerian PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	0,33	148,28	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) yang terbit tepat waktu	1	13,48	WM Denpasar, Provinsi Bali	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Badan Pusat Statistik

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri	197 desa berkembang; 2893 desa mandiri				
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	2,013694056				
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi					
	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)					
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	73,04	103,19	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	133	11,62	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat		0,27	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,25	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	133	23,99	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	209	58,27	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	0,52	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes		0,95	Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Tabanan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT



Jawa-Bali - 80

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	2	0,30	Gianyar, Buleleng	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Buleleng dan Kab. Klungkung	68.10; NA	579,75	Kab. Buleleng dan Klungkung	1. Program Pengembangan Pariwisata 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Program Ketenagalistrikan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian PUPR (diusulkan melalui DAK)
Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Jumlah destinasi pariwisata utama dan prioritas yang menerapkan Sustainable Tourism Practices (destinasi)	1	3	Kab. Buleleng	Program Pengembangan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya (BUMDes bersama)	2	1,68	Kab. Buleleng dan Klungkung	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan		0,36	Kab. Buleleng dan Klungkung	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industry	Jumlah unit suplai energi yang dibangun untuk pemenuhan domestik dan industry (unit)	1	40	Kab. Buleleng	Program Ketenagalistrikan	Kementerian ESDM
Pemasangan Sambungan Rumah (SR) di Lembongan dan Jungutbatu sebanyak 2.178 SR	Jumlah sambungan rumah (SR) yang terpasang di Lembongan dan Jungutbatu		6,53	Kab. Klungkung		Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Baru Ruas Lingkaran Barat - Selatan	Panjang jalan baru ruas barat - selatan yang terbangun		503,17	Kab. Klungkung		Kementerian PUPR
Rehabilitasi/Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Jungutbatu di Desa Jungutbatu	Panjang tanggul pengaman Pantai Jungutbatu di Desa Jungutbatu yang terbangun		25	Kab. Klungkung		Kementerian PUPR
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	32.702	27,50	Bali	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,60				
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	77,43				
	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	129				
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	129				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 81

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	11.658				
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik					
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	129				
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	12				
	Persentase capaian SPM di daerah (%)	100				
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik					
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Bali	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	972				
Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	2	0,56	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000		38,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000		14,04	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BIG
Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Persentase Ranperda yang sesuai dengan hasil review Kemendagri (%)	100	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Fasilitasi Penataan Produk Hukum di Daerah
	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	1	0,21	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)	1	0,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Fasilitasi Penataan Produk Hukum di Daerah
Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	10	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 82

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	6	0,08	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda
Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi antar SKPD dalam mendukung beroperasinya mall pelayanan publik	10	1,03	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
	Jumlah urusan yang NSPK-nya telah diharmonisasikan untuk mendukung pelayanan mall pelayanan publik di daerah	32	0,37	Pusat (alokasi Kementerian)		Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register	Jumlah aplikasi Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil dan analisis daerah, E-rakortek, Monev Bangsa)	1	0,23	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(2) Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	2	4,40			
Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	2	0,58	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Persentase regulasi pusat dan daerah yang direview (terutama regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antar daerah) (%)	100	0,30	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	4	2,39	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	58		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



Jawa-Bali - 83

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya		0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Bina Administrasi Kewilayahan
Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran (%)	100	1,08	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Bina Administrasi Kewilayahan
Monitoring perjanjian kerja sama	Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya (%)	100	0,27			
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	100	2,18			
Integrasi dan penerapan SPM	Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	10	1,70	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah
Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	10	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Penerapan SPM Sub bidang Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	10	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	10	0,48	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	10	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	32	0,47	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten	10	0,20	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	66	0,61			
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	1	0,26	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Jumlah daerah yang dilakukan penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L	10	0,27	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah
Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	12	0,07	Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda
	(5) Jumlah daerah yang meningkat pendapatan daerahnya dari pajak dan retribusi daerah	10	0,44			
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Jumlah provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya	1	0,29	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Jumlah kabupaten dan kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	9	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	9	0,15			
Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)	10	0,25	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 85

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	10	0,11			
Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	10	0,11	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari Dana Transfer Umum)	10	0,12	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	1	0,05	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	10	0,11			
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	10	0,14	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	1	0,34	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.					
Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	1	0,80	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 86

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)*			
	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	22	17,43	Provinsi	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Jumlah regulasi terkait penataan daerah			Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1	1,32	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	7	0,09	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	4	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	8	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	2	0,17	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan Pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	32.702	27,50	Bali	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	223	2,12	Bali	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	10	32,10	Bali	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jawa-Bali - 87

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar*)			
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0,86	Bali	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	5	2,21	Bali	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	5	6,25	Bali		Kementerian ATR/BPN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit